



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

MANAJEMEN DATA APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Satu Data Aparatur Sipil Negara yang akurat dan berkualitas sesuai dengan prinsip Satu Data Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Manajemen Data Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1281);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG MANAJEMEN DATA APARATUR SIPIL NEGARA.

KESATU : Menetapkan Manajemen Data Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Januari 2021

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

DRAFT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

MANAJEMEN DATA APARATUR SIPIL NEGARA

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen Data Aparatur Sipil Negara merupakan proses perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari jenis Data Induk, Data Transaksi dan Data Referensi sesuai dengan prinsip Satu Data ASN yang didukung melalui sistem berbasis elektronik.
2. Arsitektur Data Aparatur Sipil Negara adalah proses yang menggambarkan dan mengatur standarisasi jenis data, aliran data yang dikumpulkan, dikelola, diintegrasikan dan disimpan serta bagaimana data tersebut saling berhubungan dalam hal proses layanan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Data Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Data adalah deskripsi suatu kejadian atau fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, dan tulisan yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu objek, kondisi, dan situasi dari suatu sumber terkait di bidang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan ASN.
4. Data Induk adalah Data yang bersifat cenderung tetap, tidak memiliki perubahan substansial dalam jangka waktu paling kurang 1 (satu) tahun, dijadikan acuan bagi Data Transaksi, dan dapat digunakan oleh seluruh Unit Kerja.
5. Data Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN adalah deskripsi suatu kejadian atau fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, dan tulisan yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu objek, kondisi, dan situasi yang berhubungan dengan pejabat pimpinan tinggi non ASN.
6. Data Prioritas adalah Data terpilih yang mendukung pencapaian indikator utama Badan Kepegawaian Negara dan berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.

7. Data Referensi adalah Data yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan bagi Data Transaksi, dan dapat digunakan oleh pengguna data ASN.
8. Data Transaksi adalah Data yang bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan proses transaksi yang terjadi.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10. Data Administratif adalah Data tentang pengelolaan administrasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan ASN.
11. Diseminasi Data yang selanjutnya disebut sebagai Diseminasi adalah publikasi Data melalui Portal Data dan/atau melalui media lainnya.
12. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
15. Metadata adalah keterangan teknis dan deskriptif tentang Data yang disajikan dalam struktur dan format standar untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan, atau mengelola informasi dari suatu Data dan merupakan sarana bagi produsen/pengguna Data untuk memberitahu/mengetahui kualitas Data.
16. Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN yang selanjutnya disebut PPT Non ASN merupakan pegawai Non ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
17. Produsen Data adalah unit kerja eselon II yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
19. Pengolah Data adalah ASN dan pihak lain yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengumpulkan dan memasukkan Data ke dalam Portal Data.

20. Pembina Data adalah kementerian/lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pembinaan terkait Data.
21. Portal Data adalah media pengelolaan dan media bagi-pakai Data di tingkat Badan Kepegawaian Negara yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
23. Satu Data ASN yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola data ASN di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dengan menyatukan Data yang tersebar di berbagai Unit Kerja dan data Pejabat Non ASN untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, menggunakan Kode Referensi dan Data Induk serta diseminasi secara elektronik dalam satu Portal Data yang menjadi bagian dari Satu Data Indonesia.
24. Sekretariat Satu Data ASN adalah wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
25. Standar Data adalah parameter sebagai dasar dalam pengelolaan Data tertentu.
26. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas yang dilakukan di Badan Kepegawaian Negara, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
27. Unit Kerja adalah Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II yang ada dalam organisasi Badan Kepegawaian Negara.
28. Walidata ASN adalah unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data termasuk memutakhirkan data ASN tertentu berdasarkan standar yang telah disepakati dengan Pembina Data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan Data.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap Unit Kerja Badan Kepegawaian Negara serta Pemangku Kepentingan lainnya dalam hal layanan Manajemen ASN.

Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Data ASN sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

C. RUANG LINGKUP

Manajemen Data ASN terdiri dari:

1. Standardisasi Data;
2. Kode Referensi;
3. Metadata;
4. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Penyajian Data; dan
5. Arsitektur Data.

D. STANDARDISASI DATA

Standardisasi Data ASN terdiri atas:

1. Jenis Data:
 - a. Data Induk yaitu Data ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dikelola oleh Walidata ASN.
 - b. Data Transaksi yaitu Data Layanan Manajemen ASN yang diproduksi oleh Produsen Data dan dikelola oleh Walidata ASN.
 - c. Data Transaksi meliputi:
 - 1) Data Utama (Profil);
 - 2) Data Perencanaan Aparatur Sipil Negara;
 - 3) Data Seleksi Aparatur Sipil Negara;
 - 4) Data Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
 - 5) Data Mutasi Aparatur Sipil Negara;
 - 6) Data Pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
 - 7) Data Status dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara;
 - 8) Data Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - 9) Data Kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - 10) Data Pengawasan dan Pengendalian Aparatur Sipil Negara;
 - 11) Data Talent Management;
 - 12) Data Tata Naskah Digital; dan
 - 13) Data Riwayat Aparatur Sipil Negara
 - a) riwayat pendidikan formal dan non formal;
 - b) riwayat jabatan dan kepangkatan;
 - c) riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
 - d) riwayat pengalaman berorganisasi;
 - e) riwayat gaji; dan
 - f) riwayat pendidikan dan latihan.
 - d. Data Referensi yaitu data acuan yang digunakan dalam transaksi layanan manajemen ASN, yang terdiri dari:

- 1) Referensi Jabatan;
- 2) Referensi Pendidikan;
- 3) Referensi Lokasi Dalam Negeri, Luar Negeri;
- 4) Referensi Unit Organisasi;
- 5) Referensi Diklat;
- 6) Referensi Agama;
- 7) Referensi Eselon;
- 8) Referensi Golongan;
- 9) Referensi Hukuman;
- 10) Referensi Instansi;
- 11) Referensi Jenis Pegawai;
- 12) Referensi Kantor Regional;
- 13) Referensi Kedudukan Hukum;
- 14) Referensi KPPN;
- 15) Referensi KTUA;
- 16) Referensi Taspen; dan
- 17) Referensi Gaji.

2. Standar Data

Standar Data Aparatur Sipil Negara dijelaskan pada tabel 1 berikut ini:

Table 1. Standar Data

No	Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Penulisan
1	Data Aparatur Sipil Negara	Menjelaskan tentang data induk PNS dan PPPK	Data induk yang terdiri dari informasi dasar ASN	Data Induk	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
2	Data Utama (Profil) ASN	Menjelaskan tentang profil setiap Aparatur Sipil Negara	Data utama ASN yang berisikan daftar riwayat hidup ASN	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
3	Data Perencanaan Aparatur Sipil Negara	Menjelaskan tentang kebutuhan ASN dalam sebuah unit organisasi	Data perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga menjamin tersedianya SDM sesuai jumlah, kualifikasi dan kompetensi	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
4	Data Seleksi Aparatur Sipil Negara	Menjelaskan data calon ASN yang mengikuti tahapan proses	Data calon ASN di setiap tahapan proses	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata

No	Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Penulisan
		proses seleksi ASN	perekrutan ASN		
5	Data Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Menjelaskan data calon ASN dalam memperoleh NIP dan menjadi CPNS	Data calon ASN yang digunakan pada proses penetapan NIP CPNS	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
6	Data Mutasi Aparatur Sipil Negara	Menjelaskan tentang proses layanan mutasi ASN	Data ASN yang mengalami mutasi berupa pindah instansi, promosi, pencantuman gelar.	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
7	Data Pemberhentian Aparatur Sipil Negara	Menjelaskan penon-aktifan status sebagai ASN	Data ASN yang mengalami perubahan status menjadi tidak aktif	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
8	Data Status dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara	Menjelaskan data status sebagai PNS	Data ASN terkait elemen NIP dan Nama	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
9	Data Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Menjelaskan data kompetensi pada ASN	Data terkait pengetahuan, keterampilan dan perilaku ASN dalam melaksanakan tugas jabatan	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
10	Data Kinerja Aparatur Sipil Negara	Menjelaskan data kinerja pada ASN	Data terkait penilaian kinerja per tahun ASN	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
11	Data Pengawasan dan Pengendalian Aparatur Sipil Negara	Menjelaskan data pengawasan dan pengendalian ASN	Data terkait hukuman, kepatuhan terhadap NSPK pada ASN	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
12	Data Talent Management	Menjelaskan data Talent Management	Data terkait kompetensi ASN, dan pola karier ASN	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
13	Data Tata Naskah Digital	Menjelaskan data Tata Naskah Digital	Data terkait dokumen tata naskah yang disimpan secara digital	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
14	Data Riwayat Aparatur Sipil	Menjelaskan data utama		Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital

No	Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Penulisan
	Negara	ASN			diawal Kata
	a.Riwayat pendidikan formal	Data pendidikan formal	Riwayat Data terkait pendidikan yang dijalankan secara formal	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
	b.Riwayat pendidikan non formal	Data pendidikan non formal	Riwayat Data terkait pendidikan yang dijalankan secara non-formal	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
	(1) Riwayat diklat	Data diklat	Riwayat Data terkait penyelenggaran pembelajaran dan pelatihan	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
	(2) Riwayat kursus	Data kursus	Riwayat Data terkait pendidikan non formal	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
	c.Riwayat Jabatan	Data jabatan	Riwayat data terkait jabatan	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
	d.Riwayat kepangkatan	Data pangkat	Riwayat Data terkait kedudukan PNS dalam jabatan	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
	e.Riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan	Data penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;	Riwayat Data terkait imbalan balas jasa yang diberikan pada ASN	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
	f.Riwayat pengalaman berorganisasi	Data pengalaman berorganisasi	Riwayat Data terkait kontribusi pada organisasi	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
	g.Riwayat gaji	Data Gaji	Riwayat Data terkait honor/upah	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
	h.Riwayat CLTN	Data CLTN	Riwayat data terkait CLTN	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
	i. Riwayat CPNS-PNS	Data CPNS-PNS	Riwayat Data terkait CPNS/PNS	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
	j. Riwayat Profesi	Data Profesi	Riwayat Data terkait Profesi ASN	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
	k.Riwayat Kedudukan Hukum	Data Kedudukan Hukum	Riwayat Data terkait Kedudukan	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata

No	Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Penulisan
		Hukum			
1.	Riwayat Hukuman Disiplin	Data Hukuman Disiplin	Riwayat Data terkait Hukuman Disiplin ASN	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
m.	Riwayat LHKPN	Data LHKPN	Riwayat Data terkait LHKPN	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
n.	Riwayat Angka Kredit	Data angka kredit	Riwayat Data terkait Angka Kredit	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
o.	Riwayat Kepanitiaan	Data kepanitiaan	Riwayat Data terkait Kepanitiaan	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
p.	Riwayat Pindah Wilayah Kerja	Data pindah wilayah kerja	Riwayat Data terkait PWK	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
q.	Riwayat Orang Tua	Data Orang Tua	Riwayat Data terkait Orang Tua	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
r.	Riwayat Pasangan	Data Pasangan	Riwayat Data terkait Pasangan	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
s.	Riwayat Anak	Data Anak	Riwayat Data terkait Anak	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
t.	Riwayat masa kerja	Masa kerja selama menjadi ASN	Riwayat Data terkait Masa Kerja	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
u.	Riwayat pemberhentian	Jenis pemberhentian ASN	Riwayat Data terkait Pemberhentian	Data Transaksi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
15	Referensi Jabatan	Jabatan pada ASN	Rujukan Nama jabatan	Data Referensi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
16	Referensi Pendidikan	Pendidikan formal dan non formal	Rujukan nama pendidikan	Data Referensi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
17	Referensi Lokasi Dalam Negeri, Luar Negeri	Lokasi daerah dalam negeri dan luar negeri	Lokasi lahir ASN Lokasi penempatan ASN	Data Referensi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
18	Referensi Unit Organisasi	Bagian pada struktur organisasi	Rujukan bagian susunan organisasi	Data Referensi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
19	Referensi Diklat	Diklat/Kursus	Rujukan Diklat	Data Referensi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
20	Referensi Agama	Agama ASN	Rujukan Agama	Data Referensi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata

No	Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Penulisan
21	Referensi Eselon	Tingkat Elselon ASN	Rujukan Eselon	Data Referensi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
22	Referensi Golongan	Tingkat golongan ruang	Rujukan Golongan	Data Referensi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
23	Referensi Hukuman	Jenis Hukuman	Rujukan Hukuman Disiplin	Data Referensi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
24	Referensi Instansi	Nama Instansi	Rujukan K/L/D	Data Referensi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
26	Referensi Jenis Pegawai	Jenis Pegawai	Rujukan Jenis Pegawai	Data Referensi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
27	Referensi Kantor Regional	Kode Kantor Regional	Rujukan Kantor Regional di BKN	Data Referensi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
28	Referensi Kedudukan Hukum	Kedudukan ASN	Rujukan Kedudukan Hukum	Data Referensi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
29	Referensi KPPN	Kode dan Nama KPPN	Rujukan KPPN	Data Referensi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
30	Referensi KTUA	Kode dan Nama KTUA	Rujukan KTUA	Data Referensi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
31	Referensi TASPEN	Lokasi Taspen	Rujukan Taspen	Data Referensi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
32	Referensi Tabel Gaji	Data gaji ASN	Rujukan Honor atau Upah ASN	Data Referensi	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
33	Data pengelolaan anggaran dan keuangan;	Data anggaran dan keuangan	Perencanaan, penggunaan dan monev anggaran dan keuangan	Data Administratif	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
34	Data kepegawaian;	Data pengelolaan kepegawaian	Profil dan riwayat kepegawaian	Data Administratif	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
35	Data produk hukum;	Data hasil produk hukum	Peraturan/kebijakan manajemen ASN	Data Administratif	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
36	Data pengelolaan barang milik negara;	Data barang milik negara	Daftar data barang milik negara	Data Administratif	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
37	Data pengawasan internal;	Data kegiatan pengawasan	Hasil aktivitas pengawasan	Data Administratif	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata
38	Data kerja sama; dan	Data kerja sama antar	Nota Kesepahaman	Data Administratif	Menggunakan Huruf Kapital

No	Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Penulisan
		lembaga	dan Perjanjian Kerja Sama		diawal Kata
39	Data penelitian.	Data hasil penelitian	Publikasi hasil penelitian	Data Administratif	Menggunakan Huruf Kapital diawal Kata

3. Produsen Data

Produsen data untuk berbagai jenis data dijelaskan pada tabel 2 berikut ini:

Table 2. Produsen Data

No	Data	Klasifikasi	Produsen Data
1	Data Perencanaan Aparatur Sipil Negara	Data Transaksi	Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN
2	Data Seleksi Aparatur Sipil Negara	Data Transaksi	Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
3	Data Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Data Transaksi	Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan
4	Data Mutasi Aparatur Sipil Negara	Data Transaksi	Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan
5	Data Pemberhentian Aparatur Sipil Negara	Data Transaksi	Direktorat Pensiun
6	Data Status dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara	Data Transaksi	Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian
7	Data Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Data Transaksi	Direktorat Kompetensi
8	Data Kinerja Aparatur Sipil Negara	Data Transaksi	Direktorat Kinerja
9	Data Pengawasan dan Pengendalian Aparatur Sipil Negara	Data Transaksi	Direktorat Pengawasan Pengendalian I, II, III, IV
10	Data Tata Naskah Digital	Data Transaksi	Direktorat Arsip Kepegawaian
11	Data Talent Management	Data Transaksi	
12	Data Riwayat Aparatur Sipil Negara	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	a. Riwayat pendidikan formal dan non formal;	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah

No	Data	Klasifikasi	Produsen Data
	b. Riwayat pendidikan non formal	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	(1) Riwayat diklat	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	(2) Riwayat kursus	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	c. Riwayat Jabatan	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	d. Riwayat kepangkatan;	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	e. Riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	f. Riwayat pengalaman berorganisasi;	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	g. Riwayat gaji; dan	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	h. Riwayat CLTN	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	i. Riwayat CPNS-PNS	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	j. Riwayat Profesi	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	k. Riwayat Kedudukan Hukum	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	l. Riwayat Hukuman Disiplin	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	m. Riwayat LHKPN	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	n. Riwayat Angka Kredit	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	o. Riwayat Kepanitiaan	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	p. Riwayat Pindah Wilayah Kerja	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	q. Riwayat Orang Tua	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	r. Riwayat Pasangan	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	s. Riwayat Anak	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	t. Riwayat masa kerja	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
	u. Riwayat pemberhentian	Data Transaksi	Instansi Pusat/Daerah
13	Referensi Unit Organisasi	Data Referensi	Instansi Pusat/Daerah
14	Data pengelolaan anggaran dan keuangan;	Data Administratif	Biro Keuangan
15	Data kepegawaian;	Data Administratif	Biro SDM
16	Data produk hukum;	Data Administratif	Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Direktorat PPU
17	Data pengelolaan barang milik negara;	Data Administratif	Biro Umum
18	Data pengawasan internal;	Data Administratif	Inspektorat
19	Data kerjasama; dan	Data Administratif	Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama
20	Data penelitian.	Data Administratif	Pusat Penelitian Manajemen ASN
21	Referensi Jabatan	Data Referensi	Direktorat Jabatan ASN
22	Referensi Kelas Jabatan	Data Referensi	Direktorat Kompensasi
23	Referensi Pendidikan	Data Referensi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
24	Referensi Lokasi	Data Referensi	Kementerian Dalam Negeri

No	Data	Klasifikasi	Produsen Data
	Dalam Negeri, Luar Negeri		
25	Referensi Diklat	Data Referensi	Lembaga Administrasi Negara

E. KODE REFERENSI

Kode referensi untuk masing-masing data referensi ASN disusun sebagai berikut:

1. Kode referensi untuk data referensi yang dimiliki oleh produsen data di luar Badan Kepegawaian Negara ditentukan oleh produsen data referensi masing-masing.
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai kode referensi untuk data referensi yang dimiliki oleh produsen data Badan Kepegawaian Negara diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Badan.
3. Apabila kode referensi untuk data referensi yang dimiliki oleh produsen data diluar Badan Kepegawaian Negara belum diatur oleh Instansi masing-masing, maka dapat menggunakan mekanisme kode referensi Badan Kepegawaian Negara.

F. METADATA

1. Metadata ASN terdiri dari:
 - a. Metadata Data Induk ASN;
 - b. Metadata Data Utama (Profil);
 - c. Metadata Perencanaan ASN;
 - d. Metadata Data Seleksi ASN;
 - e. Metadata Data Pengadaan ASN;
 - f. Metadata Data Mutasi ASN;
 - g. Metadata Data Pemberhentian ASN;
 - h. Metadata Data Status & Kedudukan ASN;
 - i. Metadata Data Kompetensi ASN;
 - j. Metadata Data Kinerja ASN;
 - k. Metadata Data Pengawasan dan Pengendalian ASN;
 - l. Metadata Data Tata Naskah Digital ASN;
 - m. Metadata Data Talent Management ASN;
 - n. Metadata Data Riwayat ASN;
 - o. Metadata Data Referensi Jabatan;
 - p. Metadata Data Referensi Pendidikan;
 - q. Metadata Data Referensi Lokasi;
 - r. Metadata Data Referensi Unit Organisasi;
 - s. Metadata Data Referensi Diklat;
 - t. Metadata Data Referensi Agama;

- u. Metadata Data Referensi Eselon;
- v. Metadata Data Referensi Golongan;
- w. Metadata Data Referensi Hukuman;
- x. Metadata Data Referensi Instansi;
- y. Referensi Jenis Pegawai;
- z. Metadata Data Referensi Kantor Regional;
- aa. Metadata Data Referensi Kedudukan Hukum;
- bb. Metadata Data Referensi KPPN;
- cc. Metadata Data Referensi KTUA;
- dd. Metadata Data Referensi TASPEN; dan
- ee. Metadata Data Referensi Tabel Gaji.

2. Metadata Data Induk ASN dijelaskan pada tabel 3 berikut ini:

Table 3. Metadata Data Induk ASN

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	Data Pribadi				
1	NIP	Nomor Induk Pegawai	Data Kepegawaian perorangan Nota Persetujuan BKN mengenai penetapan NIP/SK CPNS/SK PNS	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
2	Nama	Sebutan atau Panggilan	Penggantian nama oleh Pimpinan Instansi/ Pengadilan Negeri SK CPNS/PNS Nota Persetujuan BKN mengenai Penetapan NIP/Ijazah/Daftar Riwayat Hidup Data Kepegawaian Perorangan	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
3	Tempat Lahir	Kota/ Kabupaten tempat dilahirkan	Data Kepegawaian Perorangan Nota persetujuan BKN mengenai penetapan NIP/Ijazah/Daftar Riwayat Hidup SK CPNS/PNS	Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
4	Tanggal Lahir	Penanggalan lahir	Data Kepegawaian Perorangan Nota persetujuan BKN mengenai penetapan NIP/Ijazah/Daftar Riwayat Hidup SK CPNS/PNS Perubahan Tanggal Lahir yang sudah disetujui	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
			BKN		
5	Jenis Kelamin	Gender	SK Pergantian Jenis Kelamin Data Kepegawaian Perorangan Nota persetujuan BKN mengenai penetapan NIP SK CPNS/PNS Daftar Riwayat Hidup	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
6	Agama	Kepercayaan yang dianut	Laporan Penggantian Agama Laporan Perkawinan terakhir Daftar Keluarga/Laporan Perkawinan Data Kepegawaian Perorangan Daftar Riwayat Hidup	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
7	Jenis Dokumen	Jenis Dokumen Pengenal KTP		Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
8	Nomor Dokumen	Nomor Dokumen Pengenal		Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
9	TMT PNS	Terhitung mulai tanggal seseorang menjadi PNS	Berita acara pelantikan PNS Sumpah Jabatan SK PNS	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
10	TMT CPNS	Terhitung mulai tanggal seseorang menjadi CPNS	Berita acara pelantikan CPNS SK CPNS	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK

3. Metadata Data Utama (Profil) dijelaskan pada tabel 4 berikut ini:

Table 4. Metadata Data Utama (Profil)

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	Data Pribadi				
1	NIP Baru	Nomor Induk Pegawai	Data Kepegawaian perorangan Nota Persetujuan BKN mengenai penetapan NIP/SK CPNS/SK PNS	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
2	NIP Lama	Nomor Induk Pegawai Lama	Data Kepegawaian perorangan Nota Persetujuan BKN mengenai penetapan NIP/SK CPNS/SK PNS yang ditetapkan sebagai CPNS sampai TMT tahun 2008	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
3	Nama	Sebutan atau Panggilan	Penggantian nama oleh Pimpinan Instansi/	Perka BKN Nomor14	PNS YBS,

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
			Pengadilan Negeri SK CPNS/PNS Nota Persetujuan BKN mengenai Penetapan NIP/Ijazah/Daftar Riwayat Hidup Data Kepegawaian Perorangan	Tahun 2011	PPK
4	Gelar Akademik	Sebutan kehormatan terkait ilmu pengetahuan	Nota persetujuan BKN mengenai Kenaikan Pangkat SK Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Nota persetujuan BKN mengenai penetapan NIP SK CPNS/PNS Data Kepegawaian Perorangan	Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
5	Tempat Lahir	Kota/ Kabupaten tempat dilahirkan	Data Kepegawaian Perorangan Nota persetujuan BKN mengenai penetapan NIP/Ijazah/Daftar Riwayat Hidup SK CPNS/PNS	Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
6	Tanggal Lahir	Penanggalan lahir	Data Kepegawaian Perorangan Nota persetujuan BKN mengenai penetapan NIP/Ijazah/Daftar Riwayat Hidup SK CPNS/PNS Perubahan Tanggal Lahir yang sudah disetujui BKN	Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
7	Jenis Kelamin	Gender	SK Pergantian Jenis Kelamin Data Kepegawaian Perorangan Nota persetujuan BKN mengenai penetapan NIP SK CPNS/PNS Daftar Riwayat Hidup	Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
8	Agama	Kepercayaan yang dianut	Laporan Penggantian Agama Laporan Perkawinan terakhir Daftar Keluarga/Laporan Perkawinan Data Kepegawaian Perorangan Daftar Riwayat Hidup	Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
9	Email	Surat elektronik yang aktif		Perka BKN Nomor 14 Tahun	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
				2011	
10	Jenis Dokumen	Jenis Dokumen Pengenal KTP		Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
11	Nomor Dokumen	Nomor Dokumen Pengenal		Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
12	Alamat Tempat Tinggal	Alamat tempat menetap	Daftar Riwayat Hidup	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
13	Nomor HP	Nomor handphone yang aktif		Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
14	Nomor Telepon	Nomor telepon yang aktif		Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
15	Jenis Kepegawaian	Jenis pegawai dalam PNS	Nota Persetujuan BKN mengenai Jenis Pengalihan Kepegawaian SK Pengalihan Jenis Kepegawaian Data Kepegawaian Perorangan Nota Persetujuan BKN mengenai penetapan NIP SK CPNS SK PNS	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
16	Kedudukan PNS	Kedudukan Hukum dalam PNS	Data Kepegawaian Perorangan Nota Persetujuan BKN mengenai penetapan NIP SK CPNS/PNS Kartu Pegawi	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
17	Status Kepegawaian	Status pegawai dalam PNS	Nota Persetujuan BKN mengenai pengalihan jenis kepegawaian SK Pengalihan Jenis Kepegawaian Data Kepegawaian Perorangan Nota Persetujuan BKN mengenai penetapan NIP SK CPNS/PNS	Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
18	TMT PNS	Terhitung mulai tanggal seseorang menjadi PNS	Berita acara pelantikan PNS Sumpah Jabatan SK PNS	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
19	Seri Karpeg	Nomor Kartu Pegawai	Kartu Pegawai	Perka BKN Nomor14 Tahun	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
				2011	
20	Tingkat Pendidikan	Riwayat pendidikan PNS	Nota Persetujuan BKN mengenai KP SK KP Penyesuaian Ijazah Ijazah Laporan Peningkatan Pendidikan	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
21	Diklat Struktural	Riwayat Diklat struktural PNS	Surat Tanda Lulus Diklat Struktural	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
22	Pendidikan Tinggi Terakhir	Tingkat pendidikan terakhir PNS	Nota Persetujuan BKN mengenai KP SK KP Penyesuaian Ijazah Laporan Peningkatan Pendidikan Nota Persetujuan BKN mengenai penetapan NIP SK CPNS/PNS Data Kepegawaian Perorangan	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
23	Tahun Lulus	Tahun lulus pada pendidikan terakhir	Nota Persetujuan BKN mengenai KP SK KP Penyesuaian Ijazah Ijazah Laporan Peningkatan Pendidikan	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
24	Posisi Jabatan				PNS YBS, PPK
24	Instansi Induk	Instansi asal	Nota Persetujuan BKN mengenai Pindah Instansi SK Pindah Instansi Data Kepegawaian Perorangan Nota Persetujuan BKN mengenai penetapan NIP SK CPNS	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
25	Instansi Tempat Bekerja	Instansi tempat bekerja	Nota Persetujuan BKN mengenai Pindah Instansi/DPB/DPK SK Pindah Instansi/DPB/DPK Data Kepegawaian Perorangan Nota Persetujuan BKN mengenai penetapan NIP SK CPNS SK PNS Penetapan Angka Kredit	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
26	Satuan Unit	Unit Kerja	Surat Laporan Unit Kerja	Perka BKN	PNS

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	Kerja	tempat PNS bekerja	terakhir SK KP terakhir SK Pindah wilayah kerja terakhir SK DPB terakhir SK DPK terakhir SK Pindah Instansi SK Pengangkatan sebagai Pejabat Negara yang dibebas tugaskan dari jabatan organik Surat Perintah Melaksanakan Tugas SK Pengangkatan Dalam Jabatan SK PNS SK CPNS Nota Persetujuan BKN mengenai Penetapan NIP Data Kepegawaian Perorangan Penetapan Angka Kredit SKP	Nomor 14 Tahun 2011	YBS, PPK
27	Lokasi Kantor Bekerja	Posisi Bangunan Kantor setingkat Kabupaten/ Kota	Surat Laporan Unit Kerja terakhir SK KP terakhir SK Pindah wilayah kerja terakhir SK DPB terakhir SK DPK terakhir SK Pindah Instansi SK Pengangkatan sebagai Pejabat Negara yang dibebas tugaskan dari jabatan organik Surat Perintah Melaksanakan Tugas SK Pengangkatan Dalam Jabatan SK PNS SK CPNS Nota Persetujuan BKN mengenai Penetapan NIP Data Kepegawaian Perorangan Penetapan Angka Kredit SKP	Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
28	Unit Organisasi Induk	Unit kerja induk PNS	Surat Laporan Unit Kerja terakhir SK KP terakhir SK Pindah wilayah kerja terakhir SK DPB terakhir SK DPK terakhir SK Pindah Instansi	Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
			SK Pengangkatan sebagai Pejabat Negara yang dibebas tugaskan dari jabatan organik Surat Perintah Melaksanakan Tugas SK Pengangkatan Dalam Jabatan SK PNS SK CPNS Nota Persetujuan BKN mengenai Penetapan NIP Data Kepegawaian Perorangan Penetapan Angka Kredit SKP		
29	Eselon	Hierarki jabatan struktural pada PNS		Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
30	Jenis Jabatan	Jenis Jabatan pada PNS	SK Pengangkatan dalam jabatan Struktural Berita acara pelantikan jabatan Sumpah Jabatan Surat pernyataan menduduki jabatan SK Hukuman Disiplin	Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
31	Jabatan Struktural	Nama jabatan struktural pada PNS	SK Pengangkatan dalam jabatan Struktural Berita acara pelantikan jabatan Sumpah Jabatan Surat pernyataan menduduki jabatan SK Hukuman Disiplin	Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
32	TMT Jabatan Struktural	Terhitung mulai tanggal PNS menduduki jabatan struktural	SK Pengangkatan dalam jabatan Struktural Berita Acara Pelantikan jabatan Sumpah jabatan Surat Pernyataan menduduki jabatan SK Hukuman Disiplin	Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
33	Jabatan Fungsional	Nama jabatan fungsional pada PNS	SK Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Berita acara pelantikan jabatan Sumpah Jabatan Surat pernyataan menduduki jabatan SK Hukuman Disiplin Penetapan Angka Kredit Inpasng/SK Kenaikan	Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		Pangkat terakhir			
34	TMT Jabatan Fungsional	Terhitung mulai tanggal PNS menduduki jabatan fungsional	Berita acara pelantikan jabatan SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional SK Inpassing ke dalam jabatan Fungsional SK Jabatan Fungsional terakhir	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
35	Jabatan Fungsional Umum	Nama jabatan fungsional umum pada PNS	SK Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Umum Berita acara pelantikan jabatan Sumpah Jabatan Surat pernyataan menduduki jabatan SK Hukuman Disiplin SK Kenaikan Pangkat terakhir	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
36	TMT Jabatan Fungsional Umum	Terhitung mulai tanggal PNS menduduki jabatan fungsional umum	SK Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum Berita Acara Pelantikan jabatan Sumpah jabatan Surat Pernyataan menduduki jabatan SK Hukuman Disiplin	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
37	Golongan Ruang Awal	Pengelompokan ruang kerja awal menjadi CPNS	Data Kepegawaian Perorangan SK CPNS/PNS	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
38	Pangkat Golongan Terakhir	Tingkat jabatan PNS saat ini	Data Kepegawaian Perorangan Nota Persetujuan BKN mengenai penetapan NIP SK CPNS SK PNS	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
39	TMT Golongan	Terhitung mulai tanggal PNS dilantik di suatu golongan	SK Pengangkatan dalam jabatan Berita Acara Pelantikan jabatan Sumpah jabatan Surat Pernyataan menduduki jabatan SK Hukuman Disiplin	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
40	Gaji Pokok	Besaran gaji yang harus dibayarkan sesuai dengan tabel gaji PNS		Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
41	Mas Kerja Golongan	Lama bekerja PNS di suatu golongan	Data Kepegawaian Perorangan Nota persetujuan BKN	Perka BKN Nomor14 Tahun	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
			mengenai penetapan NIP SK CPNS SK PNS	2011	
42	Uraian Tugas	Penjabaran dari tugas dan fungsi tugas PNS	SK Jabatan	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
43	Pelatihan berjenjang struktural	Pelatihan tingkat Struktural PNS	Surat Tanda Lulus Diklat Struktural	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
44	Pelatihan Fungsional	Pelatihan yang berhubungan dengan jabatan fungsional PNS	Surat Tanda Lulus Diklat Fungsional	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
45	Angka kredit utama	Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan kegiatan yang menjadi tupoksi jabatan fungsional	Penetapan Angka Kredit SK Inpasng Pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
46	Angka kredit unsur penunjang	Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan diluar unsur utama jabatan fungsional	Penetapan Angka Kredit SK Inpasng Pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
47	Nomor SPMT	Nomor Surat Perintah Menjalankan Tugas	Surat Perintah Menjalankan Tugas	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
48	Tanggal SPMT	Tanggal Surat Perintah Menjalankan Tugas	Surat Perintah Menjalankan Tugas	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
49	KPPN	Kantor tempat gaji PNS dibayarkan	Nota persetujuan BKN menegai KP SK KP terakhir Surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala SK Pindah Wilayah Kerja SK Pindah Instansi SK Tugas Belajar SK CPNS Data Kepegawaian Perorangan	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
50	KTUA		Nota Persetujuan BKN menegai KP SK KP terakhir Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala SK Pindah Instansi	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
			SK Tugas Belajar SK CPNS Data Kepegawaian Perorangan		
51	TASPEN	Kantor tempat dana pensiun PNS dibayarkan	SK Pensiun PNS	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
	Data Lainnya				PNS YBS, PPK
52	Status Perkawinan	Status Pernikahan PNS	Penetapan Karis/Karsu Surat Laporan Perkawinan Surat Laporan Perceraian Daftar Keluarga Daftar Riwayat Hidup Nota Persetujuan BKN mengenai penetapan NIP Data Kepegawaian Perorangan Surat Laporan Kematian Suami/Istri	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
53	Tanggungan Istri / Suami	Daftar Istri/Suami PNS	Daftar Riwayat Hidup/Karpeg Daftar Keluarga Surat Laporan Perkawinan Sura Laporan Perceraian Surat Kematian	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
54	Pekerjaan Suami Istri	Pekerjaan Suami/Istri PNS	Daftar Riwayat Hidup/Karpeg Daftar Keluarga Surat Laporan Perkawinan Sura Laporan Perceraian Surat Kematian	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
55	Tanggungan Anak	Daftar Anak tanggungan PNS	Daftar Riwayat Hidup/Karpeg Daftar Keluarga Surat Laporan Perkawinan Sura Laporan Perceraian Surat Kematian	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
56	Tanda Penghargaan	Tanda penghargaan yang diberikan pada PNS sesuai dengan masa kerja	Daftar Riwayat Hidup Surat Tanda Penghargaan	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
57	Hukuman Disiplin	Hukuman yang dijatuahkan pada PNS karena melanggar	Surat Keputusan Hukuman Disiplin	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		peraturan disiplin PNS			
58	Kedudukan Sebagai Pejabat Negara	Status PNS yang dibebastugaskan dan dilantik sebagai pejabat negara	SK Pengangkatan Pejabat Negara SK Kenaikan Pangkat Terakhir sebagai Pejabat Negara SK Pembebasan dari jabatan organik	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
59	Keanggotaan Organisasi Profesi	Status keanggotaan PNS pada sebuah Organisasi	SK Pengangkatan dalam organisasi	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
60	Surat Keterangan Sehat	Surat yang menerangkan kesehatan PNS yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit	Surat Keterangan Sehat	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
61	Nomor Surat Keterangan Sehat	Nomor Surat yang menerangkan kesehatan PNS yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit	Surat Keterangan Sehat	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
62	Surat Keterangan Bebas Narkoba	Surat yang menerangkan bahwa PNS bebas dari Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit	Surat Bebas Narkoba	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
63	Tanggal Surat Keterangan Bebas Narkoba	Tanggal Surat yang menerangkan bahwa PNS bebas dari Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit	Surat Bebas Narkoba	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
64	SKCK	Surat Keterangan resmi tentang ada atau tidaknya catatan PNS yang berhubungan dengan kegiatan kriminal atau kejahatan yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
65	Tanggal SKCK	Tanggal Surat Keterangan resmi tentang ada atau	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Perka BKN Nomor14 Tahun	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		tidaknya catatan PNS yang berhubungan dengan kegiatan kriminal atau kejahatan yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI		2011	
66	Akte Kelahiran	Bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Akte Kelahiran	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
67	Status Hidup	Status Hidup PNS	Data Kepegawaian Seseorang Surat Kematian	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
68	Akte Meninggal	Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang membuktikan kematian seseorang	Akte Meninggal Surat Kematian	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
69	Tanggal Meninggal	Tanggal menginggal PNS	Akte Meninggal Surat Kematian	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
70	No. ASKES	Nomor Keanggotaan Asuransi Kesehatan	Kartu Askes	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
71	No. TASPEN	Nomor Keanggotaan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri	Kartu Taspen	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
72	No. PWP			Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
73	No. NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak PNS	Nomor Pokok Wajib Pajak PNS	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK
74	Tanggal NPWP	Tanggal Nomor Pokok Wajib Pajak PNS	Nomor Pokok Wajib Pajak PNS	Perka BKN Nomor14 Tahun	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
				2011	
75	Bahasa	Bahasa yang dapat digunakan oleh PNS	Data Kepegawaian seseorang	Perka BKN Nomor14 Tahun 2011	PNS YBS, PPK

4. Metadata Perencanaan ASN dijelaskan pada tabel 5 berikut ini:

Table 5. Metadata Perencanaan ASN

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	SOTK/ANJAB/ABK				
	Struktur Organisasi dan Tata Kerja	Bagian susunan organisasi dan pembagian kerja pada Instansi	SOTK Instansi	Perpres 47/2009 jo. Perpres 91/2011 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara	PPK
	Analisis Jabatan	Pengumpulan dan analisa tugas yang berhubungan dengan suatu jabatan	Dokumen Analisis Jabatan	PermenpanRB 1/2020 Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	PPK
	Analisis Beban Kerja	Penetapan jumlah jam kerja untuk merampungkan suatu pekerjaan	Dokumen Analisis Beban Kerja	PermenpanRB 1/2020 Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	PPK
	Peta Jabatan	Gambaran susunan jabatan berdasarkan SOTK, tugas dan tanggung jawab jabatan	Dokumen Peta Jabatan	Perpres 47/2009 jo. Perpres 91/2011 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara	PPK
2	Standar Kompetensi				
	Standar Kompetensi	Standar pengetahuan, keterampilan dan perilaku ASN	Dokumen Peta Jabatan	PermenpanRB 38/2017 Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Perka BKN 7/2013 Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi	PPK
	Standar Kompetensi	Penetapan standar pengetahuan,	Dokumen Peta	PermenpanRB 38/2017 Standar	PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	Jabatan	keterampilan dan perilaku ASN dalam melaksanakan tugas jabatan	Jabatan	Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Perka BKN Nomor 7/2013 Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi	
3	Penetapan Kebutuhan ASN Nasional/ Instansi				
	Bezetting Nasional	Persediaan pegawai di tingkat Nasional	Dokumen Bezeeting Nasional	PP 11/2017 jo. PP 17/2020	PPK
	Bezeeting Instansi	Persediaan pegawai di setiap instansi	Dokumen Bezeeting Instansi	Perpres 47/2009 jo. Perpres 91/2011 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara	PPK
	Kelas Jabatan	Tingkat kedudukan ASN di Instansi	Peraturan Kelas Jabatan	PermenpanRB 39/2013 Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah	PPK
	Evaluasi Jabatan	Penentuan nilai/bobot jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan	Dokumen Evaluasi Jabatan	Perka BKN 21/2011 Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS PermenpanRB 34/2011 Pedoman Evaluasi Jabatan	PPK
	Hasil Evaluasi Jabatan	Hasil dari Penentuan nilai/bobot jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan	Dokumen Hasil Evaluasi Jabatan	Perka BKN 21/2011 Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS PermenpanRB 34/2011 Pedoman Evaluasi Jabatan	PPK
4	Data Referensi				
	Referensi	Rujukan Jabatan	Peraturan		

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	Jabatan Fungsional	Fungsional	Jabatan Fungsional		
	Referensi Pendidikan	Rujukan Pendidikan	Peraturan Rumpun Pendidikan		
	Referensi Jabatan Pelaksana	Rujukan Jabatan Fungsional Umum	Peraturan Jabatan Pelaksana		

5. Metadata Data Seleksi ASN dijelaskan pada tabel 6 berikut ini:

Table 6. Metadata Data Seleksi ASN

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Data Formasi				
	Nama Jabatan	Nama dari sebuah jabatan struktural, fungsional dan fungsional umum	Permanpan-RB untuk setiap K/L/D	PermanpanRB 23/2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019	Pelamar PPK
	Jumlah Formasi	Jumlah PNS yang diperlukan dalam suatu formasi	Permanpan-RB untuk setiap K/L/D	PermanpanRB 23/2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019	Pelamar PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	Lokasi Penempatan	Tempat dipekerjakannya PNS	Permanpan-RB untuk setiap K/L/D	PermanpanRB 23/2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019	Pelamar PPK
	Jenis Formasi	Jenis dari formasi yang diperlukan	Permanpan-RB untuk setiap K/L/D	PermanpanRB 23/2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019	Pelamar PPK
2	Data Hasil Seleksi				
	Hasil Seleksi Administrasi	Hasil penilaian berkas administrasi calon ASN	Laporan Hasil Seleksi Administrasi	Permanpan-RB 23/2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019	Pelamar PPK
	Hasil seleksi SKD	Hasil penilaian Seleksi Kompetensi Dasar calon ASN	Laporan Hasil Seleksi SKD	PermanpanRB 23/2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019	Pelamar PPK
	Hasil Seleksi SKB	Hasil penilaian seleksi Kompetensi Bidang calon ASN	Laporan Hasil Seleksi SKB	PermanpanRB 23/2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019	Pelamar PPK
	Data Kelulusan	Listing nama CPNS yang lolos	Penetapan Kelulusan	PermanpanRB 23/2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019	Pelamar PPK
	Formasi Kosong	Formasi yang	Laporan	PermanpanRB	PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		tidak terisi pada seleksi ASN	Formasi Kosong	23/2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019	
3	Data Pelamar				
	Data Riwayat Hidup	Dokumen berisi informasi diri, pendidikan, keluarga, ataupun pengalaman bekerja calon ASN	Data Riwayat Hidup	PerBKN 14/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS	CPNS PPK
	Data Pendidikan Pelamar	Tingkat dan Jenis Pendidikan yang dilamar calon ASN	Ijazah	PerBKN 14/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS	CPNS PPK
4	Data Referensi				
	Referensi Pendidikan	Rujukan Pendidikan pada proses seleksi ASN	Peraturan Rumpun Pendidikan		PPK
	Referensi Kependudukan	Rujukan kependudukan pada proses seleksi ASN	Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga		PPK
	Referensi Jabatan Pelaksana	Rujukan Jabatan Fungsional umum pada proses seleksi ASN	Peraturan Jabatan Pelaksana		PPK
	Referensi Jabatan Fungsional	Rujukan Jabatan Fungsional pada proses seleksi ASN	Peraturan Jabatan Fungsional		PPK

6. Metadata Data Pengadaan ASN dijelaskan pada tabel 7 berikut ini:

Table 7. Metadata Data Pengadaan ASN

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Data CASN				
	Daftar Riwayat Hidup	Dokumen berisi informasi diri, pendidikan, keluarga, ataupun	Dokumen Daftar Riwayat Hidup	PerBKN 14/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS	Pelamar PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		pengalaman bekerja calon ASN			
2	Usul Penetapan NIP				
	Rencana Penempatan	Rencana lokasi penempatan calon ASN	Penetapan Formasi KEMENPAN-RB	PermenpanRB 23/2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019	PPK
	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Surat Keterangan resmi tentang ada atau tidaknya catatan PNS yang berhubungan dengan kegiatan kriminal atau kejahatan yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	PerBKN 14/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS	Pelamar PPK
	Surat Kesehatan	Surat yang menerangkan kesehatan PNS yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit	Surat Keterangan Sehat	PerBKN 14/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS	Pelamar PPK
	Surat Bebas Narkoba	Surat yang menerangkan bahwa PNS bebas dari Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit	Surat Bebas Narkoba	PerBKN 14/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS	Pelamar PPK
3	Usul Pembatalan NIP				
	Pembatalan NIP PNS	Proses pembatalan calon ASN dalam mendapatkan Nomor Induk Pegawai	Dokumen usul Pembatalan NIP	PerBKN 14/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS	PPK
	Pembatalan NI PPPK	Proses pembatalan calon ASN dalam mendapatkan Nomor Induk PPPK	Dokumen usul Pembatalan NI PPPK	PerBKN 1/2019 jo. PerBKN 18/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK	PPK
	Pembatalan NIP Sekodin	Proses pembatalan calon ASN dalam	Dokumen usul pembatalan	PermenpanRB 48/2020 tentang	PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		mendapatkan Nomor Induk Pegawai Sekolah Kedinasan	NIP Sekodin	Penerimaan Mahasiswa dan/atau Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/ Lembaga Tahun 2020	
4	Usul penetapan NI PPPK				
	Rencana Perjanjian Kerja	Kontrak Kerja calon ASN	SK Kontrak Kerja	PerBKN 1/2019 jo. PerBKN 18/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK	PPK
	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Surat Keterangan resmi tentang ada atau tidaknya catatan PNS yang berhubungan dengan kegiatan kriminal atau kejahatan yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	PerBKN 1/2019 jo. PerBKN 18/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK	Pelamar PPK
	Surat Kesehatan	Surat yang menerangkan kesehatan PNS yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit	Surat Keterangan Sehat	PerBKN 1/2019 jo. PerBKN 18/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK	Pelamar PPK
	Surat Bebas Narkoba	Surat yang menerangkan bahwa PNS bebas dari Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit	Surat Bebas Narkoba	PerBKN 1/2019 jo. PerBKN 18/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK	Pelamar PPK
5	Usul penetapan NIP Sekodin				
	Rencana Penempatan	Rencana calon ASN ditempatkan	Surat Rencana Penempatan	PermenpanRB 48/2020 tentang Penerimaan Mahasiswa dan/atau Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/ Lembaga Tahun	PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
				2020	
	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Surat Keterangan resmi tentang ada atau tidaknya catatan PNS yang berhubungan dengan kegiatan kriminal atau kejahatan yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	PermenpanRB 48/2020 tentang Penerimaan Mahasiswa dan/atau Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/ Lembaga Tahun 2020	Pelamar PPK
	Surat Kesehatan	Surat yang menerangkan kesehatan PNS yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit	Surat Keterangan Sehat	PermenpanRB 48/2020 tentang Penerimaan Mahasiswa dan/atau Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/ Lembaga Tahun 2020	Pelamar PPK
	Surat Bebas Narkoba	Surat yang menerangkan bahwa PNS bebas dari Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit	Surat Bebas Narkoba	PermenpanRB 48/2020 tentang Penerimaan Mahasiswa dan/atau Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/ Lembaga Tahun 2020	Pelamar PPK
6	Data Referensi				
	Referensi Jabatan Fungsional	Rujukan jabatan fungsional pada proses pengadaan ASN	Peraturan Jabatan Fungsional		PPK
	Referensi Jabatan Pelaksana	Rujukan jabatan fungsional umum pada proses pengadaan ASN	Peraturan Jabatan Pelaksana		PPK
	Referensi Pendidikan	Rujukan pendidikan pada proses pengadaan ASN	Peraturan Rumpun Jabatan		PPK
	Referensi Golongan Ruang	Rujukan golongan ruang pada proses pengadaan ASN			PPK
	Referensi Gaji	Rujukan gaji pada proses pengadaan ASN	Peraturan Daftar Gaji PNS		PPK

7. Metadata Data Mutasi ASN dijelaskan pada tabel 8 berikut ini:

Table 8. Metadata Data Mutasi ASN

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Data ASN				
	Data Riwayat Hidup	Dokumen berisi informasi diri, pendidikan, keluarga, ataupun pengalaman bekerja PNS	Data Profil	Perka BKN 14/2011	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat Golongan	Data berisi riwayat golongan selama bekerja	SK Kenaikan Pangkat	Perka BKN 14/2011	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat Pendidikan	Data berisi riwayat pendidikan ASN	Ijazah	Perka BKN 14/2011	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat Jabatan	Data berisi riwayat jabatan ASN	SK Jabatan	Perka BKN 14/2011	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat CPNS/PNS	Data status CPNS/PNS	SK CPNS/PNS	Perka BKN 14/2011	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat SKP	Data riwayat Sasaran Kinerja Pegawai	SKP	Perka BKN 14/2011	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat PAK	Data riwayat DUPAK ASN	PAK	Perka BKN 14/2011	PNS YBS, PPK
2	<u>KP IV/B Ke Bawah</u>			Perka BKN 25/2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis KP Reguler PNS untuk menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah	PNS YBS, PPK
3	Usul KP Reguler				
	Surat Tugas Belajar	Surat keterangan melakukan Tugas belajar	Surat Keterangan Tugas Belajar	Perka BKN 25/2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis KP Reguler PNS untuk menjadi	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
				Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah	
4	Usul KP Struktural				
	Hasil Ujian Dinas	Hasil ujian melakukan Ujian Dinas	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Nota persetujuan BKN mengenai KP	Perka BKN 25/2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis KP Reguler PNS untuk menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah	PNS YBS, PPK
5	Usul KP Struktural				
	Hasil Ujian Dinas	Hasil ujian melakukan Ujian Dinas	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Nota persetujuan BKN mengenai KP	Perka BKN 25/2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis KP Reguler PNS untuk menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah	PNS YBS, PPK
6	Usul KP JFT				
	Hasil Ujian Dinas	Hasil ujian melakukan Ujian Dinas	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Nota persetujuan BKN mengenai KP	Perka BKN 25/2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis KP Reguler PNS untuk menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
				bawah	
7	Usul KP PI/PP			PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	
8	Usul KP TB			PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	
	Pengangkatan/ pemberhentian/ pemindahan/ pemberhentian Jabatan	Pengangkatan/ pemberhentian/ pemindahan/ pemberhentian Jabatan	Dokumen usul Pengangkatan/ pemberhentian/ pemindahan/ pemberhentian Jabatan	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
9	Usul KP Setelah TB		Dokumen usul KP	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	
10	Usul KP Penemuan Baru			PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
	Keppres Penemuan baru	Keputusan Presiden tentang Penemuan Baru	Keputusan Presiden	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	
11	Usul KP Hakim/Panitera		Dokumen usul KP	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	
12	<u>KP IV/c Keatas Non Jenjang Utama</u>		Dokumen usul KP	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	
13	Usul KP Struktural			PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	
	Hasil Ujian Dinas	Hasil ujian melakukan Ujian Dinas	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Nota persetujuan BKN mengenai KP	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
14	Usul KP Struktural			PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	
	Hasil Ujian Dinas	Hasil ujian melakukan Ujian Dinas	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Nota persetujuan	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
			BKN mengenai KP		
15	Usul KP JFT			PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	
	Hasil Ujian Dinas	Hasil ujian melakukan Ujian Dinas	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Nota persetujuan BKN mengenai KP	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
16	Usul KP PI/PP		Dokumen usul KP	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
17	Usul KP TB			PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	
	Pengangkatan/ pemberhentian/ pemindahan/ pemberhentian Jabatan	Pengangkatan/ pemberhentian/ pemindahan/ pemberhentian Jabatan	Dokumen usul Pengangkatan/ pemberhentian/ pemindahan/ pemberhentian Jabatan	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
18	Usul KP Setelah TB		Dokumen usul KP	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
19	Usul KP Penemuan Baru			PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
	Keppres Penemuan baru	Keputusan Presiden tentang Penemuan Baru	Keputusan Presiden	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
20	Usul KP Hakim/Panitera		Dokumen usul KP	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
21	<u>KP IV/C Ketas Jenjang Utama</u>			PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
22	Usul KP Struktural			PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
	Penunjukan PLT	Surat keterangan penunjukan pelaksana tugas	SK PLT	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
23	Usul KP JFT			PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
	Penunjukan PLT	Surat keterangan penunjukan pelaksana tugas	SK PLT	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
24	Usul KP PI/PP		Dokumen usul KP	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
25	Usul KP LB			PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
	Bukti Prestasi	Bukti Prestasi yang menunjukkan prestasi luar biasa	SK Prestasi Luar Biasa	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
26	Usul KP TB			PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
	Pengangkatan/ pemberhentian/ pemindahan/ pemberhentian Jabatan	Pengangkatan/ pemberhentian/ pemindahan/ pemberhentian Jabatan	Dokumen usul Pengangkatan/ pemberhentian/ pemindahan/ pemberhentian Jabatan	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
27	Usul KP Setelah TB		Dokumen usul KP	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
28	Usul KP Penemuan Baru			PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
	Keppres Penemuan baru	Keputusan Presiden tentang Penemuan Baru	Keputusan Presiden	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
29	Usul KP Hakim/Panitera		Dokumen usul KP	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
30	<u>Kenaikan Jabatan Jenjang Utama</u>		Dokumen usul KP	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
31	Kenaikan Jabatan			PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	Sertifikat Uji Kompetensi	Sertifikat yang diberikan setelah mengikuti Uji Kompetensi	Sertifikat Kompetensi	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
	Formasi	Formasi yang dibutuhkan di jabatan baru	Penetapan Formasi	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
	Penunjukan PLT	Surat keterangan penunjukan pelaksana tugas	SK PLT	PP Nomor 11/2017 jo. PP Nomor 17/2020	PNS YBS, PPK
32	Pemberhentian				PNS YBS, PPK
	Sertifikat Uji Kompetensi	Sertifikat yang diberikan setelah mengikuti Uji Kompetensi	Sertifikat Uji Kompetensi		PNS YBS, PPK
	Formasi	Formasi yang dibutuhkan di jabatan baru	Penetapan Formasi		PNS YBS, PPK
	Penunjukan PLT	Surat keterangan penunjukan pelaksana tugas	SK PLT		PNS YBS, PPK
33	Perpindahan				PNS YBS, PPK
	Penunjukan PLT	Surat keterangan penunjukan pelaksana tugas	SK PLT		PNS YBS, PPK
	Pengalaman	Pengalaman bekerja ASN	Surat Keterangan Pengalaman Kerja/Riwayat Jabatan		PNS YBS, PPK
	Pernyataan menduduki jabatan	Surat pernyataan menduduki jabatan saat ini	SPMT		PNS YBS, PPK
34	Pindah Instansi		Dokumen Usul pindah instansi	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
35	Dari Instansi Pembina			PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Pengantar instansi asal	Surat pengantar pengajuan pindah instansi	Surat Pengantar Instansi asal	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		dari instansi asal		Pelaksanaan Mutasi	
	Usul mutasi instansi penerima	Surat usulan permintaan pindah instansi dari instansi penerima	Surat Usulan Instansi Penerima	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Persetujuan mutasi instansi asal	Surat persetujuan pindah insatansi dari instansi asal	Surat Persetujuan Instansi Asal	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Pernyataan bebas hukuman disiplin	Surat pernyataan bebas hukuman disiplin	Surat bebas hukuman disiplin	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Bebas temuan inspektorat	Surat Pernyataan bebas temuan inspektorat	Surat bebas temuan inspektorat	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
36	Antar Instansi Pusat			PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Pengantar instansi asal	Surat pengantar pengajuan pindah instansi dari instansi asal	Surat Pengantar Instansi asal	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Usul mutasi instansi penerima	Surat usulan permintaan pindah instansi dari instansi penerima	Surat Usulan Instansi Penerima	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Persetujuan mutasi instansi asal	Surat persetujuan pindah insatansi dari instansi asal	Surat Persetujuan Instansi Asal	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Pernyataan bebas hukuman disiplin	Surat pernyataan bebas hukuman disiplin	Surat bebas hukuman disiplin	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
				Mutasi	
	Bebas temuan inspektorat	Surat Pernyataan bebas temuan inspektorat	Surat bebas temuan inspektorat	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Pernyataan tidak TB/IB/Ikatan Dinas	Surat pernyataan tidak dalam proses tugas belajar/izin belajar/ikatan dinas	Surat bebas TB/IB/Ikatan Dinas	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Permohonan Mutasi Pegawai	Surat permohonan pengajuan pindah instansi pegawai	Surat permohonan Pindah Instansi	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
37	Antar Instansi Daerah 1 Provinsi			PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Pengantar instansi asal	Surat pengantar pengajuan pindah instansi dari instansi asal	Surat Pengantar Instansi asal	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Usul mutasi instansi penerima	Surat usulan permintaan pindah instansi dari instansi penerima	Surat Usulan Instansi Penerima	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Persetujuan mutasi instansi asal	Surat persetujuan pindah instansi dari instansi asal	Surat Persetujuan Instansi Asal	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Pernyataan bebas hukuman disiplin	Surat pernyataan bebas hukuman disiplin	Surat bebas hukuman disiplin	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Bebas temuan inspektorat	Surat Pernyataan bebas temuan inspektorat	Surat bebas temuan inspektorat	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
				Mutasi	
	Pernyataan tidak TB/IB/Ikatan Dinas	Surat pernyataan tidak dalam proses tugas belajar/izin belajar/ikatan dinas	Surat bebas TB/IB/Ikatan Dinas	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Permohonan Mutasi Pegawai	Surat permohonan pengajuan pindah instansi pegawai	Surat permohonan Pindah Instansi	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
38	Antar Instansi Daerah Antar Provinsi			PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Pengantar instansi asal	Surat pengantar pengajuan pindah instansi dari instansi asal	Surat Pengantar Instansi asal	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Usul mutasi instansi penerima	Surat usulan permintaan pindah instansi dari instansi penerima	Surat Usulan Instansi Penerima	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Persetujuan mutasi instansi asal	Surat persetujuan pindah insatansi dari instansi asal	Surat Persetujuan Instansi Asal	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Pernyataan bebas hukuman disiplin	Surat pernyataan bebas hukuman disiplin	Surat bebas hukuman disiplin	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Bebas temuan inspektorat	Surat Pernyataan bebas temuan inspektorat	Surat bebas temuan inspektorat	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Pernyataan tidak TB/IB/Ikatan Dinas	Surat pernyataan tidak dalam proses tugas belajar/izin	Surat bebas TB/IB/Ikatan Dinas	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		belajar/ikatan dinas		Mutasi	
	Permohonan Mutasi Pegawai	Surat permohonan pengajuan pindah instansi pegawai	Surat permohonan Pindah Instansi	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
39	Instansi Pusat ke Daerah			PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Pengantar instansi asal	Surat pengantar pengajuan pindah instansi dari instansi asal	Surat Pengantar Instansi asal	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Usul mutasi instansi penerima	Surat usulan permintaan pindah instansi dari instansi penerima	Surat Usulan Instansi Penerima	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Persetujuan mutasi instansi asal	Surat persetujuan pindah insatansi dari instansi asal	Surat Persetujuan Instansi Asal	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Pernyataan bebas hukuman disiplin	Surat pernyataan bebas hukuman disiplin	Surat bebas hukuman disiplin	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Bebas temuan inspektorat	Surat Pernyataan bebas temuan inspektorat	Surat bebas temuan inspektorat	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Pernyataan tidak TB/IB/Ikatan Dinas	Surat pernyataan tidak dalam proses tugas belajar/izin belajar/ikatan dinas	Surat bebas TB/IB/Ikatan Dinas	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Permohonan Mutasi Pegawai	Surat permohonan pengajuan pindah instansi	Surat permohonan Pindah Instansi	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		pegawai		Pelaksanaan Mutasi	
40	Instansi Daerah ke Pusat			PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Pengantar instansi asal	Surat pengantar pengajuan pindah instansi dari instansi asal	Surat Pengantar Instansi asal	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Usul mutasi instansi penerima	Surat usulan permintaan pindah instansi dari instansi penerima	Surat Usulan Instansi Penerima	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Persetujuan mutasi instansi asal	Surat persetujuan pindah insatansi dari instansi asal	Surat Persetujuan Instansi Asal	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Pernyataan bebas hukuman disiplin	Surat pernyataan bebas hukuman disiplin	Surat bebas hukuman disiplin	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Bebas temuan inspektorat	Surat Pernyataan bebas temuan inspektorat	Surat bebas temuan inspektorat	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Pernyataan tidak TB/IB/Ikatan Dinas	Surat pernyataan tidak dalam proses tugas belajar/izin belajar/ikatan dinas	Surat bebas TB/IB/Ikatan Dinas	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
	Permohonan Mutasi Pegawai	Surat permohonan pengajuan pindah instansi pegawai	Surat permohonan Pindah Instansi	PerBKN 5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	PNS YBS, PPK
41	Pengalihan PNS				PNS YBS, PPK
	Usul Pengalihan	Surat usulan	Surat		PNS

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		pengalihan PNS	Pengalihan		YBS, PPK
42	Data Referensi				PNS YBS, PPK
	Referensi Jabatan	Rujukan Jabatan dalam proses mutasi ASN	Peraturan Jabatan		PNS YBS, PPK

8. Metadata Data Pemberhentian ASN dijelaskan pada tabel 9 berikut ini:

Table 9. Metadata Data Pemberhentian ASN

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Data ASN				
	Data Riwayat Hidup	Dokumen berisi informasi diri, pendidikan, keluarga, ataupun pengalaman bekerja PNS	Data Profil ASN	Perka BKN 14/2011	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat Golongan	Data berisi riwayat golongan selama bekerja	SK Kenaikan Pangkat	Perka BKN 14/2011	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat Pendidikan	Data berisi riwayat pendidikan ASN	Ijazah	Perka BKN 14/2011	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat Jabatan	Data berisi riwayat jabatan ASN	SK Pengangkatan Jabatan	Perka BKN 14/2011	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat CPNS/PNS	Data status CPNS/PNS	SK CPNS/PNS	Perka BKN 14/2011	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat SKP	Data riwayat Sasaran Kinerja Pegawai	SKP	Perka BKN 14/2011	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat PAK	Data riwayat DUPAK ASN	PAK	Perka BKN 14/2011	PNS YBS, PPK
2	<u>Usul Instansi</u> <u>Pusat IV/B</u> <u>Kebawah</u>		Dokumen Usul Pemberhentian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
3	APS			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		seseorang	Pemberhentian		
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Permohonan APS	Surat Pengantar Permohonan Pemberhentian APS dari PNS	Surat Permohonan APS	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Usul APS Instansi	Surat Pengantar Permohonan Pemberhentian APS dari Instansi	Surat Usulan PAS	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
4	BUP Non KPP/KPP			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
5	Perampingan Organisasi			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		seseorang	Pemberhentian		
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
6	Tidak Cakap Jasmani/ Rohani			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Kesehatan	Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit	Surat Sehat	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	SK Cacat	Surat Keputusan Cacat yang dikeluarkan oleh Direktorat Mutasi	SK Cacat	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
7	Meninggal Dunia Non KPP/KPP			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat	Surat keterangan	Surat	PerBKN 3/2020	PNS

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	tidak dalam proses ataupun dipidana	Pernyataan tidak dipidana	tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Kematian	Surat keterangan kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit	Surat Kematian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Keterangan Janda/ Duda	Surat Keterangan sebagai Janda/Duda		PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
8	Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
9	Tewas			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	/pernah dipidana				
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Kematian	Surat keterangan kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit	Surat Kematian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Keterangan Janda/ Duda	Surat Keterangan sebagai Janda/Duda	Surat keterangan	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
10	Hilang			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Keterangan Hilang	Surat Keterangan dinyatakan hilang dari Kepolisian RI	Surat Keterangan Hilang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
11	<u>Usul Instansi Daerah IV/B Kebawah</u>			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
12	APS			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		seseorang	Pemberhentian		
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Permohonan APS	Surat Pengantar Permohonan Pemberhentian APS dari PNS	Surat Permohonan APS	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Usul APS Instansi	Surat Pengantar Permohonan Pemberhentian APS dari Instansi	Surat Usulan PAS	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
13	BUP Non KPP/KPP			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
14	Perampungan Organisasi			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat	Surat keterangan	Surat	PerBKN 3/2020	PNS

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	tidak dalam proses ataupun dipidana	Pernyataan tidak dipidana	tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
15	Tidak Cakap Jasmani/ Rohani			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Kesehatan	Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit	Surat Sehat	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	SK Cacat	Surat Keputusan Cacat yang dikeluarkan oleh Direktorat Mutasi	SK Cacat	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
16	Meninggal Dunia Non KPP/KPP			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	dalam proses /pernah dipidana	dipidana		Pemberhentian	
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Kematian	Surat keterangan kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit	Surat Kematian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Keterangan Janda/ Duda	Surat Keterangan sebagai Janda/Duda	Surat Keterangan	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
17	Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
18	Tewas			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	/pernah dipidana				
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Kematian	Surat keterangan kematian dari Puskesmas/ Rumah Sakit	Surat Kematian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Keterangan Janda/ Duda	Surat Keterangan sebagai Janda/Duda	Surat Keterangan	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
19	Hilang			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Keterangan Hilang	Surat Keterangan dinyatakan hilang dari Kepolisian RI	Surat Keterangan Hilang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
20	<u>Usul Instansi</u> <u>Pusat IV/C</u> <u>Keatas</u>			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
21	APS			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		seseorang	Pemberhentian		
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Permohonan APS	Surat Pengantar Permohonan Pemberhentian APS dari PNS	Surat Permohonan APS	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Usul APS Instansi	Surat Pengantar Permohonan Pemberhentian APS dari Instansi	Surat Usulan PAS	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
22	BUP Non KPP/KPP			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
23	Perampingan Organisasi			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan	Surat keterangan tidak dalam	Surat Pernyataan	PerBKN 3/2020 tentang	PNS YBS,

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	proses ataupun dipidana	tidak dipidana	Petunjuk Teknis Pemberhentian	PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
24	Tidak Cakap Jasmani/ Rohani			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Kesehatan	Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit	Surat Sehat	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	SK Cacat	Surat Keputusan Cacat yang dikeluarkan oleh Direktorat Mutasi	SK Cacat	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
25	Meninggal Dunia Non KPP/KPP			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	/pernah dipidana				
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Kematian	Surat keterangan kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit	Surat Kematian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Keterangan Janda/ Duda	Surat Keterangan sebagai Janda/Duda	Surat Keterangan	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
26	Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
27	Tewas			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat	Surat keterangan	Surat	PerBKN 3/2020	PNS

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	YBS, PPK
	Surat Kematian	Surat keterangan kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit	Surat Kematian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Keterangan Janda/ Duda	Surat Keterangan sebagai Janda/Duda	Surat Keterangan	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
28	Hilang			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Keterangan Hilang	Surat Keterangan dinyatakan hilang dari Kepolisian RI	Surat Keterangan Hilang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
29	<u>Usul Instansi Daerah IV/C Keatas</u>		Dokumen Usul Pemberhentian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
30	APS			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan	Surat keterangan tidak dalam	Surat Pernyataan	PerBKN 3/2020 tentang	PNS YBS,

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	proses ataupun dipidana	tidak dipidana	Petunjuk Teknis Pemberhentian	PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Permohonan APS	Surat Pengantar Permohonan Pemberhentian APS dari PNS	Surat Permohonan APS	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Usul APS Instansi	Surat Pengantar Permohonan Pemberhentian APS dari Instansi	Surat Usulan PAS	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
31	BUP Non KPP/KPP			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
32	Perampingan Organisasi			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	/pernah dipidana				
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
33	Tidak Cakap Jasmani/ Rohani			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Kesehatan	Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit	Surat Sehat	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	SK Cacat	Surat Keputusan Cacat yang dikeluarkan oleh Direktorat Mutasi	SK Cacat	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
34	Meninggal Dunia Non KPP/KPP			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	dalam proses /pernah dipidana	dipidana		Pemberhentian	
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Kematian	Surat keterangan kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit	Surat Kematian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Keterangan Janda/ Duda	Surat Keterangan sebagai Janda/Duda	Surat Keterangan	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
35	Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
36	Tewas			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Kematian	Surat keterangan kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit	Surat Kematian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Keterangan Janda/ Duda	Surat Keterangan sebagai Janda/Duda	Surat Keterangan	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
37	Hilang			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Keterangan Hilang	Surat Keterangan dinyatakan hilang dari Kepolisian RI	Surat Keterangan	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
38	<u>Usul Instansi Pusat IV/C</u> <u>Keatas Khusus</u> <u>JPT Madya &</u> <u>JF Utama</u>		Dokumen Usul Pemberhentian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
39	APS			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		seseorang	Pemberhentian		
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/ berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Permohonan APS	Surat Pengantar Permohonan Pemberhentian APS dari PNS	Surat Permohonan APS	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Usul APS Instansi	Surat Pengantar Permohonan Pemberhentian APS dari Instansi	Surat Usulan PAS	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
40	BUP Non KPP/KPP			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/ berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
41	Perampungan Organisasi			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
42	Tidak Cakap Jasmani/ Rohani			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Kesehatan	Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit	Surat Sehat	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	SK Cacat	Surat Keputusan Cacat yang dikeluarkan oleh Direktorat Mutasi	SK Cacat	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
43	Meninggal Dunia Non KPP/KPP			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan	Surat keterangan tidak dalam	Surat Pernyataan	PerBKN 3/2020 tentang	PNS YBS,

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	proses ataupun dipidana	tidak dipidana	Petunjuk Teknis Pemberhentian	PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Kematian	Surat keterangan kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit	Surat Kematian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Keterangan Janda/ Duda	Surat Keterangan sebagai Janda/Duda	Surat Keterangan	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
44	Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
45	Tewas			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	dipidana				
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Kematian	Surat keterangan kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit	Surat Kematian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Keterangan Janda/ Duda	Surat Keterangan sebagai Janda/Duda	Surat Keterangan	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
46	Hilang			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Keterangan Hilang	Surat Keterangan dinyatakan hilang dari Kepolisian RI	Surat Keterangan Hilang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
47	<u>Usul Instansi Daerah IV/C Keatas Khusus JPT Madya & JF Utama</u>		Dokumen Usul Pemberhentian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
48	APS			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		seseorang	Pemberhentian		
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Permohonan APS	Surat Pengantar Permohonan Pemberhentian APS dari PNS	Surat Permohonan APS	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Usul APS Instansi	Surat Pengantar Permohonan Pemberhentian APS dari Instansi	Surat Usulan PAS	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
49	BUP Non KPP/KPP			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
50	Perampingan Organisasi			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan	Surat keterangan tidak dalam	Surat Pernyataan	PerBKN 3/2020 tentang	PNS YBS,

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	proses ataupun dipidana	tidak dipidana	Petunjuk Teknis Pemberhentian	PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
51	Tidak Cakap Jasmani/ Rohani			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Kesehatan	Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit	Surat Sehat	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	SK Cacat	Surat Keputusan Cacat yang dikeluarkan oleh Direktorat Mutasi	SK Cacat	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
52	Meninggal Dunia Non KPP/KPP			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	/pernah dipidana				
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Kematian	Surat keterangan kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit	Surat Kematian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Keterangan Janda/ Duda	Surat Keterangan sebagai Janda/Duda	Surat Keterangan	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
53	Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
54	Tewas			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Kematian	Surat keterangan kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit	Surat Kematian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Keterangan Janda/ Duda	Surat Keterangan sebagai Janda/Duda	Surat Keterangan	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
55	Hilang			PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	DPCP	Data perorangan calon penerima pensiun PNS	DPCP Data kepegawaian seseorang	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses /pernah dipidana	Surat keterangan tidak dalam proses ataupun dipidana	Surat Pernyataan tidak dipidana	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/berat	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HD sedang/ berat Riwayat Hukuman Disiplin	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
	Surat Keterangan Hilang	Surat Keterangan dinyatakan hilang dari Kepolisian RI	Surat Keterangan	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
56	<u>Usul Tanpa Hak Pensiun</u>		Dokumen Usul Pemberhentian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK
57	<u>Usul Pemberhentian PPPK</u>		Dokumen Usul Pemberhentian	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian	PNS YBS, PPK

9. Metadata Data Status & Kedudukan ASN dijelaskan pada tabel 10 berikut ini:

Table 10. Metadata Data Status & Kedudukan ASN

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Data ASN				
	Data Riwayat Hidup	Dokumen berisi informasi diri, pendidikan, keluarga, ataupun pengalaman bekerja PNS	Data Profil ASN	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat Golongan	Data berisi riwayat golongan selama bekerja	SK Kenaikan Pangkat	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat Pendidikan	Data berisi riwayat pendidikan ASN	Ijazah	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat Jabatan	Data berisi riwayat jabatan ASN	SK Pengangkatan Jabatan	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat CPNS/PNS	Data status CPNS/PNS	SK CPNS/PNS	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat SKP	Data riwayat Sasaran Kinerja Pegawai	SKP	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
2	<u>Usul Penetapan Tewas</u>				
	Penetapan Pertek Tewas	Penetapan Pertimbangan Teknis Usulan PNS Tewas	Pertimbangan Teknis	PerBKN 4/2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi	PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
				Pegawai ASN	
	Penetapan Pertek Uang Duka Tewas	Penetapan Pertimbangan TekniS Uang Duka PNS Tewas	Pertimbangan Teknis	PerBKN 4/2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai ASN	PPK
3	<u>Usul penetapan Cacat Karena Dinas</u>		Dokumen Usul Pemberhentian	PerBKN 4/2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai ASN	PPK
4	Penetapan Pertek Cacat Karena Dinas		Pertimbangan teknis	PerBKN 4/2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai ASN	PPK
5	Penetapan Persetujuan Tunjangan Cacat Karena Dinas		Pertimbangan teknis	PerBKN 4/2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria	PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
				Penetapan Tewas bagi Pegawai ASN	
6	<u>Usul Perubahan NIP</u>		Dokumen Usul Pemberhentian	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PPK
7	Perubahan Tanggal Lahir			Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PPK
	Surat Pengantar	Surat Pengantar Perubahan Tanggal Lahir	Surat pengantar PPK	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PPK
8	Perubahan TMT CPNS			Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PPK
	Surat Pengantar	Surat Pengantar Perubahan TMT CPNS	Surat pengantar PPK	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PPK
9	Penetapan Status PNS EKSES Politik		Pertimbangan teknis	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PPK
10	Penetapan Status PNS Anggota Parpol		Pertimbangan teknis	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PPK
11	Usul CLTN			Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS,
	Persetujuan CLTN	Persetujuan pengajuan Cuti Di Luar Tanggungan	Pertimbangan teknis	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman	PNS YBS,

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		Negara		Pengembangan Database PNS	
	Persetujuan Perpanjangan CLTN	Persetujuan pengajuan perpanjangan Cuti Di Luar Tanggungan Negara	Pertimbangan teknis	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS,
	Persetujuan Mempekerjakan Kembali	Persetujuan pengajuan pengaktifan kembali setelah selesai Cuti Di Luar Tanggungan Negara	Pertimbangan teknis	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS,
12	Usul perubahan Nama		Dokumen Usul Perubahan nama	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS,
13	Penetapan Tidak Ikut PUPNS 2015			Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	
	Surat Keterangan Aktif	Surat Keterangan Aktif sebagai ASN	Surat Keterangan Aktif	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS,
	Surat Pengantar	Surat Pengantar pengajuan Penetapan Tidak Ikut PUPNS 2015	Surat Pengantar	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS,
	Slip Gaji 3 Bulan Terakhir	Keterangan Slip Gaji 3 bulan terakhir	Slip Gaji	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS,

10. Metadata Data Kompetensi ASN dijelaskan pada tabel 11 berikut ini:

Table 4. Metadata Data Kompetensi ASN

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
----	------	----------	-------------	-------------	------------

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Data ASN				
	Riwayat Kompetensi	Riwayat deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan	Dokumen Penilaian Kompetensi	PermenpanRB 38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN	PNS YBS, PPK
2	Referensi Standar Kompetensi				
	Penetapan standar referensi standar kompetensi jabatan	Penetapan standar referensi pengetahuan, keterampilan dan perilaku ASN dalam melaksanakan tugas jabatan	Peraturan Standar Kompetensi	PermenpanRB 38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN	PPK
3	Standar kompetensi jabatan			PermenpanRB 38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN	
	Penetapan standar kompetensi jabatan	Penetapan standar pengetahuan, keterampilan dan perilaku ASN dalam melaksanakan tugas jabatan	Peraturan Standar Kompetensi Jabatan	PermenpanRB 38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN	PPK

11. Metadata Data Kinerja ASN dijelaskan pada tabel 12 berikut ini:

Table 5. Metadata Data Kinerja Aparatur Sipil Negara

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Data ASN				
	Riwayat SKP	Riwayat Sasaran Kinerja Pegawai	SKP	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
	Riwayat tunjangan kinerja	Riwayat Tunjangan Kinerja	Dokumen Pembayaran Tunjangan Kinerja	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
2	Monitoring penilaian kinerja				PNS YBS, PPK
	Hasil Penilaian	Hasil Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai	SKP	Perka BKN 3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP	PNS YBS, PPK
3	Tunjangan Kinerja				PPK
	Referensi Tunjangan Kinerja	Rujukan Tunjangan Kinerja	Peraturan Tunjangan Kinerja	Peraka BKN 22/2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS	PPK

12. Metadata Data Pengawasan dan Pengendalian ASN dijelaskan pada tabel 13 berikut ini:

Table 6. Metadata Data Pengawasan dan Pengendalian ASN

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Data ASN				
	Data Riwayat Hidup	Dokumen berisi informasi diri, pendidikan, keluarga, ataupun pengalaman bekerja PNS	Data Profil ASN	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat Golongan	Data berisi riwayat golongan selama bekerja	SK Kenaikan Pangkat	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat Pendidikan	Data berisi riwayat pendidikan ASN	Ijazah	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat Jabatan	Data berisi riwayat jabatan ASN	SK Pengangkatan	Perka BKN 14/2011 tentang	PNS YBS,

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
			Jabatan	Pedoman Pengembangan Database PNS	PPK
	Data Riwayat CPNS/PNS	Data status CPNS/PNS	SK CPNS/PNS	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat SKP	Data riwayat Sasaran Kinerja Pegawai	SKP	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
	Data Riwayat Dikalt/Kursus	Data riwayat DUPAK ASN	PAK	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
2	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan				PPK
	Kebutuhan & Pertek Formasi	Perumusan kebutuhan fotmasi dan penetapan pertimbangan teknis formasi	Dokumen Bezeting		PPK
	ANJAB	Pengumpulan dan analisa tugas yang berhubungan dengan suatu jabatan	Dokumen Analisis Jabatan	PermenpanRB 1/2020 Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	PPK
	ABK	Penetapan jumlah jam kerja untuk merampungkan suatu pekerjaan	Dokumen Analisis Beban Kerja	PermenpanRB 1/2020 Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	PPK
3	Pengadaan				
	Formasi	Susunan PNS pada sebuah bagian struktur organisasi	Dokumen Penetapan Formasi KEMENPAN-RB	PermenpanRB 23/2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019	PPK
	Pendaftaran ASN	Pencatatan menjadi ASN	Dokumen pendaftaran	PermenpanRB 23/2019 tentang Kriteria Penetapan	PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
				Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019	
	Administrasi Pendaftaran ASN	Proses pencatatan secara administratif ASN	Dokumen pendaftaran	PermenpanRB 23/2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019	PPK
	Hasil SKD	Hasil akhir proses seleksi kemampuan dasar	Dokumen Hasil SKD	PermenpanRB 23/2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019	PNS YBS, PPK
	Penetapan NIP CPNS	Proses penge-NIP-an pada CPNS	Pertimbangan Teknis NIP	PermenpanRB 23/2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019	PPK
4	Pangkat & Jabatan				
	Pertek KP	Proses persetujuan teknis kenaikan pangkat	Laporan Proses KP		PNS YBS, PPK
	Pengangkatan & Pemberhentian Jabatan	Proses menaikkan dan memberhentikan jabatan	Laporan Proses Pengangkatan/ Pemberhentian		PPK
5	Pengembangan Karier			PerBKN 22/2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan PNS	PPK
	Kesesuaian diklat & Jabatan	Analisa kecocokan antara diklat dan jabatan	Laporan Diklat	PerBKN 22/2013 tentang Pedoman	PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
				Penyusunan Perencanaan Pengembangan PNS	
	Pengangkatan & Pemberhentian Jabatan	Proses menaikkan dan memberhentikan jabatan	Laporan Proses Pengangkatan/ Pemberhentian	PerBKN 22/2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan PNS	PPK
6	Promosi		Laporan Proses Promosi		PPK
7	Mutasi		Laporan Proses Mutasi		PPK
8	Penilaian Kinerja		Laporan Penilaian Kinerja		PPK
9	Penggajian & Tunjangan				PPK
	TPP Kelas Jabatan	Besaran TPP pada tiap kelas jabatan	Laporan Pemberian Gaji dan tunjangan		PPK
10	Penghargaan PNS		Laporan Penghargaan PNS		PPK
11	Disiplin PNS		Laporan Pelanggaran Disiplin PNS	PerkaBKN 53/2010 tentang Disiplin Pegawai	
	Perkawinan/ Perceraian	Status perkawinan/ perceraian	Laporan Pelanggaran perkawinan/ perceraian	PerkaBKN 53/2010 tentang Disiplin Pegawai	PNS YBS, PPK
	Radikalisme	Status radikal politik	Paham dalam	Laporan Pelanggaran Radikalisme	PerkaBKN 53/2010 tentang Disiplin Pegawai
	Netralitas	Status ketidakberpihakan pada pengaruh apapun		Laporan Pelanggaran Netralitas	PerkaBKN 53/2010 tentang Disiplin Pegawai
	SK Tewas	Surat Keerangan Tewas	Laporan Penetapan Tewas	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS	PNS YBS, PPK
	hukuman Disiplin	Status Hukuman Disiplin	Laporan Hukuman Disiplin	PerkaBKN 53/2010 tentang	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
				Disiplin Pegawai	
12	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat		Laporan PTDH	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS	PNS YBS, PPK
13	Perlindungan		Laporan Perlindungan	PerBKN 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS	PNS YBS, PPK

13. Metadata Data Tata Naskah Digital ASN dijelaskan pada tabel 14 berikut ini:

Table 7. Metadata Data Tata Naskah Digital ASN

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Data ASN				
	Data Riwayat Hidup	Data berisi informasi diri, pendidikan, keluarga, ataupun pengalaman bekerja calon ASN	Data Profil ASN	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
2	Data Digital				
	Nota Persetujuan/ Pertimbangan NIP CPNS/PNS/ Nota Persetujuan Pengalihan Status Menjadi PNS	Surat Keterangan yang berisi persetujuan/ Pertimbangan NIP CPNS/PNS	SK CPNS/PNS	PerkaBKN 18/2011 tentang Pedoman Pengeloaan Tata Naskah Kepegawaian PNS	PNS YBS, PPK
	Ijazah dasar pengangkatan CPNS	Ijazah awal pada saat pengangkatan CPNS	Ijazah	PerkaBKN 18/2011 tentang Pedoman Pengeloaan Tata Naskah Kepegawaian PNS	PNS YBS, PPK
	Daftar Riwayat Hidup	Dokumen berisi informasi diri, pendidikan, keluarga, ataupun pengalaman	Daftar Riwayat Hidup	PerkaBKN 18/2011 tentang Pedoman Pengeloaan Tata Naskah	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		bekerja calon ASN		Kepegawaian PNS	
	SK CPNS	Surat Keterangan diangkat sebagai CPNS	SK CPNS	PerkaBKN 18/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS	PNS YBS, PPK
	SK PNS	Surat Keterangan diangkat sebagai PNS	SK PNS	PerkaBKN 18/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS	PNS YBS, PPK
	SK Penetapan Perubahan Data Dasar	Surat Keterangan Persetujuan penetapan perubahan data dasar	SK Penetapan Perubahan Data Dasar	PerkaBKN 18/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS	PNS YBS, PPK
	SK KP Terakhir	Surat Keterangan Kenaikan Pangkat terakhir	SK KP Terakhir	PerkaBKN 18/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS	PNS YBS, PPK
	SK Pengangkatan Jabatan Terakhir	Surat Keterangan Pengangkatan Jabatan Terakhir	SK Pengangkatan Jabatan Terakhir	PerkaBKN 18/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS	PNS YBS, PPK
	SK Pembebasan/ Pemberhentian dari jabatan organik Pegawai Negeri	Surat Keterangan Pembebasan/ Pemberhentian dari jabatan organik Pegawai Negeri	SK Pembebasan/ Pemberhentian dari jabatan organik Pegawai Negeri	PerkaBKN 18/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS	PNS YBS, PPK
	SK Pengangkatan / Pemberhentian sebagai Pejabat	Surat Keterangan pengangkatan atau pemberhentian sebagai Pejabat	SK Pengangkatan / Pemberhentian sebagai Pejabat	PerkaBKN 18/2011 tentang Pedoman Pengelolaan	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	Negara	Negara	Negara	Tata Naskah Kepegawaian PNS	

14. Metadata Data Talent Management ASN dijelaskan pada tabel 15 berikut ini:

Table 8. Metadata Data Talent Management ASN

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Jabatan Kritikal		Daftar Jabatan Kritikal	PermenpanRB 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN	PPK
2	Instansi			PermenpanRB 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN	PPK
	Usul Jabatan Kritikal	Pengusulan jabatan kritikal untuk instansi	Dokumen Jabatan Kritikal	PermenpanRB 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN	PPK
	Penetapan Jabatan Kritikal	Persetujuan penetapan jabatan kritikal untuk instansi	Peraturan Jabatan Kritikal	PermenpanRB 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN	PPK
	Skala Prioritas Nasional	Tingkat kebutuhan nasional jabatan kritikal instansi	Dokumen Jabatan Kritikal	PermenpanRB 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN	PPK
3	Nasional, JPT, Administrasi, Fungsional			PermenpanRB 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN	PPK
	Usul Jabatan Kritikal	Pengusulan jabatan kritikal untuk nasional, JPT, Administrasi, Fungsional	Dokumen Jabatan Kritikal	PermenpanRB 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN	PPK
	Penetapan Jabatan Kritikal	Persetujuan penetapan jabatan kritikal untuk nasional, JPT, Administrasi, Fungsional	Peraturan Jabatan Kritikal	PermenpanRB 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN	PPK
	Skala Prioritas Nasional	Tingkat kebutuhan	Dokumen Jabatan Kritikal	PermenpanRB 3/2020	PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		nasional jabatan kritis nasional, JPT, Administrasi, Fungsional		tentang Manajemen Talenta ASN	
4	Nasional, JPT Madya, Utama			PermenpanRB 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN	PPK
	Usul Jabatan Kritis	Pengusulan jabatan kritis untuk nasional, JPT Madya, Utama	Dokumen Jabatan Kritis	PermenpanRB 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN	PPK
	Penetapan Jabatan Kritis	Persejukan penetapan jabatan kritis nasional, JPT Madya, Utama	Peraturan Jabatan Kritis	PermenpanRB 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN	PPK
	Skala Prioritas Nasional	Tingkat kebutuhan nasional, JPT Madya, Utama	Dokumen Jabatan Kritis	PermenpanRB 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN	PPK
4	Rencana Pengembangan Karier		Dokumen rencana pengembangan karier	PermenpanRB 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN	PPK
6	Rencana Pengembangan Karier Instansi	Rencana Pengembangan Karier untuk setiap Instansi	Dokumen rencana pengembangan karier	PermenpanRB 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN	PPK
7	Rencana Pengembangan Karier Nasional	Rencana pengembangan Karier tingkat Nasional	Dokumen rencana pengembangan karier	PermenpanRB 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN	PPK
8	Profil Kompetensi	Gambaran pengembangan pegawai	Profil kompetensi	PermenpanRB 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN	PPK
9	Rencana Suksesi	Rencana pengisian posisi pada jabatan	Dokumen rencana suksesi	PermenpanRB 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN	PPK
10	Pola Karier Instansi	Alur pengembangan karier PNS antar jabatan, pangkat, pendidikan, kompetensi dan	Dokumen pola karier	PermenpanRB 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN	PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		pelatihan			

15. Metadata Data Riwayat ASN dijelaskan pada tabel 16 berikut ini:

Table 9. Metadata Data Riwayat ASN

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Riwayat pendidikan formal;	Riwayat pendidikan yang diselenggarakan di sekolah/universitas/ Institusi	Ijazah	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
2	Riwayat pendidikan non formal	Riwayat pendidikan di luar pendidikan formal	Sertifikat	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
5	Riwayat Jabatan	Riwayat kedudukan berdasarkan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang	SK Pengangkatan jabatan	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
6	Riwayat kepangkatan;	Riwayat kedudukan yang menunjukkan tingkat PNS berdasarkan jabatan	SK Kenaikan Pangkat	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
7	Riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;	Riwayat penilaian kontribusi balas jasa PNS	SK penghargaan	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
8	Riwayat Pengalaman berorganisasi	Riwayat pengalaman PNS bergabung dan berkontribusi di sebuah organisasi	Sertifikat	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
9	Riwayat Gaji	Riwayat honor atau upah	Daftar Gaji	Perka BKN 14/2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	PNS YBS, PPK
10	Riwayat Pendidikan dan Latihan	Riwayat pelatihan atau pembelajaran pengetahuan,	Sertifikat	Perka BKN 14/2011 tentang	PNS YBS, PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
		keterampilan		Pedoman Pengembangan Database PNS	

16. Metadata Data Referensi Jabatan dijelaskan pada tabel 17 berikut ini:

Table 10. Metadata Data Referensi Jabatan

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Rumpun Jabatan				PPK
	Nama	Nama Rumpun Jabatan	Peraturan jabatan		PPK
	Deskripsi	Deskripsi Rumpun Jabatan	Peraturan jabatan		PPK
	Jenis Rumpun	Jenis Rumpun Jabatan	Peraturan jabatan		PPK
2	Nilai Jabatan				PPK
	Tahun Dari	Tahun mulai nilai jabatan	Peraturan kelas jabatan		PPK
	Tahun Sampai	Tahun akhir nilai jabatan	Peraturan kelas jabatan		PPK
	Nomor Mutasi	Nomor mutasi nilai jabatan	Peraturan kelas jabatan		PPK
	Skor	Nilai dari nilai jabatan	Peraturan kelas jabatan		PPK
3	Kelompok Jabatan				PPK
	Nama	Penamaan kelompok jabatan	Peraturan jabatan		PPK
	Lingkup	Cakupan kelompok jabatan	Peraturan jabatan		PPK
	Tugas Pokok	Tugas pokok fungsi kelompok jabatan	Peraturan jabatan		PPK
	Status	Status kelompok jabatan	Peraturan jabatan		PPK
	Rumpun Jabatan	Pengelompokan kelompok jabatan	Peraturan jabatan		PPK
	Kelompok jabatan	Jenis kelompok jabatan	Peraturan jabatan		PPK
	Jenis Jabatan Umum	Jenis jabatan umum pada kelompok jabatan	Peraturan jabatan		PPK
4	Jenis Jabatan				PPK
	Nama Jabatan	Penamaan jenis jabatan	Peraturan jabatan		PPK
	Jenis Jabatan	Jenis dari jenis jabatan	Peraturan jabatan		PPK
5	Jenis Jabatan Umum				PPK
	Nama Jabatan	Penamaan jenis jabatan umum	Peraturan jabatan		PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	Jenis Jabatan	Jenis dari jenis jabatan	Peraturan jabatan		PPK
6	Jabatan Fungsional				PPK
	Nama	Penamaan dari Jabatan Fungsional	Peraturan jabatan		PPK
	Jenis	Jenis dari Jabatan Fungsional	Peraturan jabatan		PPK
	BUP	Batas Usia Pensiun Jabatan Fungsional	Peraturan jabatan		PPK
	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Jabatan yang diperoleh Jabatan Fungsional	Peraturan jabatan		PPK
	Bobot	Bobot Jabatan Fungsional	Peraturan jabatan		PPK
	Kelompok jabatan	Jenis kelompok jabatan pada Jabatan Fungsional	Peraturan jabatan		PPK
	Jenis Jabatan	Jenis jabatan pada Jabatan Fungsional	Peraturan jabatan		PPK
	Status	Status aktif dari Jabatan Fungsional	Peraturan jabatan		PPK
	Jumlah Formasi	Jumlah formasi pada Jabatan Fungsional	Peraturan jabatan		PPK
	Nama Asli	Nama asli Jabatan Fungsional	Peraturan jabatan		PPK
	Jenjang	Jenjang Jabatan Fungsional	Peraturan jabatan		PPK
	Syarat Jabatan	Syarat menduduki Jabatan Fungsional	Peraturan jabatan		PPK
7	Jabatan Fungsional Umum				PPK
	Nama	Penamaan dari Jabatan Fungsional umum	Peraturan jabatan		PPK
	Jenis Jabatan Umum	Jenis dari Jabatan Fungsional umum	Peraturan jabatan		PPK
	Status	Status keaktifan Jabatan Fungsional umum	Peraturan jabatan		PPK
	Peraturan	Landasan hukum Jabatan Fungsional umum	Peraturan jabatan		PPK
	Nama Asli	Nama asli Jabatan Fungsional umum	Peraturan jabatan		PPK
	Nama Instansi	Nama instansi Jabatan Fungsional umum	Peraturan jabatan		PPK

17. Metadata Data Referensi Pendidikan dijelaskan pada tabel 18 berikut ini:

Table 11. Metadata Data Referensi Pendidikan

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Tingkat Pendidikan				
	Golongan	Jenjang karir pada tingkat pendidikan	Peraturan Rumpun Pendidikan		PPK
	Nama	Nama tingkat pendidikan	Peraturan Rumpun Pendidikan		PPK
	Golongan Awal	Golongan awal pada tingkat pendidikan	Peraturan Rumpun Pendidikan		PPK
	Grup tingkat pendidikan	Group tingkat berdasarkan referensi	Peraturan Rumpun Pendidikan		PPK
2	Sub Rumpun pendidikan				PPK
	Nama Rumpun	Penamaan sub rumpun pendidikan	Peraturan Rumpun Pendidikan		PPK
	Kelompok	Kelompok sub rumpun pendidikan	Peraturan Rumpun Pendidikan		PPK
3	Sub Rumpun Program Pendidikan				PPK
	Nama Rumpun	Penamaan sub rumpun program pendidikan	Peraturan Rumpun Pendidikan		PPK
	Nama Program	Nama program sub rumpun pendidikan	Peraturan Rumpun Pendidikan		PPK
4	Rumpun Pendidikan				PPK
	Nama Pendidikan	Nama Rumpun pendidikan	Peraturan Rumpun Pendidikan		PPK
5	Program Pendidikan				
	Nama Program Pendidikan	Penamaan program pendidikan	Peraturan Rumpun Pendidikan		PPK
6	Nilai TK Pendidikan				PPK
	Skor TK	Nilai skor Tingkat Pendidikan	Peraturan Rumpun Pendidikan		PPK
7	Kelompok Pendidikan				PPK
	Nama Kelompok Pendidikan	Penamaan kelompok pendidikan	Peraturan Rumpun Pendidikan		PPK

18. Metadata Data Referensi Lokasi dijelaskan pada tabel 19 berikut ini:

Table 12. Metadata Data Referensi Lokasi

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Nama Kanreg	Nama Kantor Regional	Peraturan Referensi Lokasi		PPK
2	Nama Daerah	Lokasi Daerah	Peraturan Referensi Lokasi		PPK
3	Jenis	Jenis Lokasi	Peraturan Referensi Lokasi		PPK
4	Jenis Kabupaten	Jenis Kabupaten pada Lokasi	Peraturan Referensi Lokasi		PPK
5	Jenis Desa	Jenis Desa pada Lokasi	Peraturan Referensi Lokasi		PPK
6	Ibukota	Ibukota pada Lokasi	Peraturan Referensi Lokasi		PPK

19. Metadata Data Referensi Unit Organisasi dijelaskan pada tabel 20 berikut ini:

Table 20. Metadata Data Referensi Unit Organisasi

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Nama Instansi	Nama Instansi aktif	Peraturan SOTK		PPK
2	Unor Atasan	Bagian dari struktur organisasi atasan	Peraturan SOTK		PPK
3	Nama Unor	Nama bagian dari struktur organisasi	Peraturan SOTK		PPK
4	Nama Jabatan	Nama jabatan pada bagian struktur organisasi	Peraturan SOTK		PPK
5	Nama Pemimpin Unor	Nama pemimpin pada bagian struktur organisasi	Peraturan SOTK		PPK
6	Jenis Unor	Jenis pada bagian struktur organisasi	Peraturan SOTK		PPK
7	Unor Induk	Induk dari bagian struktur organisasi	Peraturan SOTK		PPK

20. Metadata Data Referensi Diklat dijelaskan pada tabel 20 berikut ini:

Table 13. Metadata Data Referensi Diklat

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Kursus				

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	Nama Kursus	Nama Kursus/Diklat	Peraturan Diklat		PPK
	Status	Status keaktifan kursus/diklat	Peraturan Diklat		PPK
2	Latihan Struktural				PPK
	Nama	Nama Latihan struktural	Peraturan Diklat		PPK
	Eselon Level	Level eselon pada latihan struktural	Peraturan Diklat		PPK
	Jenis Struktural	Jenis struktural pada latihan struktural	Peraturan Diklat		PPK

21. Metadata Data Referensi Agama dijelaskan pada tabel 22 berikut ini:

Table 14. Metadata Data Referensi Agama

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Kode	Identitas Referensi Agama	Kode Referensi Agama		PPK
2	Nama Agama	Penamaan Agama	Kode Referensi Agama		PPK

22. Metadata Data Referensi Eselon dijelaskan pada tabel 23 berikut ini:

Table 15. Metadata Data Referensi Eselon

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Kode	Identitas referensi eselon	Kode Referensi eselon		PPK
2	Nama Level Eselon	Penamaan level eselon	Kode Referensi Eselon		PPK

23. Metadata Data Referensi Golongan dijelaskan pada tabel 24 berikut ini:

Table 16. Metadata Data Referensi Golongan

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Kode	Identitas referensi golongan	Kode Referensi Golongan		PPK
2	Nama	Nama golongan	Kode Referensi Golongan		PPK
3	Nama Pangkat	Nama pangkat pada golongan	Kode Referensi Golongan		PPK
4	Fungsional Kredit Utama	Jumlah Kredit utama pada jabatan fungsional	Kode Referensi Golongan		PPK
5	Fungsional Kredit	Jumlah Kredit tambahan pada	Kode Referensi Golongan		PPK

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
	Tambahan	jabatan fungsional			
6	Fungsional Kredit Total	Total Kredit PAK pada jabatan fungsional	Kode Referensi Golongan		PPK

24. Metadata Data Referensi Hukuman dijelaskan pada tabel 25 berikut ini:

Table 17. Metadata Data Referensi Hukuman

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Nilai Hukuman	Nilai hukuman disiplin	Peraturan Hukuman Disiplin		PPK
2	Jenis Tingkatan Hukuman	Level tingkatan hukuman disiplin	Peraturan Hukuman Disiplin		PPK
	Kondisi	Penjelasan jenis tingkatan	Peraturan Hukuman Disiplin		PPK
	Tahun	-	Peraturan Hukuman Disiplin		PPK
	Skor	Skor hukuman disiplin	Peraturan Hukuman Disiplin		PPK
3	Jenis Tingkatan Hukuman	Level tingkatan hukuman disiplin	Peraturan Hukuman Disiplin		PPK
	Kode	Identitas jenis tingkat	Peraturan Hukuman Disiplin		PPK
	Nama Jenis	Nama jenis tingkat	Peraturan Hukuman Disiplin		PPK
4	Jenis Hukuman		Peraturan Hukuman Disiplin		PPK
	Jenis Tingkat Hukuman	level jenis tingkat hukuman	Peraturan Hukuman Disiplin		PPK
	Nama Hukuman	Nama hukuman	Peraturan Hukuman Disiplin		PPK
5	Alasan Hukuman Disiplin	Alasan hukuman disiplin	Peraturan Hukuman Disiplin		PPK
	Nama Alasan	Nama Alasan hukuman disiplin	Peraturan Hukuman Disiplin		PPK
	Keterangan	Keterangan hukuman disiplin	Peraturan Hukuman Disiplin		PPK

25. Metadata Data Referensi Instansi dijelaskan pada tabel 26 berikut ini:

Table 18. Metadata Data Referensi Instansi

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Kode	Identitas Referensi Instansi	Kode Referensi Instansi		PPK
2	Nama	Nama Instansi	Kode Referensi Instansi		PPK
3	Jenis	Jenis Instansi	Kode Referensi Instansi		PPK
4	Status	Status aktif Instansi	Kode Referensi Instansi		PPK
5	Nama Baru	Perubahan Nama baru Instansi	Kode Referensi Instansi		PPK
6	Nama Jabatan	-	Kode Referensi Instansi		PPK
7	Jenis Instansi	Jenis Instansi	Kode Referensi Instansi		PPK

26. Metadata Data Referensi Jenis Pegawai dijelaskan pada tabel 27 berikut ini:

Table 19. Metadata Data Referensi Jenis Pegawai

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Kode	Identitas Referensi Jenis Pegawai	Kode Referensi Jenis Pegawai		PPK
2	Nama	Nama Jenis Pegawai	Kode Referensi Jenis Pegawai		PPK

27. Metadata Data Referensi Kantor Regional dijelaskan pada tabel 28 berikut ini:

Table 20. Metadata Data Referensi Kantor Regional

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Kode	Identitas Referensi Kantor Regional	Kode Referensi Kanreg		PPK
2	Kota	Kota Lokasi Kantor Regional	Kode Referensi Kanreg		PPK
3	Nama	Nama Kantor Regional	Kode Referensi Kanreg		PPK
4	Pengenal	Pengenal Kantor Regional	Kode Referensi Kanreg		PPK
5	Satuan Kerja	Satuan Kerja Kantor Regional	Kode Referensi Kanreg		PPK

28. Metadata Data Referensi Kedudukan Hukum dijelaskan pada tabel 29 berikut ini:

Table 21. Metadata Data Referensi Kedudukan Hukum

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Kode	Identitas referensi kedudukan hukum	Kode referensi kedudukan hukum		PPK
2	Nama	Nama kedudukan hukum	Kode referensi kedudukan hukum		PPK
3	Aturan	Landasan hukum	Kode referensi kedudukan hukum		PPK

29. Metadata Data Referensi KPPN dijelaskan pada tabel 30 berikut ini:

Table 22. Metadata Data Referensi KPPN

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Kode	Identitas referensi KPPN	Kode Referensi KPPN		PNS YBS, PPK
2	Nama	Nama Kantor Pembayaran Gaji PNS	Kode Referensi KPPN		PNS YBS, PPK
3	Nama Asli	Nama Asli Kantor Pembayaran Gaji PNS	Kode Referensi KPPN		PNS YBS, PPK

30. Metadata Data Referensi KTUA dijelaskan pada tabel 31 berikut ini:

Table 23. Metadata Data Referensi KTUA

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Kode	Identitas referensi KTUA	Kode referensi KTUA		PNS YBS, PPK
2	Nama	Nama kantor KTUA	Kode referensi KTUA		PNS YBS, PPK

31. Metadata Data Referensi TASPER dijelaskan pada tabel 32 berikut ini:

Table 24. Metadata Data Referensi TASPER

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Kode	Identitas referensi TASPER	Kode Referensi TASPER		PNS YBS, PPK
2	Kanreg	Kantor Regional BKN	Referensi		PNS

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
			Kantor Regional		YBS, PPK
3	Nama	Nama kantor TAS PEN tempat pengambilan dana pensiunan PNS	Kode Referensi TAS PEN		PNS YBS, PPK

32. Metadata Data Referensi Tabel Gaji dijelaskan pada tabel 33 berikut ini:

Table 25. Metadata Data Referensi Tabel Gaji

No	Data	Definisi	Sumber Data	Dasar Hukum	Akses Data
1	Gaji Pokok	Honor atau upah pokok	Tabel Gaji	PP 7/1977 jo. PP 15/2019 tentang Peraturan Gaji PNS	PNS YBS, PPK
2	Golongan	Jenjang karir	Referensi Golongan	PP 7/1977 jo. PP 15/2019 tentang Peraturan Gaji PNS	PNS YBS, PPK
3	Masa Kerja Golongan	Lama (tahun/bulam) PNS menduduki golongan	Referensi Masa Kerja	PP 7/1977 jo. PP 15/2019 tentang Peraturan Gaji PNS	PNS YBS, PPK
4	Tahun	Tahun gaji	Referensi Tahun	PP 7/1977 jo. PP 15/2019 tentang Peraturan Gaji PNS	PNS YBS, PPK
5	Gaji Pokok Hakim	honor atau upah hakim	Referensi Gaji Pokok	PP 94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah MA	PNS YBS, PPK
6	Gaji Asli				PNS YBS, PPK

G. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN DATA

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dan penyajian data terdiri atas:

1. Pengolahan Data

Proses pengolahan data ASN terdiri dari beberapa proses berikut ini:

a. Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data

- 1) Rekonsiliasi Data ASN dilakukan dengan pemadaman data ASN Instansi dengan Data SIASN berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a) jumlah PNS;
 - b) data PNS; dan
 - c) data riwayat PNS.
- 2) Laporan Rekonsiliasi Data ASN di sampaikan kepada Unit Data Eselon I Badan Kepegawaian Negara
- 3) Laporan Rekonsiliasi Data ASN sebagaimana dimaksud pada angka 2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 4) Sinkronisasi Tabel Referensi untuk data Instansi dilakukan dengan membandingkan Table Referensi dengan SIASN yang terdiri atas:
 - a) melaksanakan rekon table referensi;
 - b) melengkapi table referensi sesuai dengan ketentuan;
 - c) mengimport table referensi;
 - d) mengunduh hasil import table referensi; dan
 - e) melakukan pengecekan table referensi.
- 5) Sinkronisasi struktur data untuk data Instansi dilakukan dengan menambahkan ID PNS pada struktur data Instansi dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Meng-export data IDPNS dan ID tabel referensi;
 - b) menambahkan dan menyimpan field ID PNS dan ID table referensi pada struktur data; dan
 - c) menyimpan dan mem-backup data PNS dan Tabel referensi;
- 6) Laporan Sinkronisasi Data disampaikan kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
- 7) Laporan Sinkronisasi Data sebagaimana dimaksud pada angka 6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

b. Verifikasi dan Validasi Data

Verifikasi dan Validasi data dilakukan oleh pengolah data Unit dan Instansi secara berkala sesuai prinsip satu data ASN.

c. Pemutakhiran Data

- 1) Proses pemutakhiran data dilakukan oleh pengolah data Unit dan Instansi sebagai produsen data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi Data ASN.
- 2) Pemutakhiran data juga dapat dilakukan oleh ASN melalui mekanisme pemutakhiran data mandiri ASN dan di validasi oleh Instansi sebagai produsen data.
- 3) Kewenangan Pemutakhiran Data.
- 4) Kewenangan Pemutakhiran Data oleh Kantor Regional BKN dilakukan untuk ASN di wilayah kerja masing-masing.

Table 4. Kewenangan Pemutakhiran Data

	Instansi	BKN Pusat	Kanreg
Kewenangan	Jabatan	Golongan	Golongan
	Unit Organisasi	Tanggal, bulan, tahun lahir	TMT CPNS
	Status CPNS/PNS	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin
	SKP	Pendidikan (Pencantuman Gelar, Penyesuaian Ijazah)	Pendidikan (Pencantuman Gelar, Penyesuaian Ijazah)
	Pindah Instansi	Pindah Instansi	Pindah Instansi
	Izin Belajar	Peninjauan Masa Kerja	Peninjauan Masa Kerja
	Pejabat Negara	Tidak Ikut PUPNS 2003	
	Pemberhentian	Tidak Ikut PUPNS 2015	
	Keluarga	Pemblokiran	
	Diklat	Pengaktifan Tipikor	
	Kursus	Nama	
	Penghargaan	CLTN	
	Hukuman Disiplin	Pengaktifan kembali sebagai PNS	
	Angka Kredit		
	TMT PNS		
	Tugas Belajar		

d. Pembagian Kewenangan Data

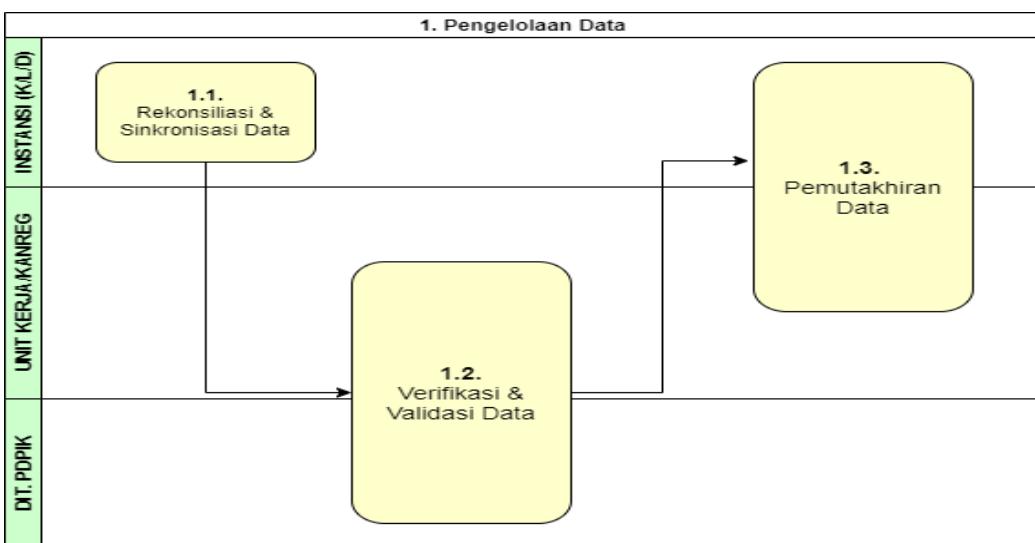
- 1) Pembagian hak akses berdasarkan profil pengolah data
 - a) Pemberian hak akses terbatas (*user training*) data ASN kepada Instansi setelah Instansi mengajukan permohonan integrasi data kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian melalui Direktur

Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
Kepegawaian

- b) Permohonan Integrasi dan Daftar Kebutuhan Data sebagaimana dimaksud pada huruf a) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - c) Pemberian hak akses (*User Production*) kepada Instansi dan pencatatan IP Publik Instansi setelah Instansi mengajukan permohonan pemberian hak akses (*User Production*) kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian melalui Direktur Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian.
 - d) Permohonan *User Production* sebagaimana dimaksud pada huruf c) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 2) Pembagian hak akses berdasarkan jenis database
- a) Akses *Data Warehouse*
Pengembangan Aplikasi Dashboard (melalui pengajuan akses data warehouse kepada Deputi bidang Sistem Informasi Kepegawaian).
 - b) Akses *Data Production (Data Utama)*
Pengembangan Aplikasi (melalui pengajuan akses data utama kepada Deputi bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Lampiran VI. Form Permohonan Akses *Data Utama*).
 - c) Permohonan akses data utama sebagaimana dimaksud pada huruf b) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - d) Akses *Data Training (Data Mirroring)*
Ujicoba Aplikasi dan Kantor Regional BKN/UPT BKN (melalui pengajuan akses *data mirroring* kepada Deputi bidang Sistem Informasi Kepegawaian).
 - e) Permohonan akses *data mirroring* sebagaimana dimaksud pada huruf d) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 3) Pembagian kewenangan data ASN disesuaikan dengan tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- e. Hierarki pengguna database ASN terbagi atas:
 - 1) database admin;
 - 2) pengembang;
 - 3) analis data; dan
 - 4) pengguna data,sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- f. Integrasi Data
Mekanisme integrasi data ASN terbagi menjadi:
 - 1) Pengajuan surat permohonan integrasi kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
 - 2) Proses Integrasi;
 - 3) Pendaftaran IP Publik melalui surat permohonan *user production* kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dengan mengikuti alur integrasi data ASN.
 - 4) Alur Integrasi Data ASN sebagaimana dimaksud pada angka 3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - 5) Proses Integrasi data secara berkala dilakukan dengan membuat Catatan Peremajaan Data (*log update data*) yang dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 - 6) Melakukan monitoring dan evaluasi integrasi dengan membuat Laporan Integrasi Data ASN yang dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- g. Penyimpanan dan Pemeliharaan Data
Proses Penyimpanan dan Pemeliharaan Data meliputi:
 - 1) Kontrol terhadap besarnya media simpan yang telah dipakai untuk penyimpanan data;
 - 2) Pengaturan ulang memori yang digunakan untuk menyimpan data sehingga tidak mengganggu performa akses data;

- 3) Sinkronisasi Data;
 - 4) *Back up data* secara periodik;
 - 5) *Back up data* untuk *recovery* data apabila terjadi gangguan dalam database kepegawaian; dan
 - 6) *Back up data* untuk membuat tabel statistik.
- h. Standar Operasional Prosedur Pengolahan Data
- Penggambaran SOP pengolahan data secara makro adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Standar Operasional Prosedur Pengolahan Data

2. Analisis Data

Analisis Utama dilakukan oleh Walidata ASN sebagai berikut:

a. Data Statistik

Data statistik yang dianalisis paling kurang menganalisis data ASN meliputi:

- 1) Pertumbuhan ASN menurut jumlah PNS;
- 2) Jumlah ASN berdasarkan:
 - a) kelompok umur;
 - b) jenis kelamin;
 - c) tingkat pendidikan;
 - d) golongan kepangkatan dan jenis kelamin;
 - e) jenis jabatan;
 - f) instansi;
 - g) masa kerja; dan
 - h) lokasi kerja.

b. Layanan Manajemen Kepegawaian

Data layanan manajemen kepegawaian yang dianalisis paling kurang meliputi:

- 1) Data Perencanaan Aparatur Sipil Negara antara lain proyeksi ASN dan kebutuhan ASN.
- 2) Data Seleksi Aparatur Sipil Negara antara lain formasi ASN, pelamar ASN, peserta lulus, formasi kosong.
- 3) Data Pengadaan Aparatur Sipil Negara antara lain usul Penetapan NIP, penyelesaian Pertimbangan Teknis Penetapan NIP, sisa Penyelesaian Pertimbangan Teknis Penetapan NIP.
- 4) Data Mutasi Aparatur Sipil Negara antara lain Usul Pindah Instansi, Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pindah Instansi, Sisa Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pindah Instansi, Usul Kenaikan Pangkat, Penyesiaan Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat, Sisa Penyelesaian Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat.
- 5) Data Pemberhentian Aparatur Sipil Negara antara lain Usul Pemberhentian, Penyesiaan Pertimbangan Teknis, Sisa Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pemberhentian.
- 6) Data Status dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara antara lain Usul Permasalahan Status, Penetapan Penyelesaian Permasalahan Status, Sisa Penyelesaian Permasalahan Status.
- 7) Data Kompetensi Aparatur Sipil Negara antara lain Penilaian Kompetensi ASN.
- 8) Data Kinerja Aparatur Sipil Negara antara lain Penilaian Kinerja ASN.
- 9) Data Pengawasan dan Pengendalian Aparatur Sipil Negara antara lain Permasalahan Pengawasan dan Pengendalian dan Penyelesaian Pengawasan dan Pengendalian.
- 10) Data Riwayat Aparatur Sipil Negara yang dianalisis adalah jumlah pemutakhiran data Riwayat berikut ini:
 - a) riwayat pendidikan formal dan non formal;
 - b) riwayat jabatan dan kepangkatan;
 - c) riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
 - d) riwayat pengalaman berorganisasi;
 - e) riwayat gaji;
 - f) riwayat pendidikan dan latihan;
 - g) riwayat CLTN;
 - h) riwayat CPNS-PNS;
 - i) riwayat Profesi;
 - j) riwayat Kedudukan Hukum;

- k) riwayat Hukuman Disiplin;
- l) riwayat LHKPN;
- m) riwayat Angka Kredit;
- n) riwayat Kepanitiaan;
- o) riwayat Pindah Wilayah Kerja;
- p) riwayat Orang Tua;
- q) riwayat Pasangan;
- r) riwayat Anak;
- s) riwayat Masa Kerja; dan
- t) riwayat Pemberhentian.

c. Kewajaran Data

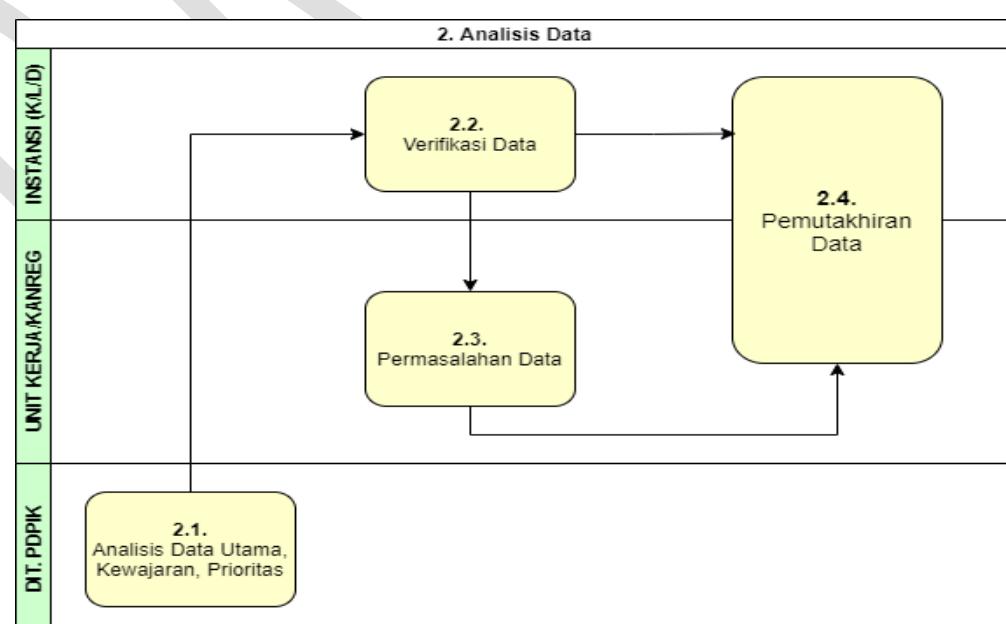
Analisis kewajaran data dilakukan dengan melakukan verifikasi data ASN yang tidak sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.

d. Data Prioritas

Analisis data prioritas dilakukan selaras dengan sasaran strategis serta indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Negara.

e. Standar Operasional Prosedur Analisis Data

Penggambaran SOP analisis data secara makro adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Standar Operasional Prosedur Analisis Data

3. Penyajian Data dan Informasi

a. Penyajian Data dan Informasi ASN dilaksanakan paling kurang 6 (enam) bulan sekali dalam bentuk statistik dan dipublikasikan melalui Portal Data dan/atau media lainnya.

1) Data Statistik

Data statistik yang dipublikasikan paling kurang menganalisis data ASN meliputi:

- a) Pertumbuhan ASN menurut jumlah PNS;
- b) Jumlah ASN menurut kelompok umur;
- c) Jumlah ASN menurut jenis kelamin;
- d) Jumlah ASN menurut tingkat pendidikan;
- e) Jumlah ASN menurut golongan kepangkatan dan jenis kelamin;
- f) Jumlah ASN menurut jenis jabatan;
- g) Jumlah ASN menurut instansi;
- h) Jumlah ASN dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin;
- i) Jumlah ASN dirinci menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin;
- j) Jumlah ASN dirinci menurut golongan ruang dan jenis kelamin;
- k) Jumlah ASN menurut jabatan dan jenis kelamin;
- l) Jumlah ASN menurut jabatan fungsional tertentu dan jenis kelamin;
- m) Jumlah ASN menurut jenis kepegawaian dan jenis kelamin;
- n) Jumlah ASN menurut masa kerja dan jenis kelamin;
- o) Jumlah ASN menurut lokasi kerja dan jenis kelamin; dan
- p) Jumlah ASN menurut instansi dan golongan ruang.

2) Layanan Manajemen Kepegawaian

Data layanan manajemen kepegawaian yang dipublikasikan paling kurang menyajikan data sebagai berikut:

- a) Data Perencanaan Aparatur Sipil Negara
 - (1) Proyeksi ASN; dan
 - (2) Jumlah Kebutuhan ASN.
- b) Data Seleksi Aparatur Sipil Negara
 - (1) Jumlah Formasi ASN;
 - (2) Jumlah Formasi berdasarkan Jenis Formasi, Pendidikan, Jabatan, Lokasi Penempatan dan Instansi;

- (3) Jumlah Pelamar ASN berdasarkan Jenis Formasi, Pendidikan, Jabatan, Lokasi Penempatan dan Instansi;
 - (4) Jumlah Peserta Lulus berdasarkan Jenis Formasi, Pendidikan, Jabatan, Lokasi Penempatan dan Instansi; dan
 - (5) Jumlah Formasi Kosong berdasarkan Jenis Formasi, Pendidikan, Jabatan, Lokasi Penempatan dan Instansi.
- c) Data Pengadaan Aparatur Sipil Negara
 - (1) Jumlah Usul Penetapan NIP;
 - (2) Jumlah Usul Penetapan NIP berdasarkan Kantor Regional dan Instansi;
 - (3) Jumlah Usul Penetapan NIP berdasarkan Jabatan, Pendidikan, dan Golongan;
 - (4) Jumlah Penyelesaian Pertimbangan Teknis Penetapan NIP;
 - (5) Jumlah Penyelesaian Pertimbangan Teknis Penetapan NIP berdasarkan Kantor Regional dan Instansi;
 - (6) Jumlah Penyelesaian Pertimbangan Teknis Penetapan NIP berdasarkan Jabatan, Pendidikan, dan Golongan;
 - (7) Jumlah Sisa Penyelesaian Pertimbangan Teknis Penetapan NIP;
 - (8) Jumlah Sisa Penyelesaian Pertimbangan Teknis Penetapan NIP berdasarkan Kantor Regional dan Instansi; dan
 - (9) Jumlah Sisa Penyelesaian Pertimbangan Teknis Penetapan NIP berdasarkan Jabatan, Pendidikan, dan Golongan.
 - d) Data Mutasi Aparatur Sipil Negara
 - (1) Jumlah Usul Pindah Instansi;
 - (2) Jumlah Usul Pindah Instansi berdasarkan Kantor Regional dan Instansi;
 - (3) Jumlah Usul Pindah Instansi berdasarkan Jabatan dan Masa Kerja
 - (4) Jumlah Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pindah Instansi;

- (5) Jumlah Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pindah Instansi berdasarkan Kantor Regional dan Instansi;
 - (6) Jumlah Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pindah Instansi berdasarkan Jabatan dan Masa Kerja;
 - (7) Jumlah Sisa Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pindah Instansi;
 - (8) Jumlah Sisa Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pindah Instansi berdasarkan Kantor Regional dan Instansi; dan
 - (9) Jumlah Sisa Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pindah Instansi berdasarkan Jabatan dan Masa Kerja;
 - (10) Jumlah Usul Kenaikan Pangkat;
 - (11) Jumlah Usul Kenaikan Pangkat berdasarkan Kantor Regional dan Instansi;
 - (12) Jumlah Usul Kenaikan Pangkat berdasarkan Jabatan, Pendidikan, dan Golongan;
 - (13) Jumlah Penyesaian Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat;
 - (14) Jumlah Penyesaian Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat berdasarkan Kantor Regional dan Instansi;
 - (15) Jumlah Penyesaian Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat berdasarkan Jabatan, Pendidikan, dan Golongan;
 - (16) Jumlah Sisa Penyelesaian Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat;
 - (17) Jumlah Sisa Penyelesaian Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat berdasarkan Kantor Regional dan Instansi; dan
 - (18) Jumlah Sisa Penyelesaian Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat berdasarkan Jabatan, Pendidikan, dan Golongan.
- e) Data Pemberhentian Aparatur Sipil Negara
- (1) Jumlah Usul Pemberhentian;
 - (2) Jumlah Usul Pemberhentian berdasarkan Kantor Regional dan Instansi;
 - (3) Jumlah Usul Kenaikan Pangkat berdasarkan Jabatan, Pendidikan, dan Golongan;

- (4) Jumlah Penyesaian Pertimbangan Teknis;
 - (5) Jumlah Penyesaian Pertimbangan Teknis Pemberhentian berdasarkan Kantor Regional dan Instansi;
 - (6) Jumlah Penyesaian Pertimbangan Teknis Pemberhentian berdasarkan Jabatan, Pendidikan, dan Golongan;
 - (7) Jumlah Sisa Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pemberhentian;
 - (8) Jumlah Sisa Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pemberhentian berdasarkan Kantor Regional dan Instansi; dan
 - (9) Jumlah Sisa Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pemberhentian berdasarkan Jabatan, Pendidikan, dan Golongan.
- f) Data Status dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara
 - (1) Jumlah Usul Permasalahan Status;
 - (2) Jumlah Usul Permasalahan Status berdasarkan Kantor Regional, Instansi dan Jenis Permasalahan;
 - (3) Jumlah Penetapan Penyelesaian Permasalahan Status;
 - (4) Jumlah Penetapan Penyelesaian Permasalahan Status berdasarkan Kantor Regional, Instansi dan Jenis Permasalahan;
 - (5) Jumlah Sisa Penyelesaian Permasalahan Status; dan
 - (6) Jumlah Sisa Penyelesaian Permasalahan Status berdasarkan Kantor Regional, Instansi dan Jenis Permasalahan.
 - g) Data Kompetensi Aparatur Sipil Negara
 - (1) Jumlah Penilaian Kompetensi ASN berdasarkan Instansi dan Kantor Regional; dan
 - (2) Jumlah Penilaian Kompetensi ASN berdasarkan Jabatan dan Tahun.
 - h) Data Kinerja Aparatur Sipil Negara
 - (1) Jumlah Penilaian Kinerja ASN berdasarkan Instansi dan Kantor Regional; dan
 - (2) Jumlah Penilaian Kinerja ASN berdasarkan Jumlah PNS, Jabatan, Tahun dan Kriteria Penilaian.

- i) Data Pengawasan dan Pengendalian Aparatur Sipil Negara
 - (1) Jumlah Permasalahan berdasarkan Instansi dan Kantor Regional;
 - (2) Jumlah Permasalahan berdasarkan Jenis Permasalahan, Jabatan dan Tahun;
 - (3) Jumlah Penyelesaian berdasarkan Instansi dan Kantor Regional; dan
 - (4) Jumlah Penyelesaian berdasarkan Jenis Permasalahan, Jabatan dan Tahun.
- j) Data Riwayat Aparatur Sipil Negara
 - (1) riwayat pendidikan formal dan non formal
 - (a) Log Perubahan Riwayat Pendidikan Formal; dan
 - (b) Log Perubahan Riwayat Non-Formal
 - (2) riwayat jabatan dan kepangkatan
 - Log Perubahan Riwayat Jabatan dan Kepangkatan
 - (3) riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan
 - Log Perubahan Penghargaan, Tanda Jasa atau Tanda Kehormatan
 - (4) riwayat pengalaman berorganisasi;
 - Log Perubahan Pengalaman Berorganisasi;
 - (5) riwayat gaji
 - Log Perubahan Gaji.
 - (6) riwayat pendidikan dan latihan.
 - (a) Log Perubahan Pendidikan dan Latihan;
 - (b) Log Perubahan Diklat; dan
 - (c) Log Perubahan Kursus.
 - (7) riwayat CLTN
 - Log Perubahan CLTN
 - (8) riwayat CPNS-PNS
 - Log Perubahan CPNS-PNS
 - (9) riwayat Profesi
 - Log Perubahan Profesi
 - (10) riwayat Kedudukan Hukum
 - Log Perubahan Kedudukan Hukum
 - (11) riwayat Hukuman Disiplin
 - Log Perubahan Hukuman Disiplin
 - (12) riwayat LHKPN

Log Perubahan LHKPN

(13) riwayat Angka Kredit

Log Perubahan Angka Kredit

(14) riwayat Kepanitiaan

Log Perubahan Kepanitiaan

(15) riwayat Pindah Wilayah Kerja

Log Perubahan Pindah Wilayah Kerja

(16) riwayat Orang Tua

Log Perubahan Orang Tua

(17) riwayat Pasangan

Log Perubahan Pasangan

(18) riwayat Anak

Log Perubahan Anak

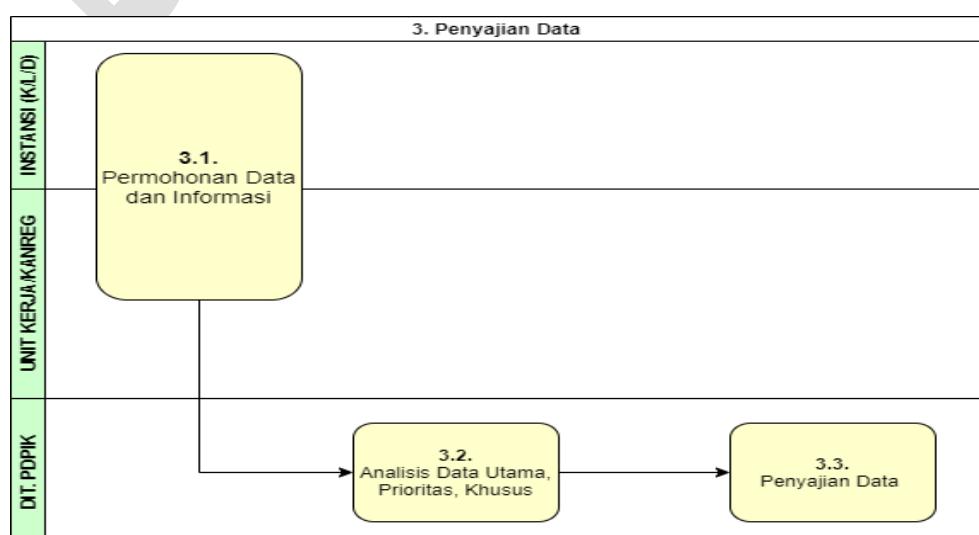
(19) riwayat Masa Kerja

Log Perubahan Masa Kerja

(20) riwayat Pemberhentian

Log Perubahan Pemberhentian

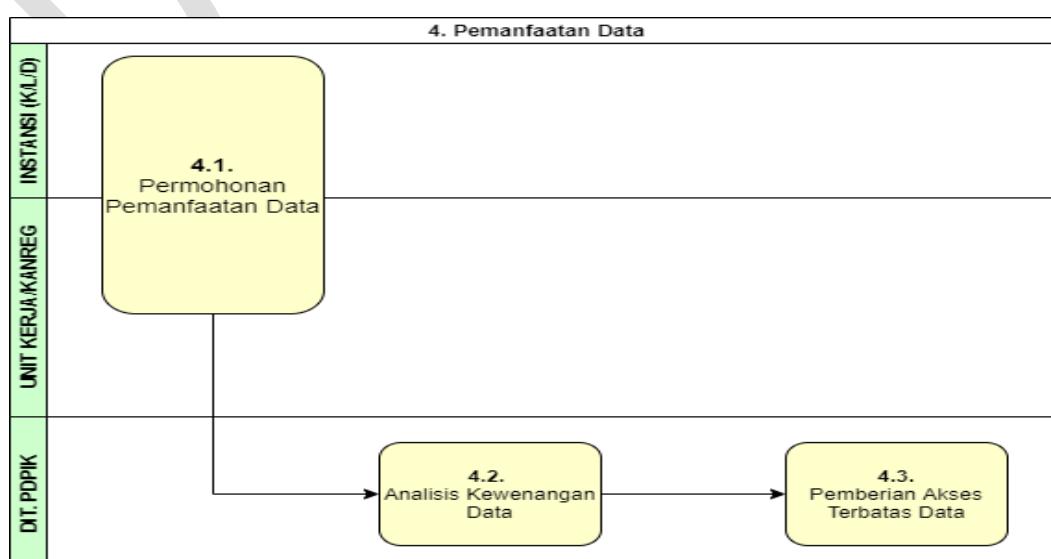
- b. Penyajian hasil analisis kewajaran data dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Produsen Data oleh Walidata ASN.
- c. Penyajian data prioritas dilakukan secara berkala melalui Portal Data dan/atau media lainnya.
- d. Penyebarluasan data dan informasi ASN yang bersifat khusus dapat dikeluarkan oleh Walidata ASN apabila ada permintaan secara tertulis dari instansi atau pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- e. Standar Operasional Prosedur Penyajian Data dan Informasi Penggambaran SOP penyajian data dan informasi secara makro adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Standar Operasional Prosedur Penyajian Data

4. Pemanfaatan Data

- a. Pemanfaatan Data ASN diluar kewenangan Instansi dan/atau *stakeholder* dapat dilakukan melalui permohonan kerja sama pemanfaatan data yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Permohonan kerja sama pemanfaatan data ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- c. Mekanisme pemanfaatan data ASN dapat dilakukan dengan pengajuan MOU, PKS dan/atau bentuk dokumen perjanjian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti alur kerja sama pemanfaatan data ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- d. Pemberian hak akses data pada disesuaikan dengan Daftar Kebutuhan Data Kepegawaian ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- e. Pemanfaatan Data sesuai kesepakatan pada MOU, PKS dan/atau bentuk dokumen perjanjian lainnya dituangkan dalam petunjuk teknis pemanfaatan data ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- f. Standar Operasional Prosedur Penyajian Data dan Informasi Penggambaran SOP penyajian data dan informasi secara makro adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Data

5. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan evaluasi data dilakukan secara berkala berdasarkan hasil analisis kewajaran data dan/atau metode pengayaan lainnya;
 - b. Hasil monitoring dan evaluasi data disampaikan kepada Produsen Data secara berkala oleh Walidata ASN; dan
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi data dilaporkan kepada Sekretariat Satu Data ASN.
6. Manajemen Sumber Daya Manusia
- a. Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang TIK merujuk pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja serta kebutuhan di Unit TIK sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang TIK terdiri dari identifikasi kebutuhan, ketersediaan, analisis jabatan, data SDM saat ini, kesenjangan kebutuhan dan kualifikasi SDM serta pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang TIK; dan
 - c. Hasil analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Bidang TIK pada angka (2) dilaporkan kepada Sekretariat Satu Data ASN.

H. ARSITEKTUR DATA

Arsitektur Data ASN terdiri dari :

1. JENIS DATA

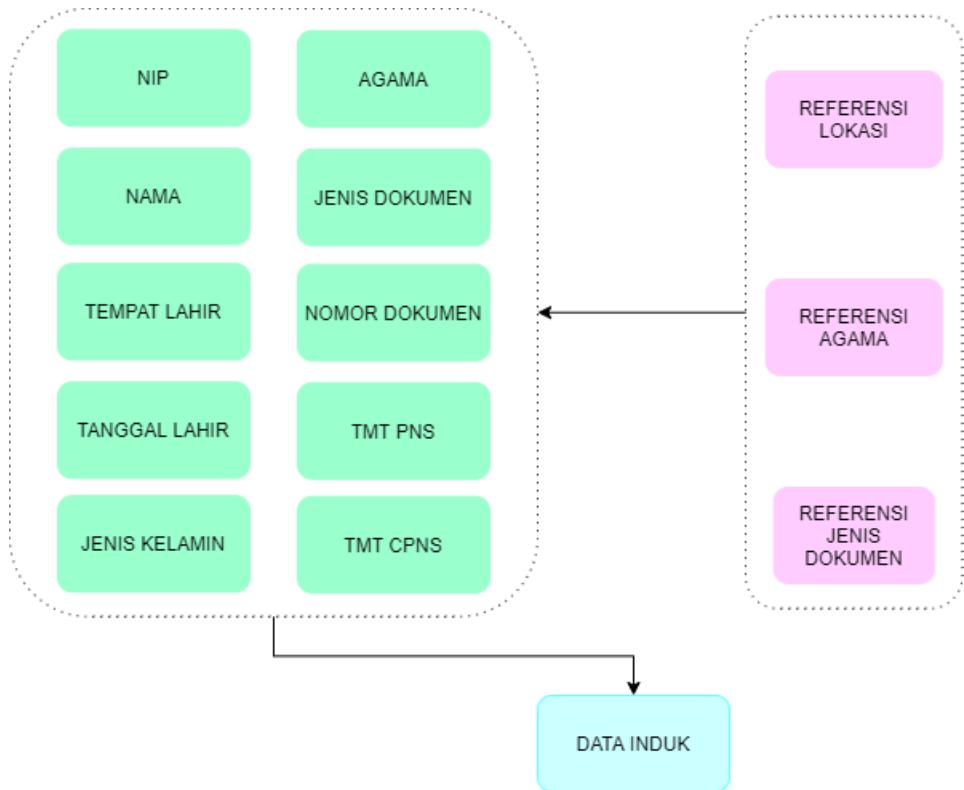
Jenis data yang dikelola pada layanan manajemen ASN terdiri dari:

- a. Data Induk;
- b. Data Transaksi; dan
- c. Data Referensi.

2. ARSITEKTUR DATA

Arsitektur Data untuk masing-masing jenis data sesuai dengan proses bisnis layanan manajemen ASN terdiri dari:

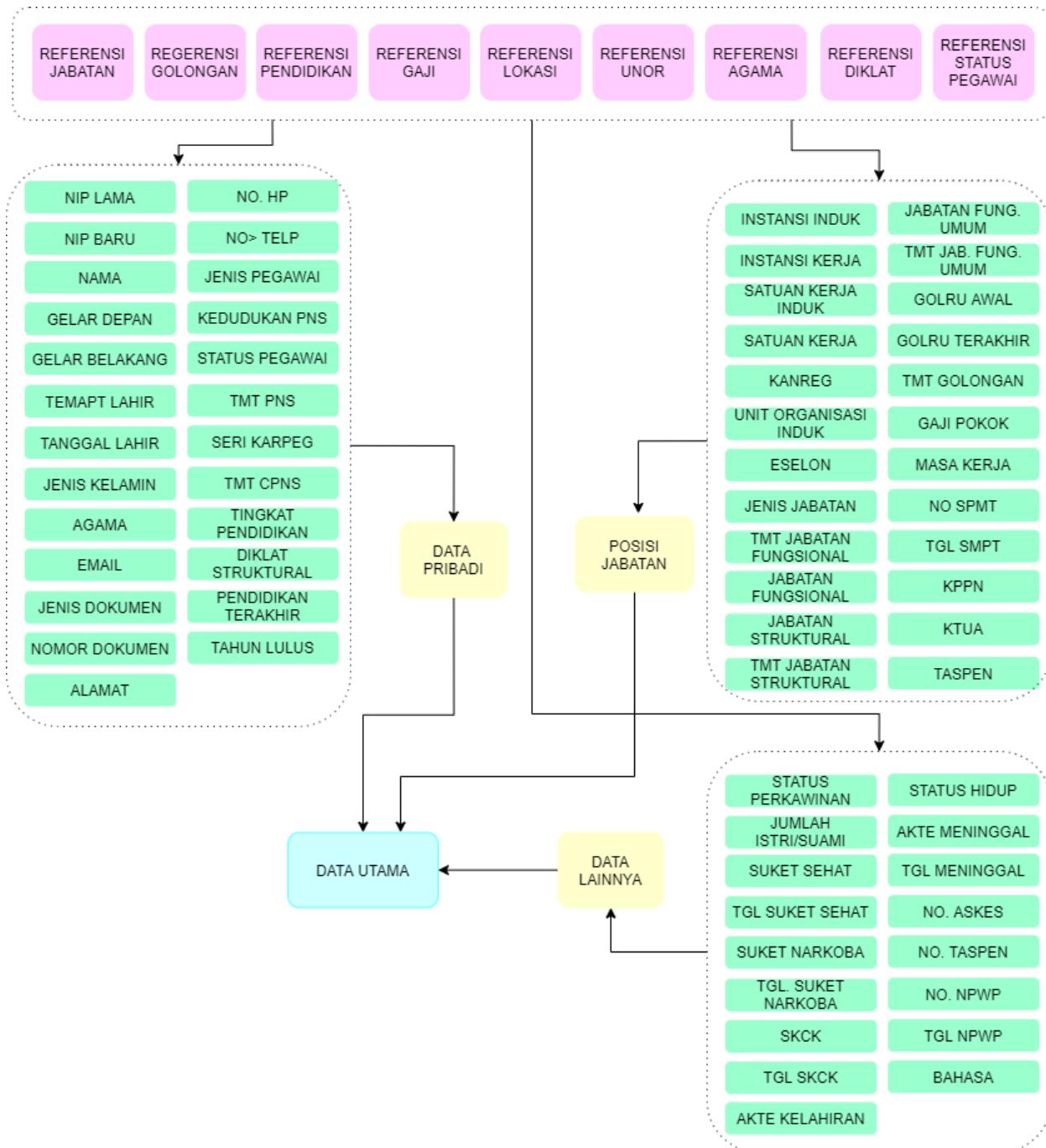
- a. Arsitektur Data Induk
 - 1) Data Induk ASN merupakan data dasar ASN PNS dan PPPK.
 - 2) Data Induk ASN berelasi dengan data referensi lokasi, agama, dan jenis dokumen.
 - 3) Arsitektur Data Induk ASN dapat dilihat pada Gambar 5 berikut:



Gambar 5. Arsitektur Data Induk ASN

b. Arsitektur Data Utama (Profil)

- 1) Data Induk ASN merupakan data utama ASN yang terbagi menjadi data pribadi, data posisi jabatan, dan data lainnya.
- 2) Data Induk ASN berelasi dengan data referensi jabatan, golongan, pendidikan, gaji, lokasi, unit organisasi, agama, diklat dan status pegawai.
- 3) Data Pribadi ASN terdiri dari informasi data pribadi ASN.
- 4) Data posisi jabatan terdiri dari informasi data jabatan, golongan dan posisi ASN dalam unit organisasi terkini.
- 5) Data lainnya meliputi informasi perkawinan, keluarga, status, administrasi pengangkatan CPNS.
- 6) Proses pengelolaan data induk ASN disinkronisasi secara otomatis sejalan dengan perubahan data pada setiap riwayat ASN.
- 7) Data utama ASN digunakan sebagai data profil ASN terkini.
- 8) Arsitektur Data Utama ASN dapat dilihat pada Gambar 6 berikut:



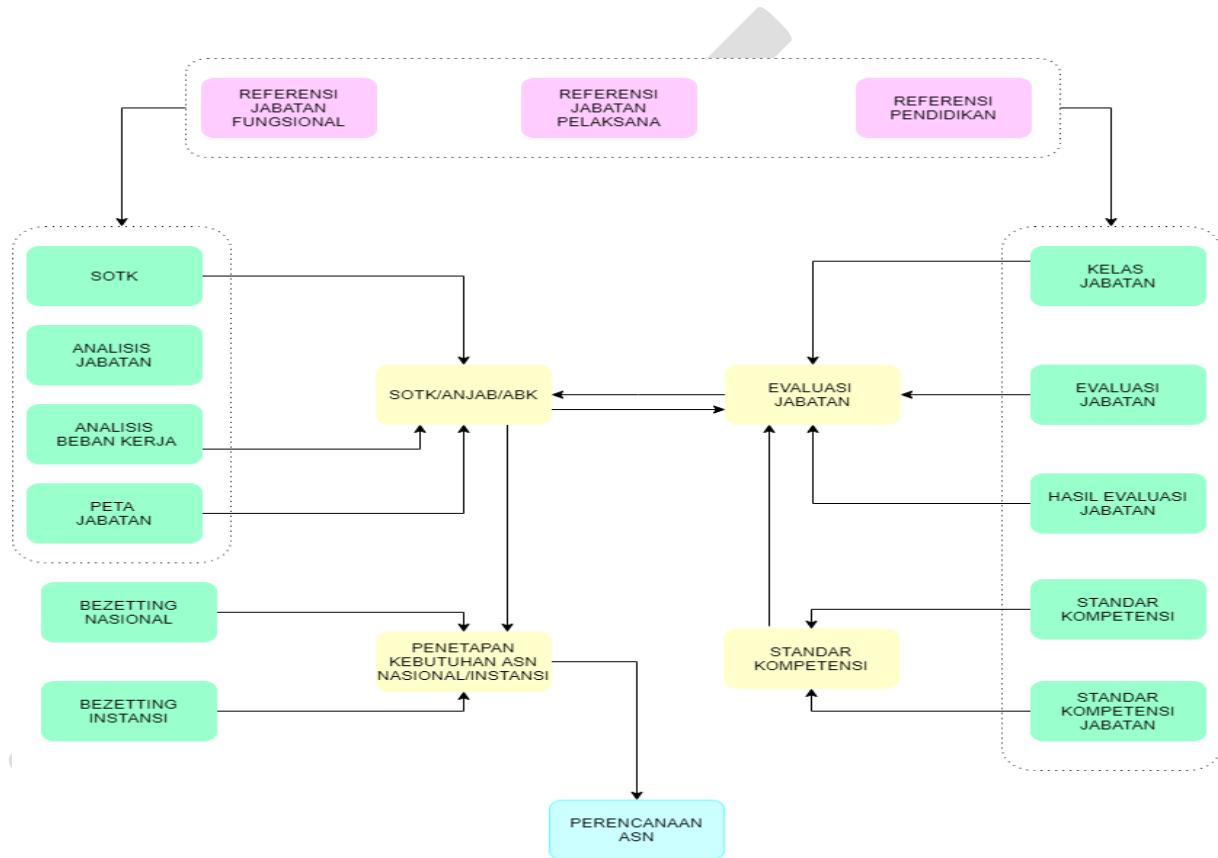
Gambar 6. Arsitektur Data Utama (Profil)

c. Arsitektur Data Perencanaan ASN

- 1) Perencanaan ASN terkait dengan proses perencanaan kebutuhan ASN dilakukan dengan melakukan evaluasi kebutuhan pegawai, penyusunan rencana redistribusi pegawai dan rencana tambahan formasi pegawai baru.
- 2) Penyusunan kebutuhan pegawai dilakukan dengan membandingkan antara data *bezeeting* ASN atau data *existing* ASN dikurangi dengan jumlah ASN yang akan pensiun dengan data kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan serta evaluasi jabatan masing-masing.
- 3) Proses selanjutnya yaitu menyusun rencana redistribusi pegawai pada satuan unit organisasi yang kelebihan

pegawai untuk ditempatkan pada unit organisasi yang kekurangan pegawai.

- 4) Tahap terakhir dilakukan penyusunan rencana tambahan formasi pegawai untuk satuan unit organisasi yang kekurangan pegawai.
- 5) Kebutuhan data dan penyusunan rencana kebutuhan ASN terdiri dari tiga komponen data yaitu data usul, informasi hasil transaksi dan data referensi yang digunakan untuk mengolah data tersebut.
- 6) Arsitektur Data Perencanaan ASN dapat dilihat pada Gambar 7 berikut:

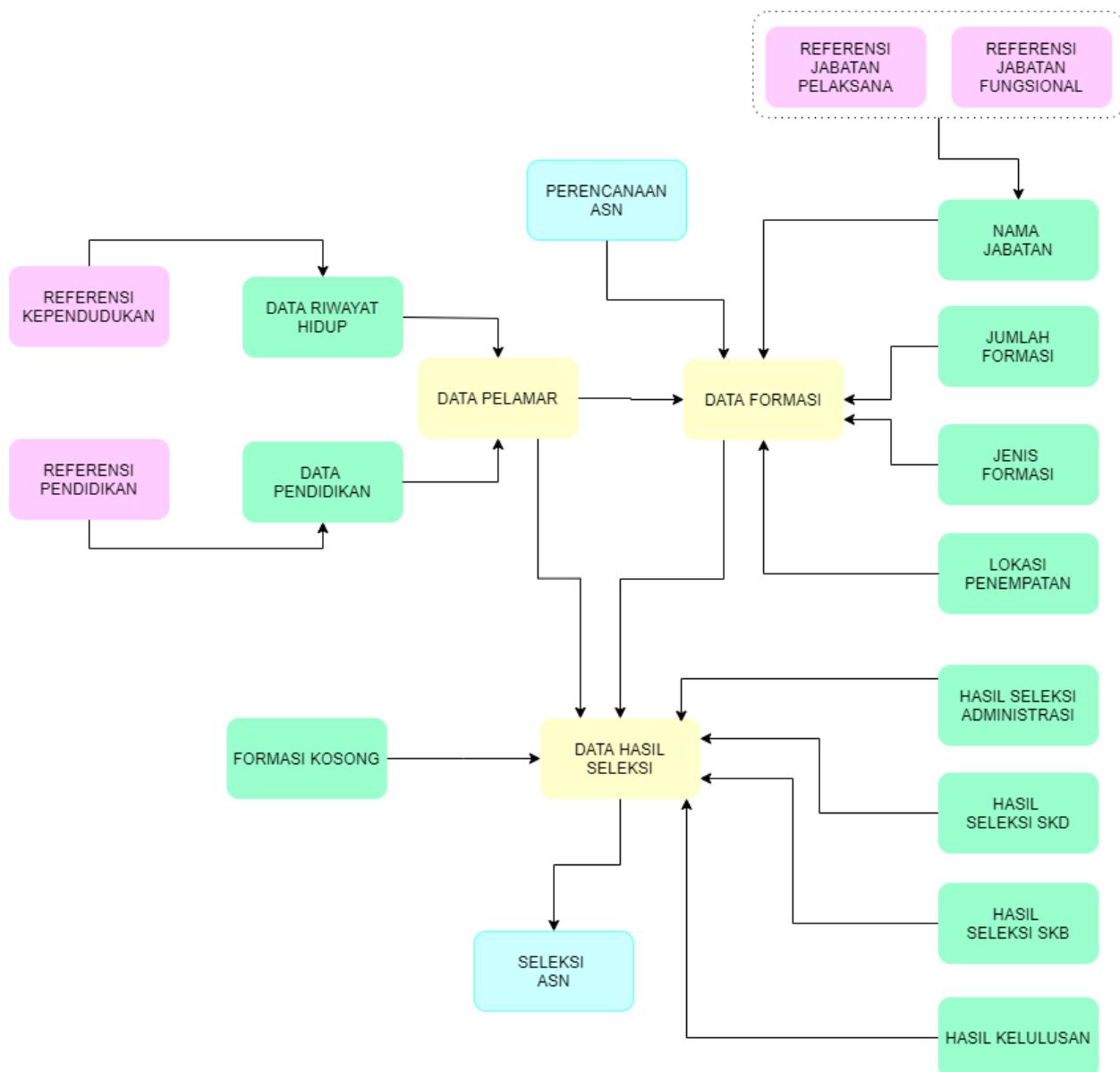


Gambar 7. Arsitektur Data Perencanaan ASN

d. Arsitektur Data Seleksi ASN

- 1) Proses Seleksi ASN dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel dengan menggunakan sistem elektronik baik dari tahapan pendaftaran sampai pelaksanaan ujian, proses penilaian, pengisian formasi serta pengumuman hasil kelulusan ASN.
- 2) Data peserta seleksi CASN di dapat berdasarkan data pelamar dan data formasi dari proses perencanaan pegawai.
- 3) Proses pendaftaran ASN menggunakan sistem terintegrasi untuk data kependudukan yang akan digunakan sebagai validasi data pelamar.

- 4) Data Formasi didapatkan dari data perencanaan kebutuhan ASN yang telah disetujui oleh Kementerian PAN/RB.
- 5) Proses seleksi menggunakan sistem CAT dan diolah dengan menggunakan sistem elektronik untuk mendapatkan calon ASN.
- 6) Arsitektur data seleksi dapat dilihat pada Gambar 8 berikut:

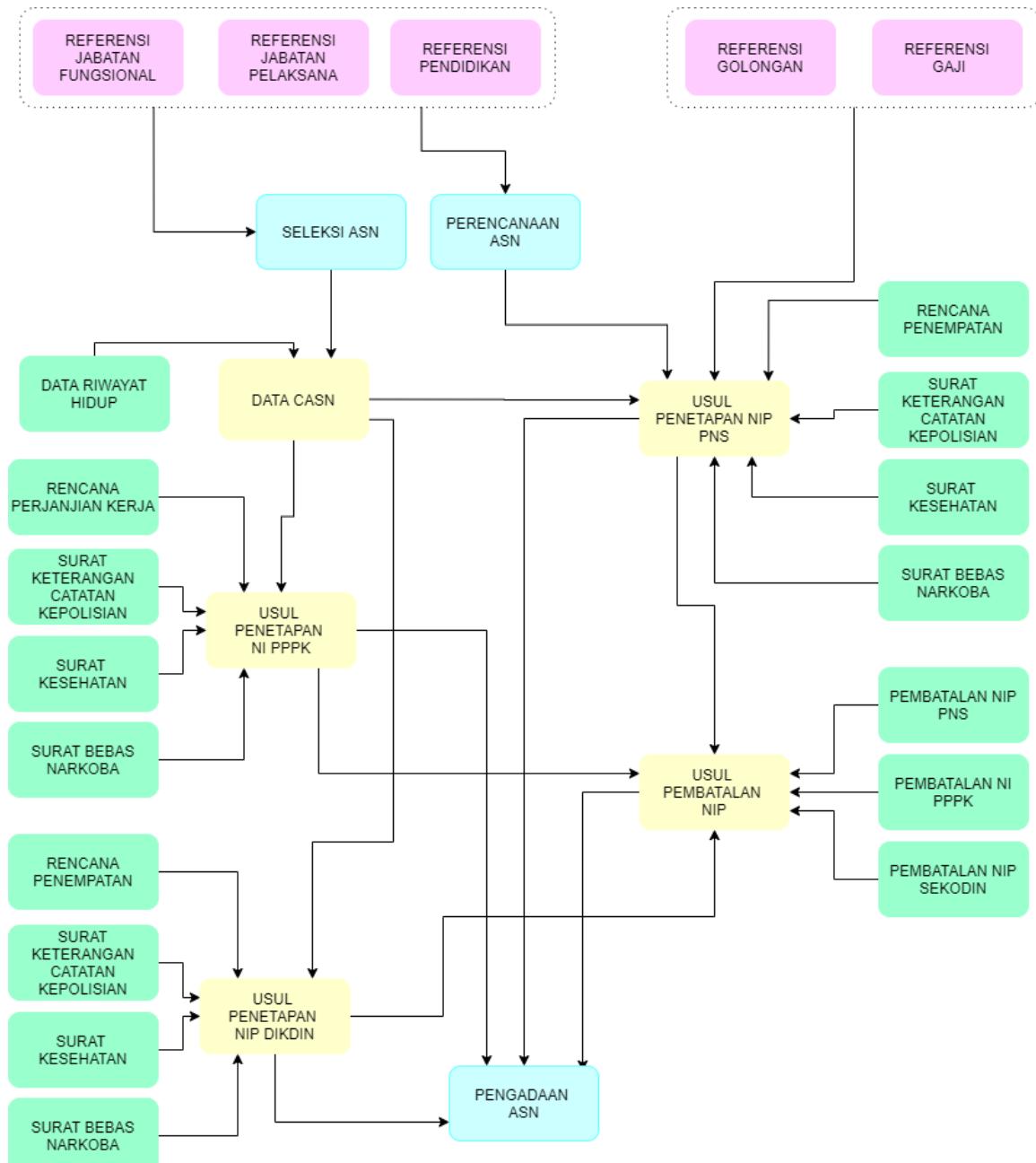


Gambar 8. Arsitektur Data Seleksi

e. Arsitektur Data Pengadaan ASN

- 1) Proses Pengadaan ASN dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan ASN dan proses seleksi Calon ASN (CASN) sehingga menghasilkan data CASN yang lulus seleksi.
- 2) Pengadaan CASN terbagi menjadi tiga jenis yaitu pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Sekolah Kedinasan (Sekdin).

- 3) Proses pengadaan merupakan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS, Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Sekolah Kedinasan (Sekdin).
- 4) Proses pengadaan tersebut terdiri dari proses pengusulan NIP dan/atau NI dengan berdasarkan data riwayat hidup dari CASN hasil seleksi CASN, dan digabungkan dengan data dari masing-masing jenis penetapan NIP dan/atau NI.
- 5) Data rencana penempatan, surat keterangan sehat, surat keterangan catatan kepolisian dan surat bebas narkoba digunakan sebagai prasyarat proses penetapan NIP dan/atau NI.
- 6) Selanjutnya apabila ada persyaratan yang tidak sesuai maka dapat dilakukan usul pembatalan NIP dan/atau NI sesuai dengan usulan masing-masing.
- 7) Data referensi yang terkait dengan proses pengadaan ASN yaitu referensi jabatan fungsional dan pelaksana, referensi pendidikan, referensi golongan dan referensi gaji.
- 8) Arsitektur Data Pengadaan dapat dilihat pada Gambar 9 berikut:

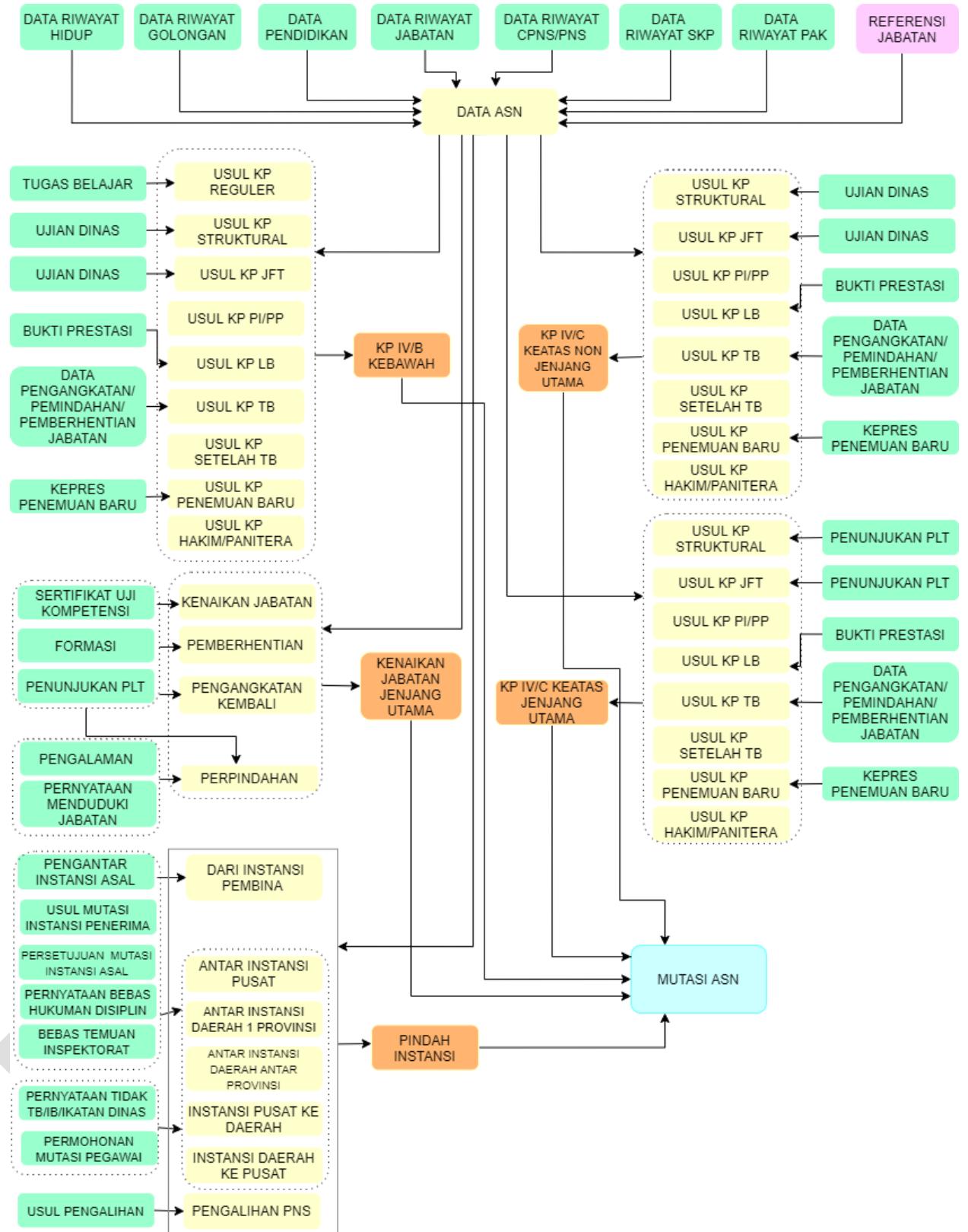


Gambar 9. Arsitektur Data Pengadaan

f. Arsitektur Data Mutasi ASN

- 1) Proses layanan mutasi kepegawaian memiliki beberapa jenis layanan yaitu layanan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan jenjang utama, dan pindah instansi.
 - 2) Layanan kenaikan pangkat dibagi menjadi tiga jenis yaitu kenaikan pangkat IV/b kebawah, kenaikan pangkat IV/c keatas non jenjang utama, dan kenaikan pangkat IV/c keatas jenjang utama.
 - 3) Masing-masing usul jenis kenaikan pangkat tersebut dibedakan menjadi usul KP untuk jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, penyesuaian ijazah/peningkatan pendidikan, prestasi luar biasa, tugas belajar, setelah tugas belajar, penemuan baru dan usul untuk KP hakim/panitera.

- 4) Proses kenaikan jabatan jenjang utama dibedakan menjadi usul kenaikan jabatan, pemberhentian jabatan, pengangkatan kembali dan perpindahan.
- 5) Proses pindah instansi dibedakan menjadi pindah instansi dari instansi pembina, antar instansi pusat, antar instansi daerah satu provinsi, instansi pusat ke daerah, instansi daerah ke pusat dan proses pengalihan PNS.
- 6) Seluruh proses mutasi kepegawaian tersebut menggunakan data ASN dan data riwayat untuk pemrosesan layanan mutasi.
- 7) Hasil usul mutasi pegawai akan menghasilkan pertimbangan teknis untuk setiap jenis usul mutasi yang diajukan.
- 8) Arsitektur Data Mutasi ASN dapat dilihat pada Gambar 10 berikut:

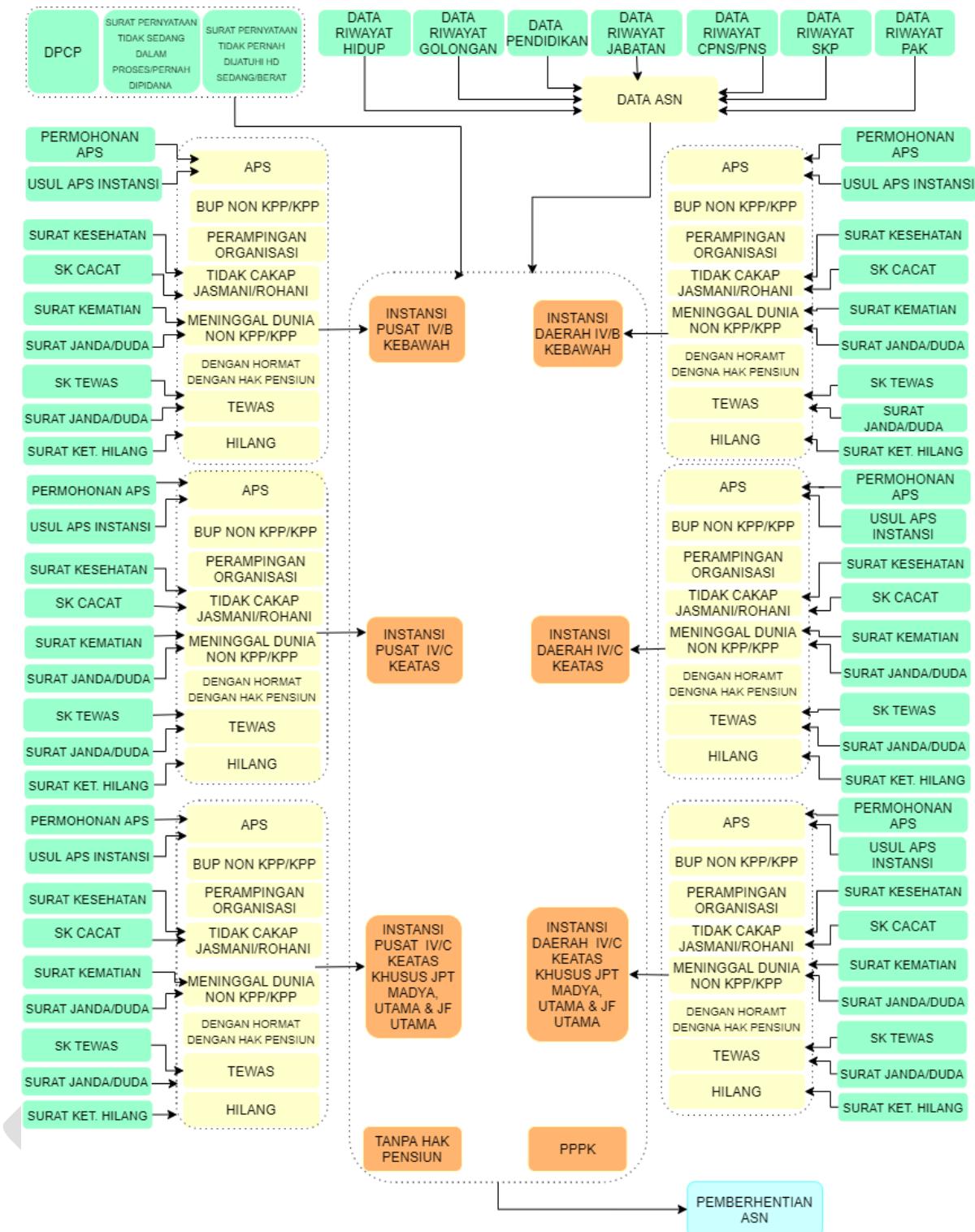


Gambar 10. Arsitektur Data Mutasi ASN

g. Arsitektur Data Pemberhentian ASN

- 1) Proses pemberhentian ASN terdiri dari beberapa jenis usul pemberhentian yaitu usul pemberhentian Instansi Pusat IV/b ke bawah, IV/c ke atas, IV/c khusus JPT Madya Utama & JF Utama, Instansi Daerah IV/b ke bawah, IV/c ke atas, IV/c khusus JPT Madya Utama dan JF Utama, usul pemberhentian tanpa hak pensiun dan usul pemberhentian PPPK.

- 2) Jenis Pemberhentian untuk masing-masing usul adalah pemberhentian atas permintaan sendiri, batas usia pensiun dengan kenaikan pangkat pengabdian/tanpa kenaikan pangkat pengabdian, perampingan organisasi, tidak cakap jasmani/rohani, meninggal dunia, dengan hormat dengan hak pensiun, tewas dan hilang.
- 3) Masing-masing usul tersebut menggunakan data ASN dengan riwayat masing-masing seperti riwayat golongan, pendidikanjabatan, CPNS/PNS, SKP dan angka kredit.
- 4) Masing-masing usul dilengkapi dengan dokumen dan data dukung serta DPCP untuk dapat diproses pertimbangan teknis pemberhentian ASN sesuai jenis pemberhentian masing-masing.
- 5) Arsitektur Data Pemberhentian ASN dapat dilihat pada Gambar 11 berikut:

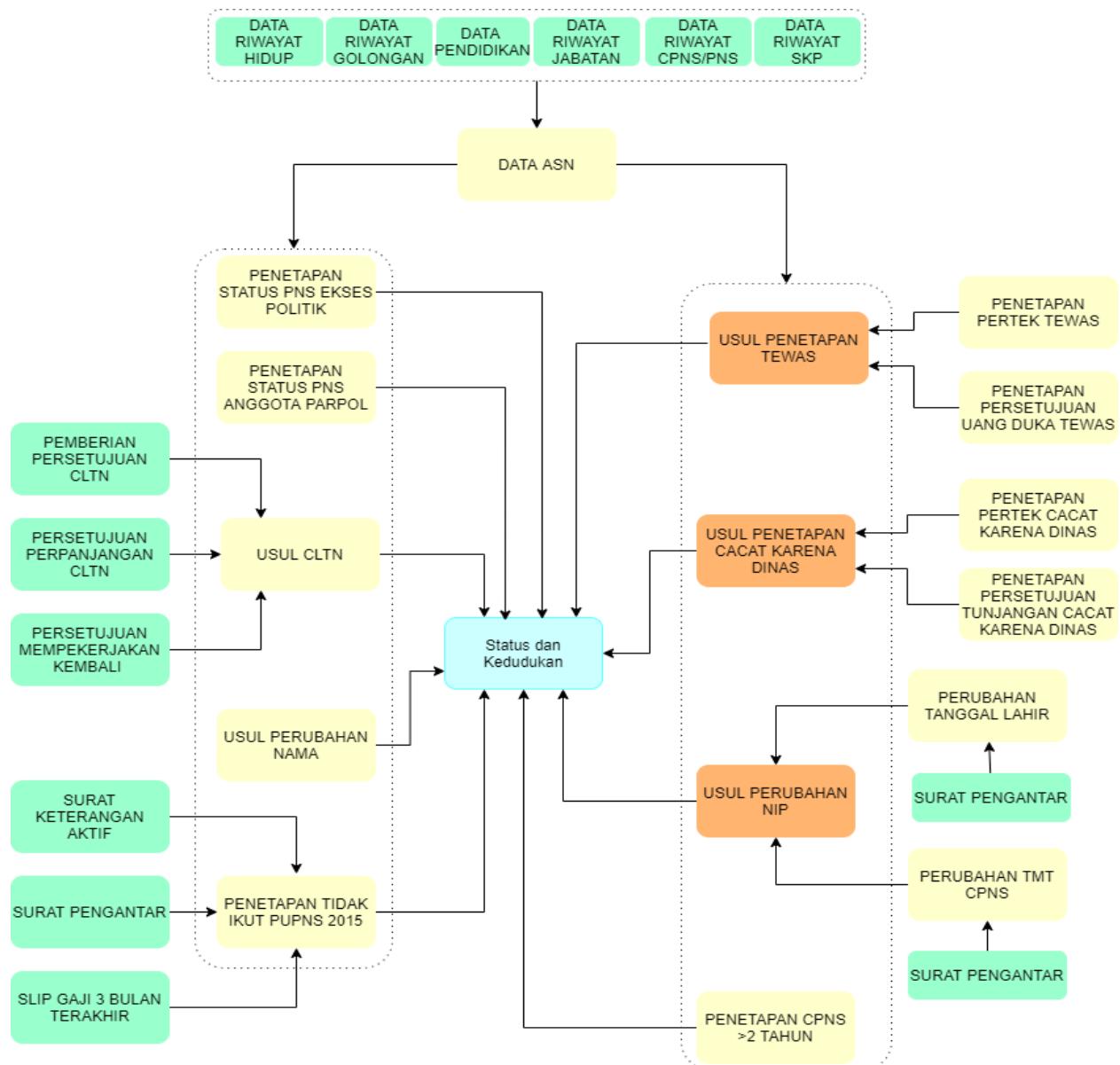


Gambar 11. Arsitektur Data Pemberhentian ASN

h. Arsitektur Data Status dan Kedudukan ASN

- 1) Proses status dan kedudukan ASN dilakukan apabila ada perubahan status dan kedudukan ASN dan/atau permasalahan kepegawian terkait dengan usul penetapan tewas, penetapan cacat karena dinas, perubahan data Nomor Induk Pegawai (NIP), penetapan CPNS > 2 tahun, status PNS ekses politik, status PNS sebagai anggota partai politik, cuti di luar tanggungan negara, perubahan nama, dan status PNS yang tidak ikut PUPNS 2015.

- 2) Pengajuan usul penetapan status ASN dilakukan oleh Instansi dengan menyertakan dokumen terkait untuk masing-masing usul penetapan status.
- 3) Selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan validasi data serta proses pembahasan penentuan penetapan status dan kedudukan kepegawaian tersebut.
- 4) Arsitektur Data Status dan Kedudukan ASN dapat dilihat pada Gambar 12 berikut:



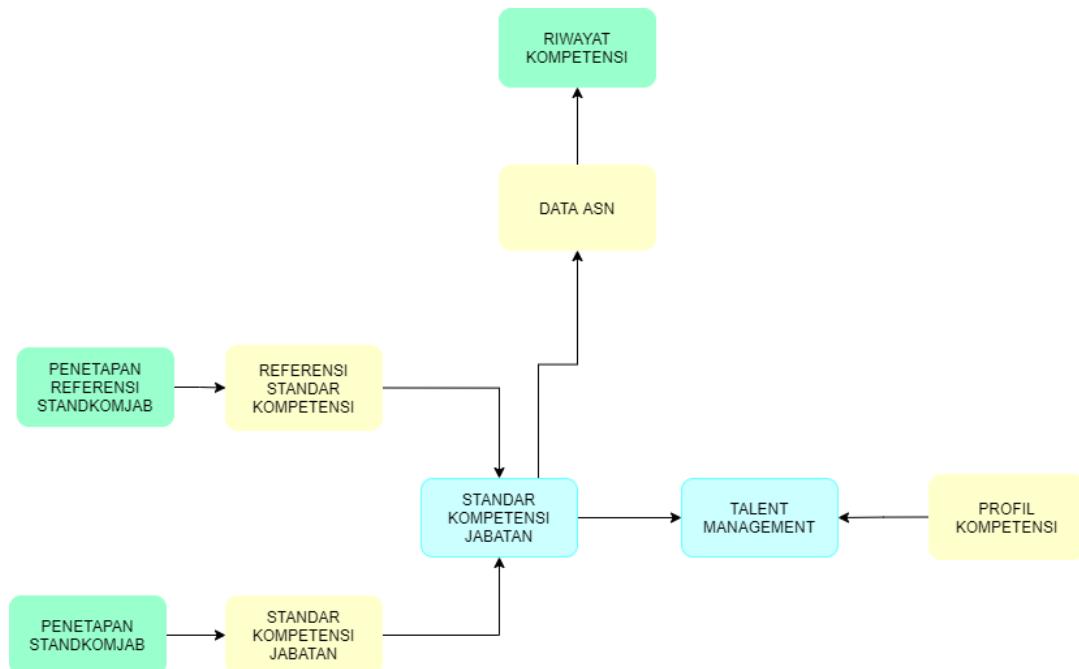
Gambar 12. Arsitektur Data Status dan Kedudukan ASN

i. Arsitektur Data Kompetensi ASN

- 1) Pengelolaan data kompetensi ASN bertujuan untuk menciptakan data profil kompetensi yang digunakan dalam layanan *talent management*.
- 2) Data kompetensi ASN merupakan pengelolaan data riwayat kompetensi ASN berdasarkan standar kompetensi dan standar kompetensi jabatan masing-masing sehingga dapat

dipetakan kompetensi masing-masing ASN berdasarkan standar tersebut.

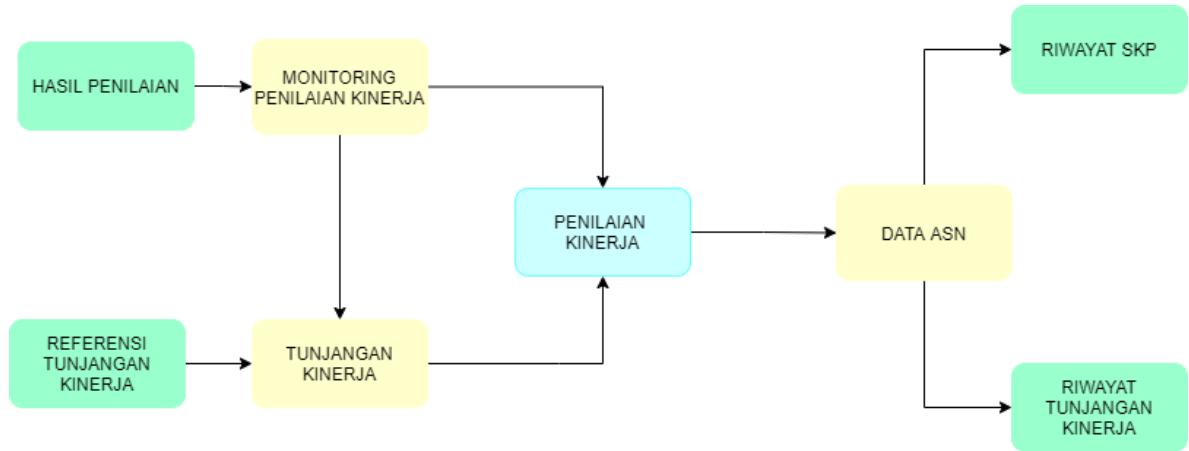
- 3) Arsitektur Data Kompetensi ASN dapat dilihat pada Gambar 13 berikut:



Gambar 13. Arsitektur Data Kompetensi ASN

j. Arsitektur Data Kinerja ASN

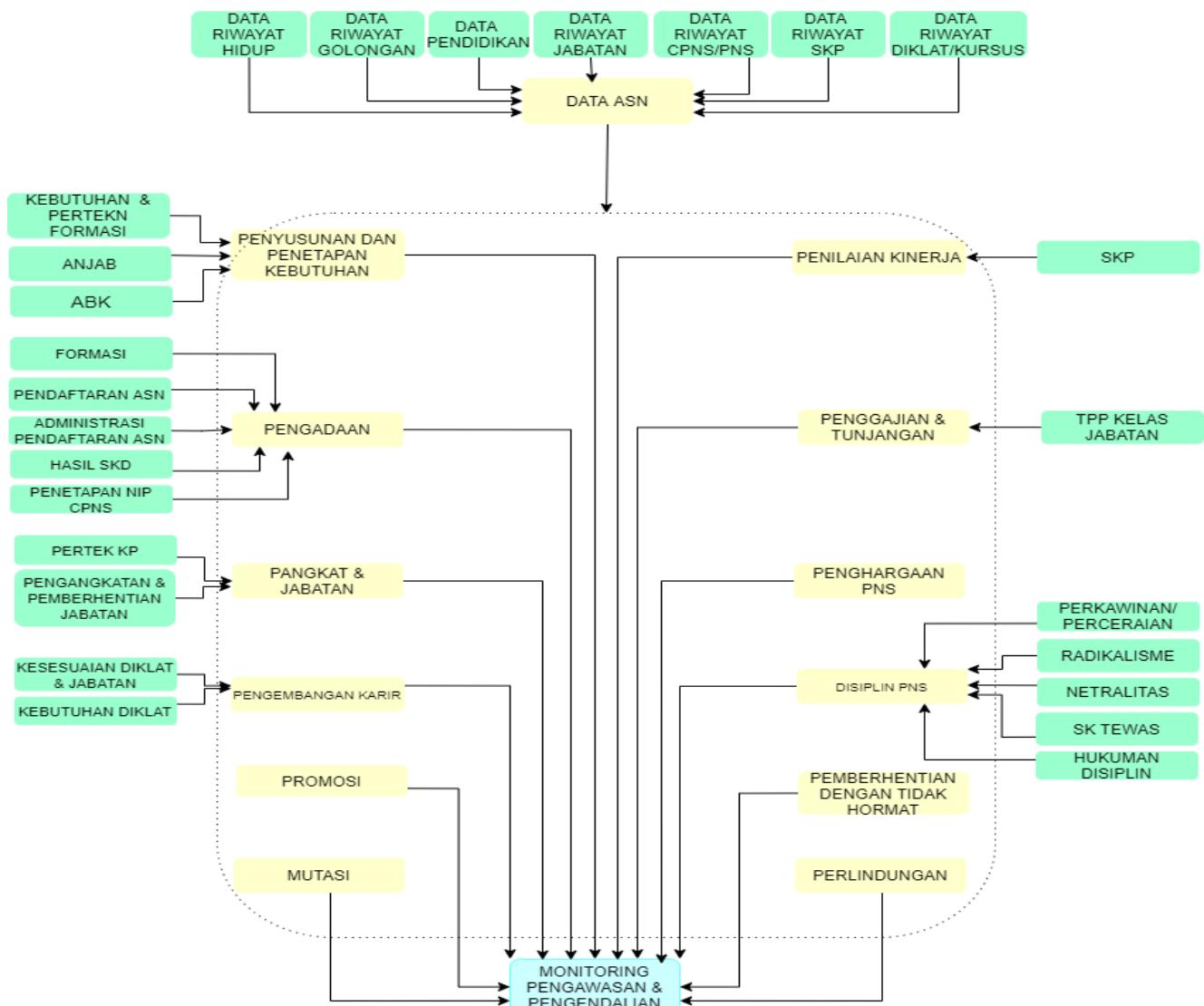
- 1) Pengelolaan penilaian kinerja ASN berdasarkan data riwayat Sasaran Kinerja Pegawai dan riwayat tunjangan kinerja masing-masing ASN.
- 2) Data Penilaian kinerja dapat dimonitoring berdasarkan hasil penilaian kinerja bulanan dan pertahun yang digunakan sebagai bahan perhitungan tunjangan kinerja yang di terima masing-masing ASN sesuai data referensi tunjangan kinerja.
- 3) Monitoring penilaian kinerja digunakan untuk mengukur kinerja individu ASN, unit kerja, dan organisasi.
- 4) Arsitektur Data Kinerja ASN dapat dilihat pada Gambar 14 berikut:



Gambar 14. Arsitektur Data Kinerja ASN

k. Arsitektur Data Pengawasan dan Pengendalian ASN

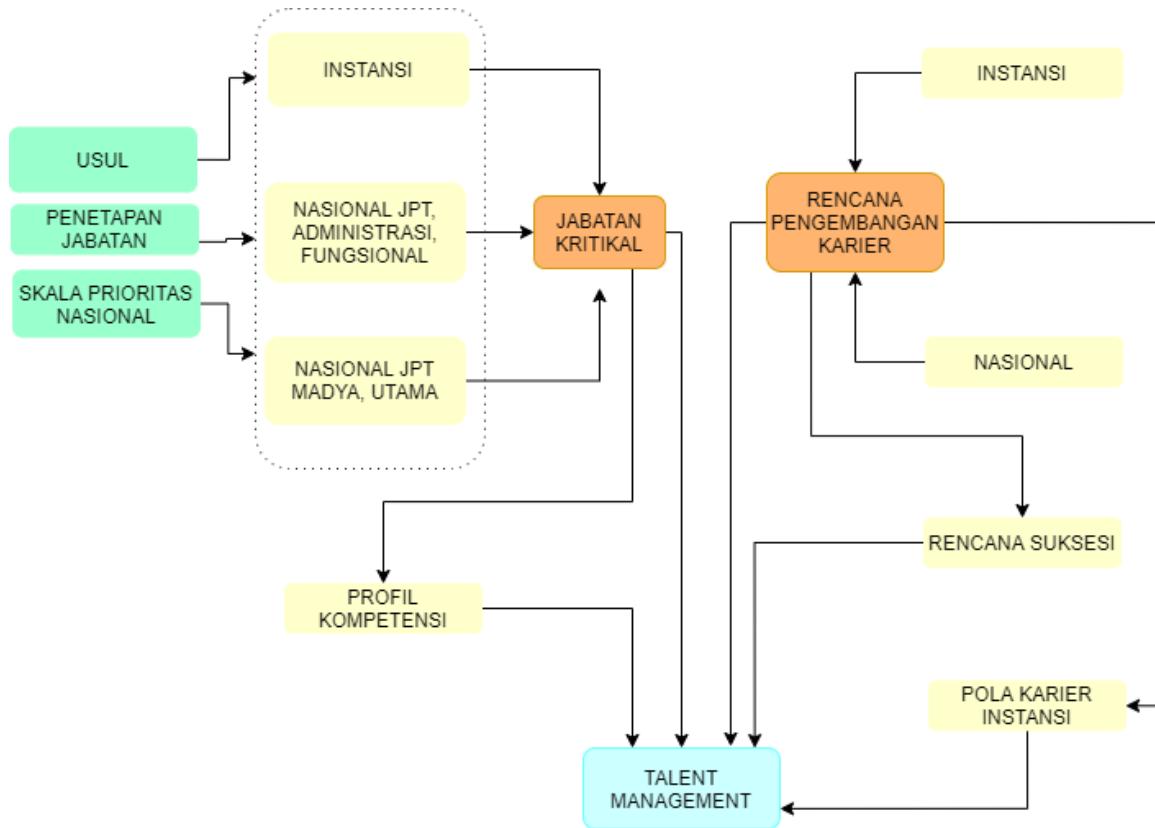
- 1) Pengelolaan monitoring data pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan proses monitoring data dari masing-masing layanan kepegawaian yang terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, proses pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan PNS, disiplin PNS, promosi, mutasi, pemberhentian dengan tidak hormat, dan perlindungan.
- 2) Monitoring data pengawasan dan pengendalian digunakan untuk melihat kepatuhan pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN oleh Instansi.
- 3) Setiap layanan monitoring terhubung dengan data ASN masing-masing dan data riwayat ASN tersebut, sehingga dapat mempermudah proses penelusuran data sesuai dengan jenis monitoring.
- 4) Arsitektur Data Pengawasan dan Pengendalian ASN dapat dilihat pada Gambar 15 berikut:



Gambar 15. Arsitektur Data Pengawasan dan Pengendalian ASN

1. Arsitektur Data Talent Management

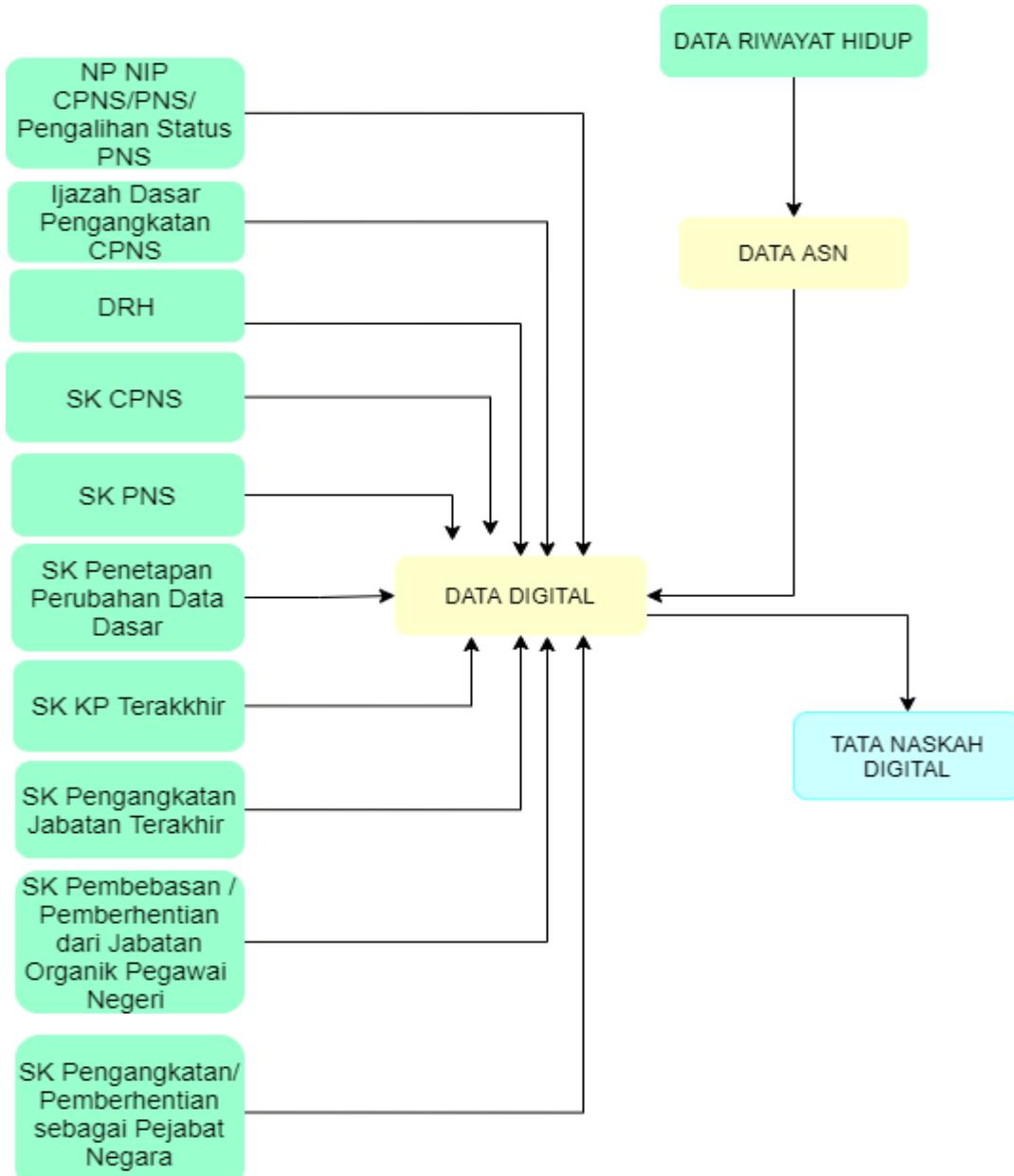
- 1) Proses *talent management* dilakukan dengan mengidentifikasi jabatan kritikal dan rencana pengembangan karier untuk kategori instansi dan/atau nasional.
 - 2) Penentuan jabatan kritikal instansi, nasional, Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi, Fungsional, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama berdasarkan usul, penetapan jabatan dan skala prioritas Nasional.
 - 3) Setelah jabatan kritikal ditentukan, maka dapat menentukan profil kompetensi masing-masing jabatan.
 - 4) Rencana pengembangan karier berkontribusi untuk penentuan pola karier dan rencana suksesi untuk masing-masing jabatan.
 - 5) Arsitektur Data *Talent Management* dapat dilihat pada Gambar 16 berikut:



Gambar 16. Arsitektur Data *Talent Management*

m. Arsitektur Tata Naskah Digital

- 1) Pengelolaan tata naskah digital dilakukan selaras dengan pengelolaan tata naskah fisik.
- 2) Cakupan untuk tata naskah digital dibatasi menjadi sepuluh jenis tata naskah digital.
- 3) Pengelolaan tata naskah disusun sesuai dengan aturan pengelolaan arsip dinas, dimana setiap data tata naskah digital terhubung dengan data ASN masing-masing.
- 4) Proses digitalisasi tata naskah digital dilaksanakan merujuk pada aturan perundangan yang berlaku.
- 5) Arsitektur Tata Naskah Digital dapat dilihat pada Gambar 17 berikut:



Gambar 17. Arsitektur Tata Naskah Digital

I. PENUKUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Keputusan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

LAPORAN REKONSILIASI DATA ASN

 BKN Badan Kepegawaian Negara	<p style="text-align: center;">LAPORAN REKONSILIASI DATA ASN</p> <p style="text-align: center;">Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian</p> <p style="text-align: center;">“Satu Data ASN Milik Kita”</p>
---	---

A. INSTANSI	
Kode Instansi	:
Nama Instansi	:
Wilayah Kanreg	:
PIC	:

B. DATA KEPEGAWAIAN					
DATA	SAPK		SIMPEG		SELISIH
1. Jumlah PNS INSDUK	:	:	:		
2. Jumlah PNS INSKER	:	:	:		
3. Golongan	I/a	:	I/a	:	
	I/b	:	I/b	:	
	I/c	:	I/c	:	
	I/d	:	I/d	:	
	II/a	:	II/a	:	
	II/b	:	II/b	:	
	II/c	:	II/c	:	
	II/d	:	II/d	:	
	III/a	:	III/a	:	
	III/b	:	III/b	:	
	III/c	:	III/c	:	
	III/d	:	III/d	:	
	IV/a	:	IV/a	:	
	IV/b	:	IV/b	:	

	IV/c	:	IV/c	:	
	IV/d	:	IV/d	:	
	IV/e	:	IV/e	:	
4. Nilai SKP	2017	:	2017	:	
	2018	:	2018	:	
5. Tingkat Pendidikan	SD	:	SD	:	
	SMP	:	SMP	:	
	SMA	:	SMA	:	
	DI	:	DI	:	
	DII	:	DII	:	
	DIII	:	DIII	:	
	DIV	:	DIV	:	
	S1	:	S1	:	
	S2	:	S2	:	
	S3	:	S3	:	
6. Jabatan	ES1	:	ES1	:	
	ES1	:	ES1	:	
	ES3	:	ES3	:	
	ES4	:	ES4	:	
	JFT	:	JFT	:	
	JFU	:	JFU	:	

C. PERMASALAHAN DATA KEPEGAWAIAN		
1. PNS Unor Tidak Aktif	:	
2. JPT Utama	:	
3. JPT Madya	:	
	:	
	:	

D. DATA RIWAYAT PNS	
JENIS RIWAYAT	JUMLAH REKONSILIASI
1. Kursus	
2. CLTN	
3. Jabatan	

4. Pendidikan Formal	
5. Diklat Struktural	
6. Hukuman Disiplin	
7. SKP	
8. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP)	
9. Prestasi	
10. Golongan	
11. CPNS-PNS	
12. Kedudukan Hukum	
13. Organisasi	
14. Kepanitiaan	
15. Angka Kredit	
16. Unit Organisasi	
17. Penghargaan	
18. Pindah Instansi	
19. Penghargaan	
20. Pindah Instansi	
21. Pindah Wilayah Kerja	
22. Profesi	
23. LHKPN	
24. Orang Tua	
25. Pasangan	
26. Anak	

Mengetahui, Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian (.....)	Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Pejabat Pengelola Kepegawaian Instansi K/L/D (.....)
--	--

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

LAPORAN SINKRONISASI DATA

 BKN Badan Kepegawaian Negara	LAPORAN SINKRONISASI STRUKTUR DATA DAN TABEL REFERENSI Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian “Satu Data ASN Milik Kita”
---	--

A. INSTANSI	
Kode Instansi	:
Nama Instansi	:
Wilayah Kanreg	:
PIC	:

B. SINKRONISASI STRUKTUR DATA		
STRUKTUR DATA	TABEL REFERENSI	
<input type="checkbox"/> PNS	<input type="checkbox"/> Agama	<input type="checkbox"/> Jenis Pensiun
	<input type="checkbox"/> Golongan	<input type="checkbox"/> Jenis KP
	<input type="checkbox"/> Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Jenis Pengadaan
	<input type="checkbox"/> Kedudukan Hukum	<input type="checkbox"/> Satuan Kerja
	<input type="checkbox"/> Jenis_Jabatan	<input type="checkbox"/> Instansi
	<input type="checkbox"/> Lainnya

C. SINKRONISASI UNIT ORGANISASI	
UNIT ORGANISASI	JUMLAH REKONSILIASI
1. Buat Unor Baru	
2. Update Unor	

D. SINKRONISASI TABEL REFERENSI

JENIS RIWAYAT	JUMLAH REKONSILIASI
1. Tabel Referensi Jabatan Fungsional Umum	
2. Tabel Referensi Jabatan Fungsional Tertentu	
3. Tabel Referensi Pendidikan	

Mengetahui, Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Pejabat Pengelola Kepegawaian Instansi K/L/D (.....)
---	--

DRAFT

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

PERMOHONAN INTEGRASI DATA DAN DAFTAR KEBUTUHAN DATA

LOGO INSTANSI

Nama Instansi K/L/D

Nomor : Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Lampiran :
Perihal : Permohonan Integrasi Data Kepada
Kepegawaian ASN Yth. Deputi Bidang Sistem Informasi
Kepegawaian.
c.q. Direktorat Pengelolaan Data dan
Informasi
Kepegawaian
di-
Tempat.

1. Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan integrasi data kepegawaian ASN (nama instansi K/L/D) dengan SIASN BKN.
2. Adapun kebutuhan data untuk proses integrasi tersebut terlampir. Mengingat pentingnya hal tersebut diatas, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat menyetujui permohonan ini.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi
K/L/D),
(nama lengkap)

NIP.

Tembusan , disampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Kepegawaian Negara

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

PERMOHONAN *USER PRODUCTION*

LOGO INSTANSI

Nama Instansi K/L/D|

Nomor : Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

Lampiran :

Perihal : Permohonan User Production
Integrasi Data Kepegawaian
ASN

Kepada

Yth. Deputi Bidang Sistem Informasi
Kepegawaian.

c.q. Direktorat Pengelolaan Data dan
Informasi

Kepegawaian

di-

Tempat.

1. Berdasarkan hasil uji coba pelaksanaan integrasi data ASN di lingkungan (nama Instansi K/L/D) dengan data SIASN, bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan user production untuk proses integrasi data kepegawaian ASN.
2. Adapun alamat IP Public (nama Instansi/K/L/D) adalah xxxxx.xxxx.xxxx. Mengingat pentingnya hal tersebut diatas, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat menyetujui permohonan ini.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

(Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi
K/L/D),

(nama lengkap)

NIP.

Tembusan , disampaikan Kepada Yth :
Kepala Badan Kepegawaian Negara

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

PERMOHANAN AKSES DATA UTAMA

 BKN Badan Kepegawaian Negara	<p style="text-align: center;">PERMOHONAN AKSES DATA UTAMA</p> <p style="text-align: center;">Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian</p> <p style="text-align: center;">“Satu Data ASN Milik Kita”</p>
---	---

A. DATA PERSONAL	
Kode Instansi/Unit Kerja	:
Nama Instansi/Unit Kerja	:
Wilayah Kanreg	:
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Nomor Kontak	:
Email	:

B. DATA ATASAN	
Nama Atasan	:
NIP	:
Jabatan	:
Nomor Kontak	:
Email	:

C. SPESIFIKASI AKSES DATA UTAMA	
Tujuan Akses Data	: <input type="checkbox"/> Pengembangan Aplikasi
	: <input type="checkbox"/> Pengguna Database (Client)
	: <input type="checkbox"/> Data Analis
Nama Aplikasi	:

C. SPESIFIKASI AKSES DATA UTAMA		
Ruang Lingkup Layanan	: <input type="checkbox"/> Internal BKN	<input type="checkbox"/> Nasional
Pengajuan Ke	: (ditulis 1 sampai ke N) *jangka waktu akses maksimal 1 tahun	
Software Database yang digunakan	:	
Jangka waktu development	:	

Mengetahui, Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Pejabat Pengelola Kepegawaian Instansi K/L/D (.....)
---	--

DRAFT

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

PERMOHONAN AKSES DATA MIRRORING

 BKN Badan Kepegawaian Negara	PERMOHONAN AKSES DATA WAREHOUSE Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian “Satu Data ASN Milik Kita”
---	---

A. DATA PERSONAL	
Kode Instansi/Unit Kerja	:
Nama Instansi/Unit Kerja	:
Wilayah Kanreg	:
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Nomor Kontak	:
Email	:

B. DATA ATASAN	
Nama Atasan	:
NIP	:
Jabatan	:
Nomor Kontak	:
Email	:

C. SPESIFIKASI AKSES DATA MIRRORING	
Tujuan Akses Data	: <input type="checkbox"/> Uji Coba Aplikasi
	: <input type="checkbox"/> Data Analis
Nama Aplikasi	:

C. SPESIFIKASI AKSES DATA MIRRORING		
Ruang Lingkup Layanan	:	<input type="checkbox"/> Internal BKN <input type="checkbox"/> Nasional
Pengajuan Ke	:	(ditulis 1 sampai ke N) *jangka waktu akses maksimal 1 tahun
Software Database yang digunakan	:	
Jangka waktu development	:	

<p>Mengetahui,</p> <p>Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian</p> <p>(.....)</p>	<p>Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Pejabat Pengelola Kepegawaian Instansi K/L/D</p> <p>(.....)</p>
--	--

DRAFT

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :



KEWENANGAN DATA ASN



Pembina Data
mengambil, merubah,
menghapus seluruh data



Wali Data
sesuai kewenangan
yang diberikan
pembina data



Pengguna Data
melihat data sesuai
kewenangan yang
diberikan



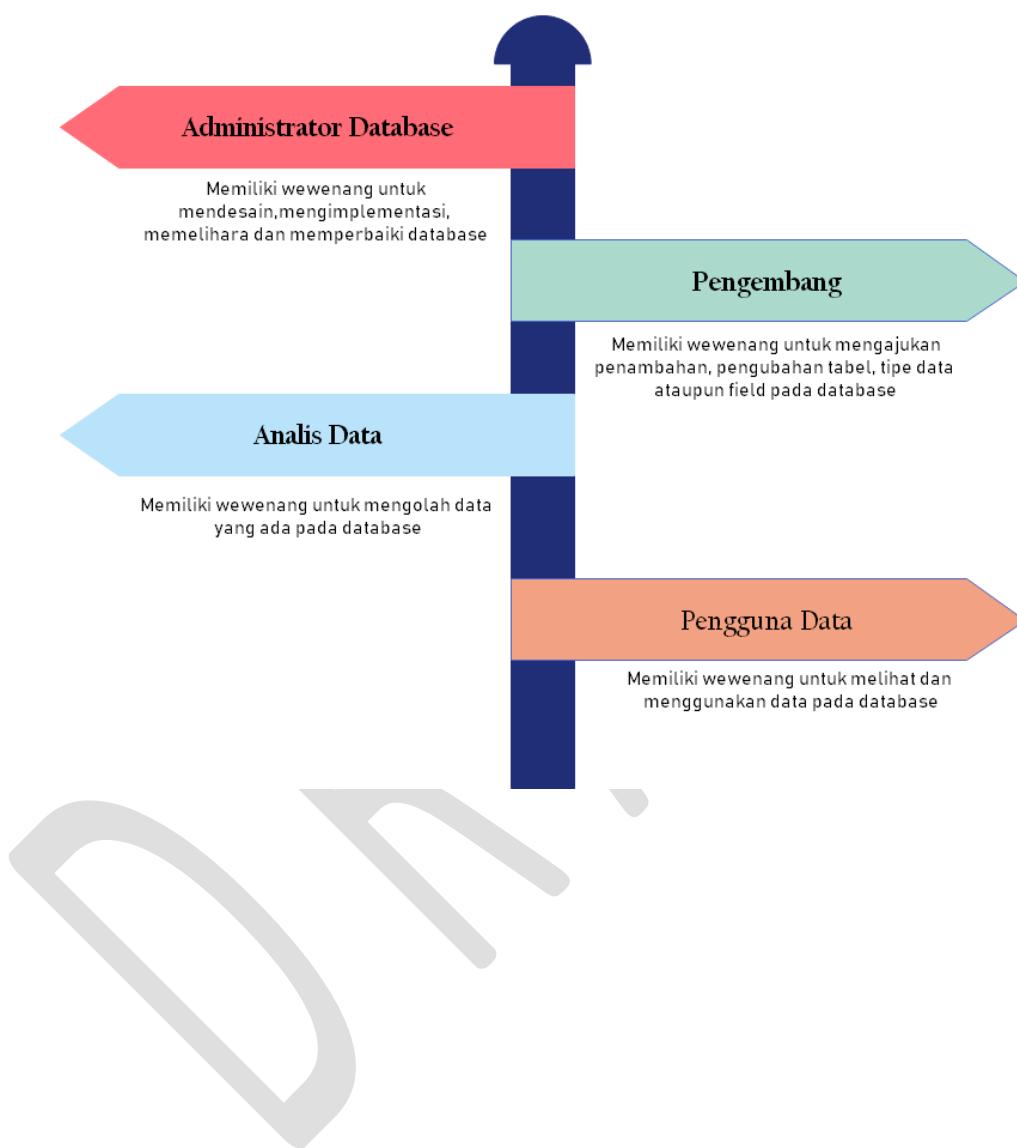
Produsen Data
sesuai lingkup
kewenangan
masing-masing

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

HIERARKI PENGGUNA



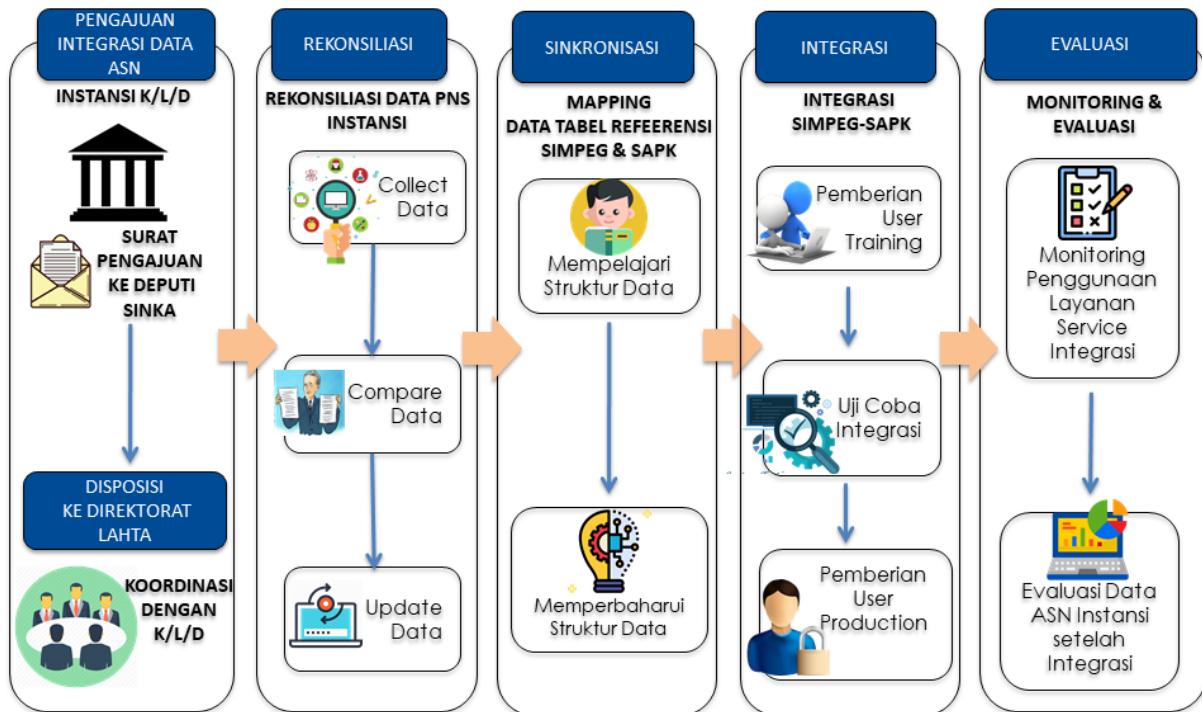
HIERARKI PENGGUNA DATA



LAMPIRAN X
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

ALUR INTEGRASI DATA ASN

TAHAPAN INTEGRASI DATA (*Data Kewenangan K/L/D)



DRA

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

CATATAN PEREMAJAAN DATA (*LOG UPDATE DATA*)

 BKN Badan Kepegawaian Negara	<p style="text-align: center;">FORM CATATAN PEREMAJAAN DATA</p> <p style="text-align: center;">Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian</p> <p style="text-align: center;">“Satu Data ASN Milik Kita”</p>
---	--

A. INSTANSI	
Kode Instansi	:
Nama Instansi	:
Wilayah Kanreg	:
PIC	:
Jenis Laporan	: <input type="checkbox"/> Semester 1 <input type="checkbox"/> Semester 2

B. PEREMAJAAN DATA			
Nama Service		Data	Jumlah
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-RWPWK	Data Riwayat Perubahan Wilayah Kerja	
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-RWPNSUNOR	Data Riwayat Unit Organisasi	
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-RWANGKAKREDIT	Data Riwayat Angka Kredit	
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-RWPEMBERHENTIAN	Data Riwayat Pemberhentian	
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-RWCLTN	Data Riwayat CLTN	
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-RWSKP	Data Riwayat SKP	
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-RWPINDAHINSTANSI	Data Riwayat Pindah Instansi	
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-RWDP3	Data Riwayat DP3	
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-RWPENGHARGAAN	Data Riwayat Penghargaan	
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-RWHUKDIS	Data Riwayat Hukuman Disiplin	
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-RWPMK	Data Riwayat Penyesuaian Masa Kerja	
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-RWGOLONGAN	Data Riwayat Golongan	
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-KURSUS	Data Riwayat Kursus	

B. PEREMAJAAN DATA			
	Nama Service	Data	Jumlah
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-DATAUTAMA	Data Profil Utama PNS	
<input type="checkbox"/>	ID-KPO-SK	Data SK Kenaikan Pangkat	
<input type="checkbox"/>	ID-KPO-SK-HIST	Data Riwayat Kenaikan Pangkat	
<input type="checkbox"/>	ID-PPO-SK	Data SK Pensiun	
<input type="checkbox"/>	ID-PPO-SK-HIST	Data Riwayat Pemberhentian	
<input type="checkbox"/>	ID-PPO-USULWAFAT	Data Usul Pemberhentian Wafat	
<input type="checkbox"/>	ID-PPO-USULWAFAT-HIST	Data Riwayat Usul Pemberhentian Wafat	
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-RWPENDIDIKAN	Data Riwayat Pendidikan	
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-RWJABATAN	Data Riwayat Jabatan	
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-RWDIKLAT	Data Riwayat Diklat	
<input type="checkbox"/>	ID-PERE-UPDATED	Data Update Peremajaan Data	
<input type="checkbox"/>	ID-PERE-UPDATED-HIST	Data Update Riwayat Peremajaan Data	
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-DATA-PASANGAN	Data Pasangan PNS	
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-DATA-ORTU	Data Orang Tua PNS	
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-DATA-ANAK	Data Anak PNS	

<p>Mengetahui,</p> <p>Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian</p> <p>(.....)</p>	<p>Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Pejabat Pengelola Kepegawaian Instansi K/L/D</p> <p>(.....)</p>
--	--

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

LAPORAN INTEGRASI DATA ASN

 BKN Badan Kepegawaian Negara	<p style="text-align: center;">LAPORAN INTEGRASI DATA</p> <p style="text-align: center;">Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian</p> <p style="text-align: center;">“Satu Data ASN Milik Kita”</p>
---	--

A. INSTANSI	
Kode Instansi	:
Nama Instansi	:
Wilayah Kanreg	:
PIC	:

B. TAHAPAN INTEGRASI DATA		
REKONSILIASI DATA		
<input type="checkbox"/> Jumlah PNS	<input type="checkbox"/> Data Profil PNS	<input type="checkbox"/> Data Riwayat PNS
<input type="checkbox"/> Permasalahan Data		
SINKRONISASI STRUKTUR DATA		
<input type="checkbox"/> PNS	<input type="checkbox"/> Tabel Referensi Utama	<input type="checkbox"/> Unit Organisasi
<input type="checkbox"/> Tabel Referensi JFU	<input type="checkbox"/> Tabel Referensi JFT	<input type="checkbox"/> Tabel Referensi Pendidikan
USER TRAINING		
User Training :	Password :	
USER PRODUCTION		
User Production:.....	Password :	IP Public :
SERVICE		
Jumlah Service yang digunakan	:	
CATATAN PEREMAJAAN DATA		

B. TAHAPAN INTEGRASI DATA		
REKONSILIASI DATA		
Jumlah Peremajaan Data	Semester 1 :	Semester 2 :

Mengetahui, Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Pejabat Pengelola Kepegawaian Instansi K/L/D (.....)
---	--

DRAFT

LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

PERMOHONAN KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA ASN

LOGO INSTANSI

Nama Instansi K/L/D

Nomor :

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

Lampiran :

Perihal : Permohonan Kerja Sama
Pemanfaatan Data ASN

Kepada

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

c.q. Sekretaris Utama BKN

di-

Tempat.

1. Sehubungan dengan peningkatan pemanfaaan data ASN dalam rangka percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan kerjasama pemanfaatan data ASN melalui integrasi data kepegawaian ASN (nama instansi K/L/D) dengan SIASN BKN.
2. Adapun kebutuhan data untuk proses integrasi tersebut terlampir. Mengingat pentingnya hal tersebut diatas, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat menyetujui permohonan ini.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

(Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi
K/L/D),

(nama lengkap)

NIP.

Tembusan, Yth:

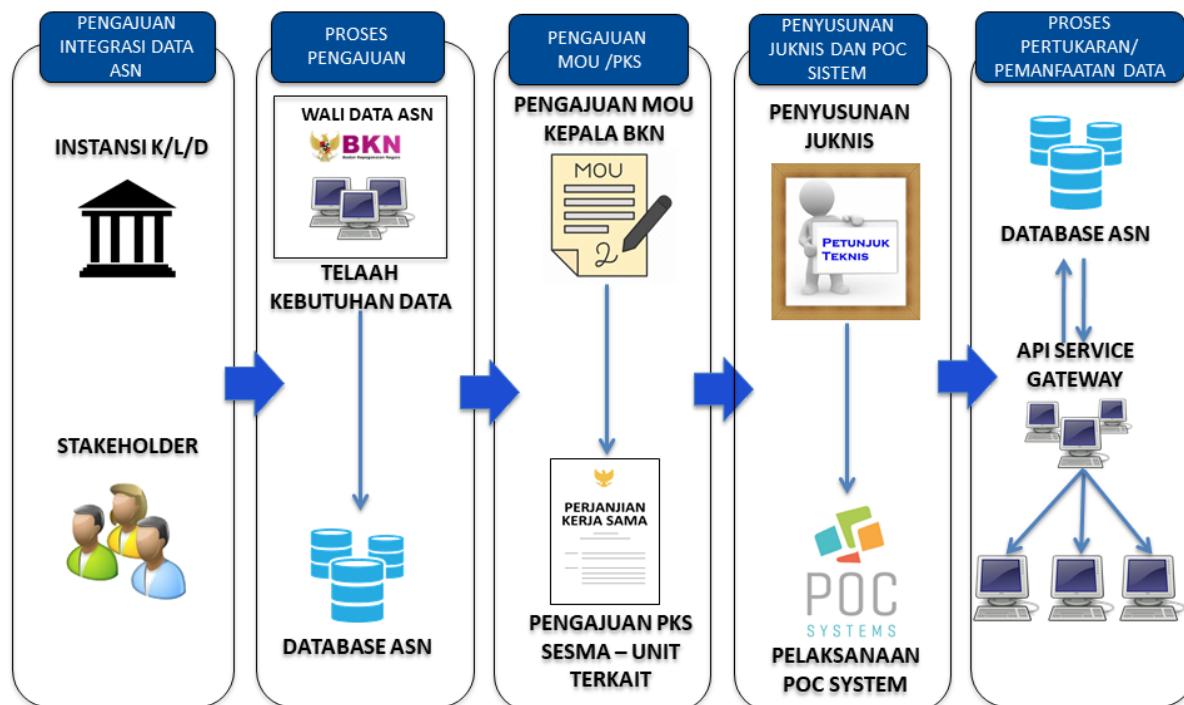
Kepala Badan Kepegawaian Negara

LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

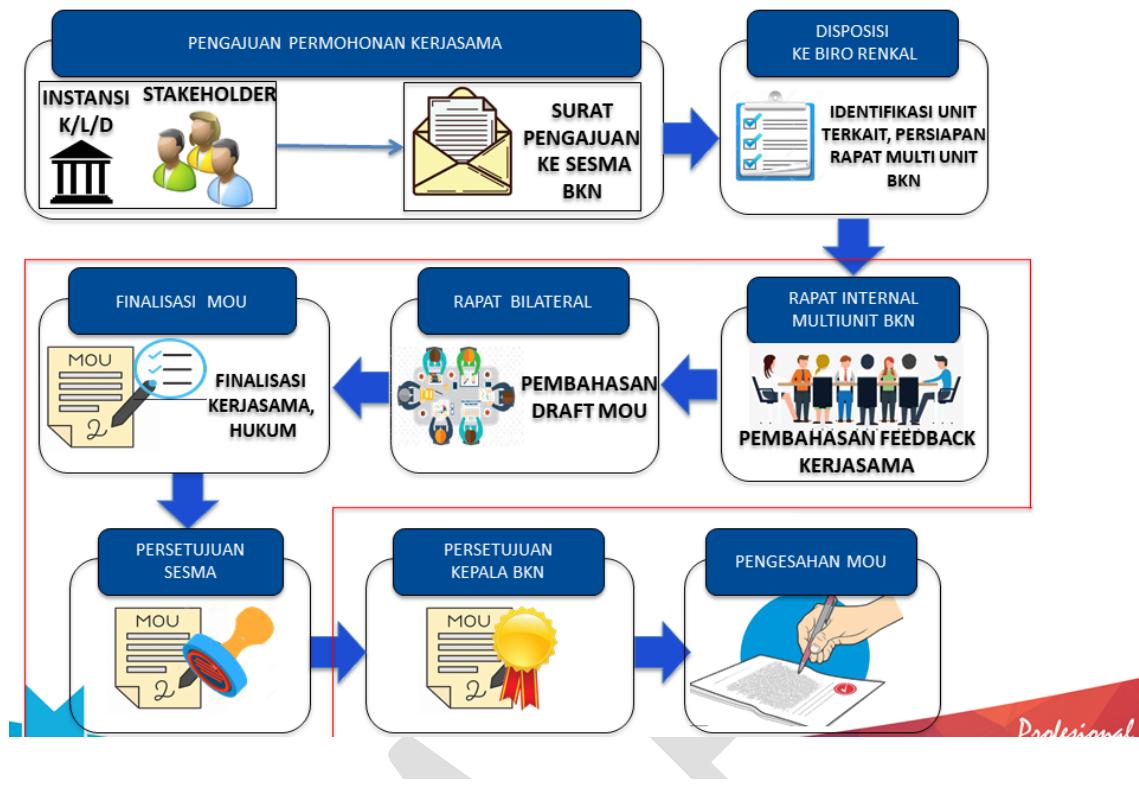
ALUR KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA ASN



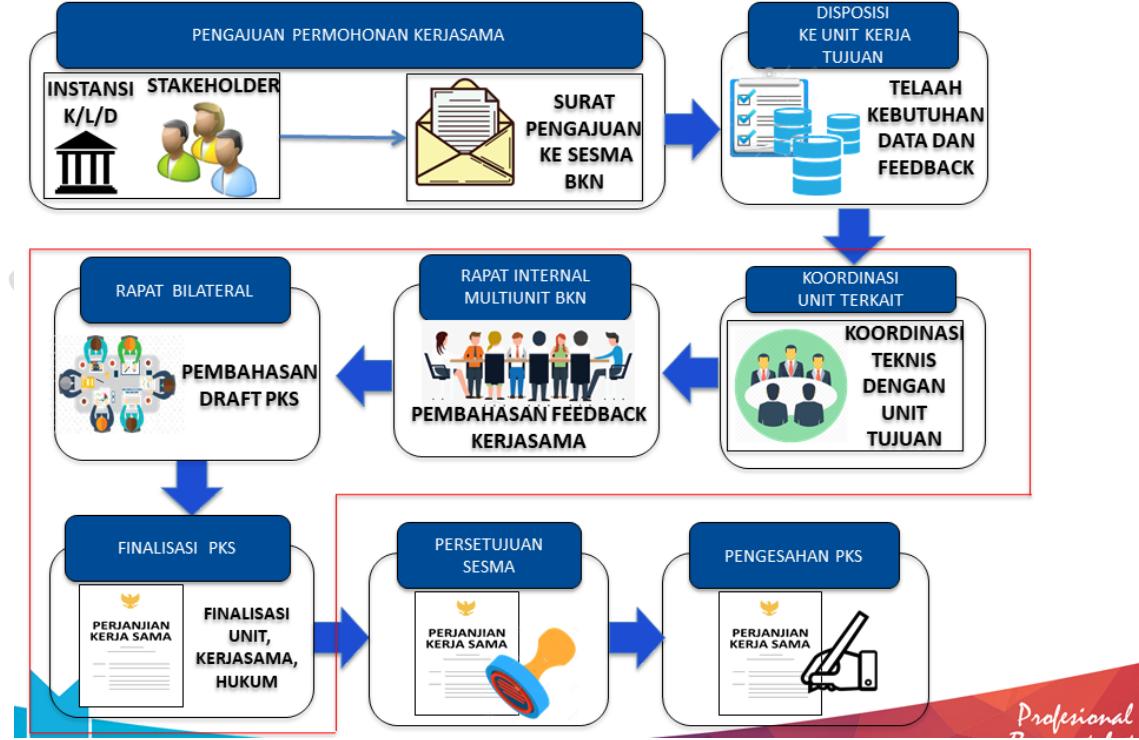
TAHAPAN PEMANFAATAN/PERTUKARAN DATA ASN



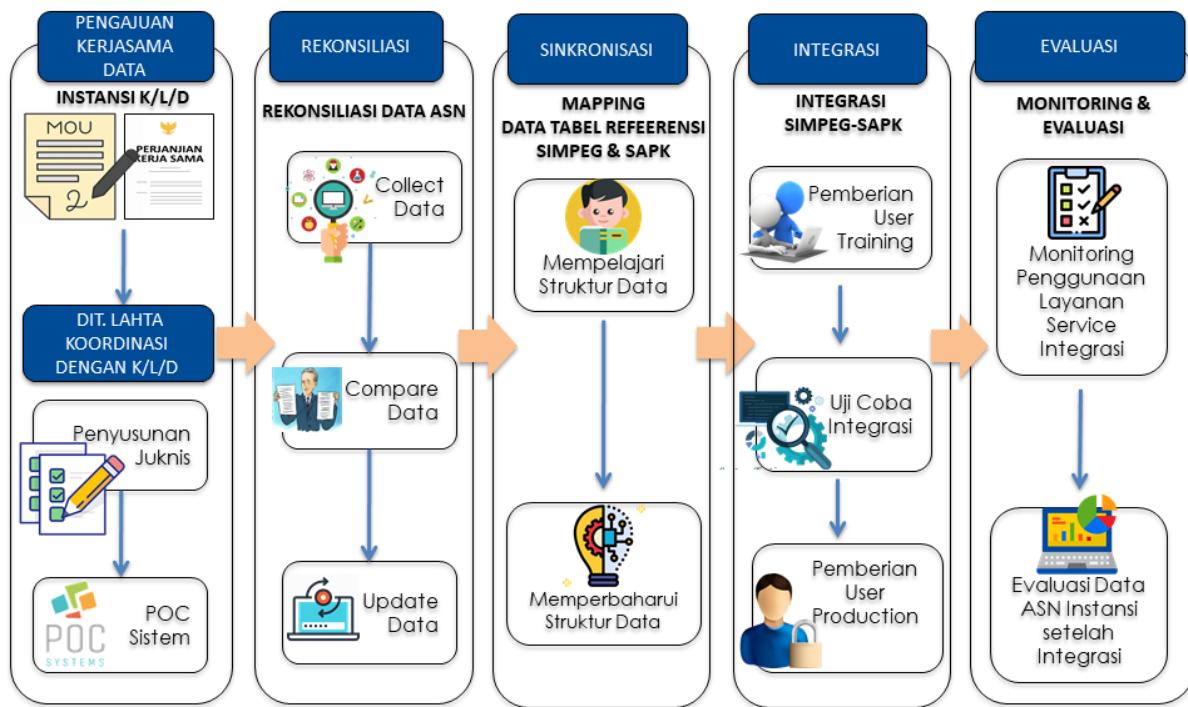
TAHAPAN PENGAJUAN MOU



TAHAPAN PENGAJUAN PKS



TAHAPAN INTEGRASI DATA (*Instansi Pembina/Stakeholder)



DRAFT

LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR KEBUTUHAN DATA KEPEGAWAIAN ASN

DAFTAR KEBUTUHAN DATA KEPEGAWAIAN ASN	
 BKN Badan Kepegawaian Negara	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian “Satu Data ASN Milik Kita”

A. INSTANSI	
Kode Instansi	:
Nama Instansi	:
Wilayah Kanreg	:
PIC	:

B. DAFTAR KEBUTUHAN DATA INSTANSI K/L/D	
Nama Service	Data
<input type="checkbox"/> ID-PNS-RWPWK	Data Riwayat Perubahan Wilayah Kerja
<input type="checkbox"/> ID-PNS-RWPNSUNOR	Data Riwayat Unit Organisasi
<input type="checkbox"/> ID-PNS-RWANGKAKREDIT	Data Riwayat Angka Kredit
<input type="checkbox"/> ID-PNS-RWPEMBERHENTIAN	Data Riwayat Pemberhentian
<input type="checkbox"/> ID-PNS-RWCLTN	Data Riwayat CLTN
<input type="checkbox"/> ID-PNS-RWSKP	Data Riwayat SKP
<input type="checkbox"/> ID-PNS-RWPINDAHINSTANSI	Data Riwayat Pindah Instansi
<input type="checkbox"/> ID-PNS-RWDP3	Data Riwayat DP3
<input type="checkbox"/> ID-PNS-RWPENGHARGAAN	Data Riwayat Penghargaan
<input type="checkbox"/> ID-PNS-RWHUKDIS	Data Riwayat Hukuman Disiplin
<input type="checkbox"/> ID-PNS-RWPMK	Data Riwayat Penyesuaian Masa Kerja
<input type="checkbox"/> ID-PNS-RWGOLONGAN	Data Riwayat Golongan
<input type="checkbox"/> ID-PNS-KURSUS	Data Riwayat Kursus
<input type="checkbox"/> ID-PNS-DATAUTAMA	Data Profil Utama PNS
<input type="checkbox"/> ID-KPO-SK	Data SK Kenaikan Pangkat

<input type="checkbox"/>	ID-KPO-SK-HIST	Data Riwayat Kenaikan Pangkat
<input type="checkbox"/>	ID-PPO-SK	Data SK Pensiun
<input type="checkbox"/>	ID-PPO-SK-HIST	Data Riwayat Pemberhentian
<input type="checkbox"/>	ID-PPO-USULWAFAT	Data Usul Pemberhentian Wafat
<input type="checkbox"/>	ID-PPO-USULWAFAT-HIST	Data Riwayat Usul Pemberhentian Wafat
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-RWPENDIDIKAN	Data Riwayat Pendidikan
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-RWJABATAN	Data Riwayat Jabatan
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-RWDIKLAT	Data Riwayat Diklat
<input type="checkbox"/>	ID-PERE-UPDATED	Data Update Peremajaan Data
<input type="checkbox"/>	ID-PERE-UPDATED-HIST	Data Update Riwayat Peremajaan Data
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-DATA-PASANGAN	Data Pasangan PNS
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-DATA-ORTU	Data Orang Tua PNS
<input type="checkbox"/>	ID-PNS-DATA-ANAK	Data Anak PNS

Mengetahui, Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian (.....)	Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Pejabat Pengelola Kepegawaian Instansi K/L/D (.....)
--	--

LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DATA ASN

 Badan Kepegawaian Negara	Nomor : Hal : Diskusi teknis sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Kepegawaian ASN dalam layanan Lingkup Tugas (Nama Instansi) Nomor:..... dan Nomor:....tanggal, merupakan Petunjuk Teknis yang tidak terpisahkan dari PKS dimaksud untuk dilaksanakan PARA PIHAK.	
	Tanggal :	
	Waktu :	
	Tempat :	
Peserta :		
1. Badan Kepegawaian Negara (BKN) : Terlampir		
2. : Terlampir		
PEMBAHASAN		
Obyektif : Revisi petunjuk teknis mengenai pemanfaatan Data Kepegawaian ASN		
No.	PEMBAHASAN	KESEPAKATAN
1.	Infrastruktur Network	Kondisi Existing a. Jaringan komunikasi data antara Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN dan (Nama Instansi) sudah terhubung dan dibebankan kepada BKN dengan besaran bandwidth Kbps yang disepakati melalui PT. Telkom dengan berbasiskan VPN- MPLS dengan IP LAN :; b. Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud huruf a sudah dilakukan dan sudah tersambung dengan status aktif.
2.	Sistem Aplikasi	Kondisi Existing a. (Nama Instansi) melakukan koneksi implementasi akses web service pemanfaatan data kependudukan melalui metode REST dalam bentuk format JSON; b. Spesifikasi petunjuk teknis berupa JSON, tabel master, form pengajuan <i>User ID</i> , dan pendaftaran IP Address telah diserahkan oleh BKN kepada (Nama Instansi) dan sudah berjalan; c. (Nama Instansi) saat ini telah diberikan 1 User ID (<i>Single user</i>) dengan kuota hit NIK per hari; d. Sampai saat ini (Nama Instansi) telah mengakses NIP sebanyak

	<p>e. Permohonan penambahan kuota (Nama Instansi) dapat dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan penambahan kuota akses per hari dengan melampirkan kajian teknis dari (Nama Instansi);</p> <p>f. Kolom permohonan <i>User ID Development</i> dan 1 <i>User ID (Single User)</i> dari (Nama Instansi) ke BKN yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Nomor Induk Pegawai2) Nama Lengkap3)4)5)6)7) <p>8) <i>User ID Lokal Hak Penerima Akses pada Aplikasi Internal Instansi Pengguna</i></p> <p>*Permohonan <i>User ID</i> yang diproses adalah yang isian kolomnya lengkap</p> <p>g. <i>Output</i> dari huruf f adalah <i>username</i> dan <i>password</i>;</p> <p>h. Penanggung jawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah Deputi.... yang bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan <i>Single User ID</i> tersebut;</p> <p>i. Elemen data yang sudah diakses melalui <i>webservice</i>, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) NIP*2)*3)*4)5)*6)*7) <p>Pemanfaatan data kepegawaian ASN oleh (Nama Instansi) adalah berbasiskan NIP.</p> <p><u>Penyesuaian yang akan dilakukan:</u></p> <p>j. Elemen data yang akan diakses melalui <i>web service</i>, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ID PNS*2) NIP*3)4)5)6)7)8)9) <p>10) Alamat (Alamat*, KodeProvinsi*, NamaProvinsi*, KodeKabupaten/Kota*, NamaKabupaten/Kota*, KodeKecamatan*, NamaKecamatan*, KodeDesa/Kelurahan*, NamaDesa/Kelurahan*, RT, RW)</p> <p>*) Data wajibterisi</p> <p>k. Penambahan akses data : (Jika ada penambahan akses data).</p> <p>l. Pemanfaatan data kepegawaian ASN oleh (Nama Instansi) adalah berbasiskan NIP;</p> <p>m. (Nama Instansi) bertanggung jawab penuh atas penggunaan API (Application Programming Interface) hak akses database kependudukan untuk keperluan sinkronisasi, verifikasi dan validasi data.....;</p>
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> n. Selanjutnya (Nama Instansi) akan mengajukan surat permohonan jika terdapat penambahan kuota akses yang didasari dengan hasil telaah teknis yang diusulkan; o. Sebagaimana dimaksud pada huruf i, surat permohonan ditujukan dan dialamatkan ke Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung dan dikirimkan ke alamat Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur; p. (Nama Instansi) wajib mendaftarkan <i>user client</i> di Kantor (Nama Instansi) yang mengakses API <i>web service</i> data kepegawaian BKN. Surat Permohonan Pendaftaran <i>user client</i> dari (Nama Instansi) yang ditujukan kepada Deputi SINKA BKN tembusan Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian; q. Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN dapat melakukan Pengecekan secara teknis terkait pemanfaatan data kepegawaian ASN dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan-undangan; r. Sebagai bentuk evaluasi berkala maka (Nama Instansi) akan menyampaikan laporan dalam kurun periode 6 (enam) bulan sekali meliputi rekaman catatan riwayat transaksi akses (<i>log</i>), mekanisme penyimpanan dan diseminasi data kependudukan dilembaga pengguna. s. (Nama Instansi) wajib menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses dari BKN; dan
3.	Aplikasi Data Balikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Spesifikasi petunjuk teknis berupa JSON, Script Aplikasi Data Balikan, Pedoman Aplikasi, <i>user name</i>, <i>password</i> dan Token untuk <i>Web service</i> terlampir; b. (Nama Instansi) melakukan implementasi akses <i>web service</i> Aplikasi Data Balikan dalam bentuk format JSON; c. Dalam Aplikasi Data Balikan terdapat 3 (tiga) metode meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Metode <i>Upload</i> Data Excel dan CSV; 2. Metode <i>Form Online</i>; dan 3. Metode <i>Web Service</i>. d. Dalam hal ini (Nama Instansi) akan menggunakan metode <i>web service</i> dan akan menggunakan <i>Upload</i> Data Excel dan CSV untuk data terdahulu (yang <i>existing</i>); dan e. (Nama Instansi) akan memberikan data balikan kepada Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN berupa (isi dengan data balikan yang diberikan).
4.	Pemadanan Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Proses Pemadanan data dilakukan untuk melakukan verifikasi dan validasi data b. (Nama Instansi) akan menyerahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN melalui surat permohonan pemadanan data yang ditujukan kepada Deputi SINKA Tembusan Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan; c. <i>Database</i> yang diserahkan oleh (Nama Instansi) berupa file format CSV.
5.	Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> a. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak: <ul style="list-style-type: none"> Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN: <ul style="list-style-type: none"> 1. Nama (No. HP) 2. Nama (No. HP) 3. Nama (No. HP) 4. Nama (No. HP) 5. Nama (No. HP) <p>(Nama Instansi):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Nama (081....) 2. Nama (081....)

	<p>b. Apabila diperlukan, pertemuan teknis lanjutan akan dilakukan kemudian terkait data balikan dan hal-hal teknis lainnya untuk optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;</p> <p>c. Jika terdapat pergantian Deputi....maupun perubahan nama lembaga wajib memberitahukan kepada Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN melalui surat pemberitahuan;</p> <p>d. Sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas, surat ditujukan dan dialamatkan ke Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung dan dikirimkan ke alamat Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur;</p> <p>e. <i>Proof of Concept</i> (PoC) akan dilakukan di kantor (Nama Instansi) berdasarkan Surat Permohonan Pelaksanaan PoC yang diajukan kepada Deputi SINKA BKN tembusan ke Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian; dan</p> <p>f. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan oleh Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN sewaktu-waktu.</p>
--	--

Jakarta, Tanggal/Bulan/Tahun

MENGETAHUI:

DIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	(NAMA INSTANSI)
1. Nama NIP: <hr/>	1. Nama NIP: ... <hr/>
2. Nama NIP: <hr/>	2. Nama NIP: ... <hr/>